



LAPORAN TAHUNAN KOMPAK

2020

LAPORAN TAHUNAN KOMPAK


2020

Sambutan <i>Team Leader</i> KOMPAK	7
<hr/>	
Ringkasan Eksekutif	11
Kegiatan Unggulan KOMPAK	18
Capaian Akhir (EOFO)	19
Capaian Antara (IO)	21
Ikhtisar Kinerja KOMPAK	26
Kolaborasi Mitra	28
<hr/>	
Pengelolaan Keuangan Publik	33
Ringkasan Pencapaian	34
Analisis Situasi	34
Kemajuan dan Tantangan	36
<hr/>	
Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)	59
Ringkasan Pencapaian	60
Analisis Situasi	60
Kemajuan dan Tantangan	64
<hr/>	
Penguatan Kecamatan dan Desa	79
Ringkasan Pencapaian	80
Analisis Situasi	80
Kemajuan dan Tantangan	82

Sistem Informasi Desa (SID)	97
Ringkasan Pencapaian	98
Analisis Situasi	99
Kemajuan dan Tantangan	104
<hr/>	
Akuntabilitas Sosial	117
Ringkasan Pencapaian	118
Analisis Situasi	118
Kemajuan dan Tantangan	120
<hr/>	
Pengembangan Ekonomi Lokal	135
Ringkasan Pencapaian	136
Analisis Situasi	137
Kemajuan dan Tantangan	139
<hr/>	
Lintas Sektor dan Penghentian Bertahap	151
Kemajuan dan Tantangan	152
<hr/>	
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	161
<hr/>	
Penelitian	172
<hr/>	
Laporan Keuangan	178

Sambutan *Team Leader* KOMPAK



 Memasuki masa 18 bulan terakhir program KOMPAK, kami tetap berkomitmen mewujudkan tujuan akhir program, atau yang kami sebut sebagai KOMPAK Sukses 2022.

Tahun 2020 adalah tahun paling luar biasa sepanjang sejarah KOMPAK. Luar biasa, karena untuk pertama kalinya kita mengalami pandemi. Luar biasa, karena kita harus beradaptasi dengan tantangan bekerja dari rumah dalam rangka mengurangi risiko terpapar COVID-19 sembari menjaga hubungan erat dengan pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Indonesia dan Australia. Saya sangat bangga dengan tim KOMPAK termasuk mitra-mitra pelaksana program, karena dalam situasi yang menantang ini, kita berhasil mencapai target sesuai rencana kerja tahunan kita.

Pada bulan Maret 2020, tak lama setelah kasus COVID-19 muncul di Indonesia, tim KOMPAK segera mengambil tindakan untuk menyesuaikan strategi dan rencana kerja agar kegiatan unggulan KOMPAK dapat membantu pemerintah menanggulangi dampak pandemi. Model-model KOMPAK dan pembelajaran yang diperoleh selama lima tahun terakhir, berkontribusi pada upaya penanggulangan dampak COVID-19. Salah satu contoh konkretnya ialah pemanfaatan sistem informasi desa oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi rumah tangga yang membutuhkan bantuan sosial.

Saya bangga atas kesigapan, adaptabilitas, dan ketahanan tim KOMPAK dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.

Berkenaan dengan pencapaian setahun terakhir ini, saya ingin menyampaikan bagaimana model-model KOMPAK tetap mampu memberi nilai tambah di tengah pandemi yang mengubah cara kita melaksanakan, merencanakan, dan menyampaikan kegiatan.

Pertama, pendekatan perencanaan dan pengelolaan program yang adaptif untuk menyesuaikan diri dengan pandemi terbukti bermanfaat. Salah satu kekuatan KOMPAK adalah kemampuannya melakukan refleksi dan adaptasi terkait program. Kami dapat menyesuaikan rencana kerja demi menanggapi perubahan kebutuhan dan konteks operasional yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pendekatan adaptif ini didukung tata kelola program yang kuat melalui kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Tata kelola ini memungkinkan KOMPAK menyesuaikan rencana dan aktivitas kerja sembari tetap mengoptimalkan keunggulan dasar dan berpegang pada tujuan jangka panjang.

Kedua, intervensi 'tata kelola' KOMPAK terbukti menjadi faktor utama yang memperkuat penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, KOMPAK telah mengujicobakan inovasi guna mendukung sistem inti, fungsi, dan proses kerja pemerintah, khususnya di kabupaten, kecamatan, dan desa dalam rangka memberikan layanan dan perluasan peluang ekonomi yang lebih baik. Intervensi-intervensi tersebut mendukung kegiatan penanggulangan COVID-19. Sebagai contoh, inisiatif KOMPAK untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran telah membantu pemerintah kabupaten dan desa dalam menyusun ulang prioritas anggaran mereka untuk COVID-19.

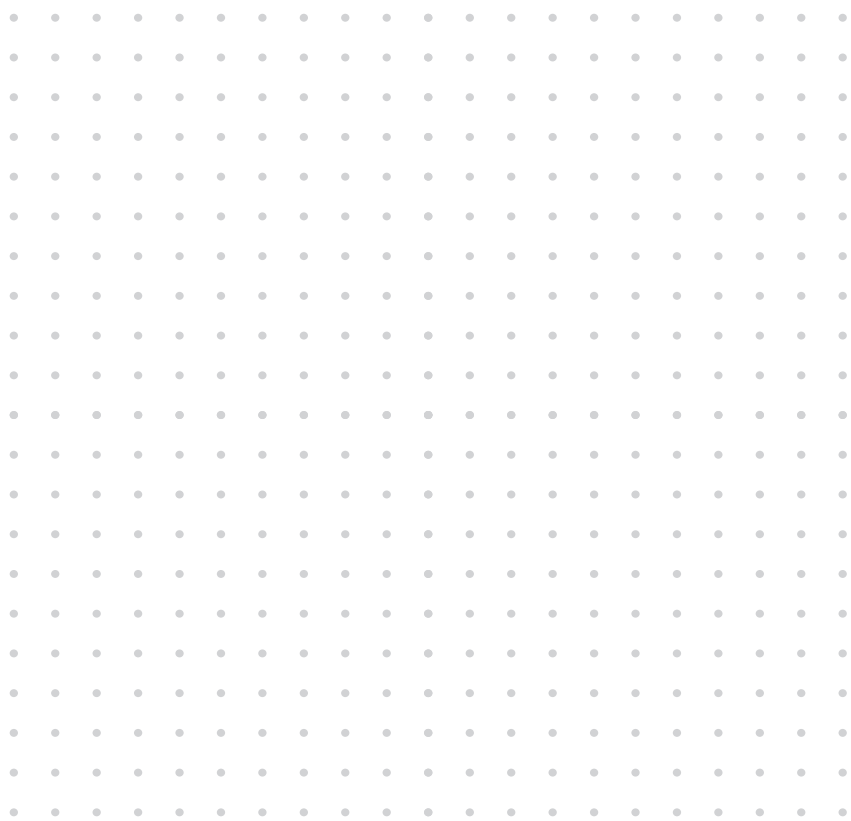
Terakhir, peran KOMPAK sebagai fasilitator perubahan yang tepercaya membantu mendorong koordinasi yang lebih baik di berbagai tingkat pemerintahan dalam menanggapi pandemi. Kombinasi pendekatan hulu dan hilir, fasilitasi proses mulai dari uji coba hingga penyusunan kebijakan, serta pendokumentasian pembelajaran amat penting dalam upaya meningkatkan relevansi dan penerimaan program melebihi yang bisa diharapkan dalam situasi 'normal.'

Akhir kata, saya ingin berterima kasih kepada para pemangku kepentingan yang terhormat, utamanya Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, dan tim KOMPAK atas kerja keras dan dukungannya sepanjang tahun 2020 yang luar biasa. Memasuki masa 18 bulan terakhir program KOMPAK, kami tetap berkomitmen mewujudkan tujuan akhir program, yang kami sebut sebagai KOMPAK Sukses 2022. Kami terus berupaya mengintegrasikan pendekatan KOMPAK dengan mekanisme kerja pemerintah dan masyarakat, guna membawa perubahan

berkelanjutan di bidang yang menjadi fokus utama kami. Kami ingin memastikan bahwa pembelajaran dari delapan tahun pelaksanaan program KOMPAK akan terus berlanjut bahkan setelah program berakhir. Selain itu, kami akan tetap sigap dan adaptif dalam menghadapi pandemi.

Anna Winoto

Team Leader Program KOMPAK



BENDUNGAN BISA



Sepeda & keren



KOMPAK

Pelaksanaan

Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan lainnya
(SEPEDA KEREN)

KEMAMATAN BENDUNGAN

...lungan | 7, 14, 18, 25, 26 November 2020





Ringkasan Eksekutif

— Ringkasan Eksekutif

Tahun 2020 merupakan tahun yang diwarnai dengan dampak dan respons pandemi COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan di Indonesia merupakan yang paling terdampak oleh virus ini, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini berpotensi menihilkan capaian yang sudah ada dalam hal penyalarsan proses pemerintahan, pengurangan kemiskinan, dan pengadaan peluang ekonomi. Pemerintah Indonesia merespons pandemi melalui program masif yang mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan berbagai peraturan yang berubah dengan cepat dan saling tumpang-tindih sekaligus mengidentifikasi penduduk yang paling membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, KOMPAK menggunakan pengalaman dan model unggulannya untuk membantu pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam merespons dan meminimalisir dampak COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia termasuk parah dan berpotensi menjadi semakin buruk. Penurunan ekonomi akibat pandemi yang dialami Indonesia pada 2020 berujung pada meningkatnya jumlah orang yang jatuh ke dalam kemiskinan. Diperkirakan pandemi telah menambah angka pengangguran sekitar 2,6 hingga 3,7 juta orang. COVID-19 juga memberikan dampak yang tidak proporsional bagi perempuan dan kelompok rentan dari segi kesehatan, kesejahteraan sosial, dan mata pencaharian.¹

Sama seperti negara lainnya, Pemerintah Indonesia merespons gelombang pertama COVID-19 dengan menerapkan pembatasan mobilitas, penutupan perbatasan, serta pemeriksaan,

¹ Bappenas, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 Bagi UMKM*, Desember 2020

penelusuran, dan isolasi di berbagai daerah.² Selama fase pemulihan, pemerintah daerah, baik di kabupaten, kecamatan dan - untuk pertama kalinya - desa, menjadi pihak yang berada di garda depan dalam pemberian respons. Seluruh jajaran pemerintahan harus memperluas dan memperkuat pemberian layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan sosial selama pandemi. Di samping itu, pemerintah daerah juga harus menangani dampak penurunan ekonomi yang tajam dan penurunan kapasitas fiskal yang timbul akibat berkurangnya transfer ke daerah dan pendapatan dari sumber lokal/pendapatan asli daerah.

Saat memasuki tahun 2020—tahun keenam dari delapan tahun investasi Pemerintah Australia—KOMPAK fokus memperkuat pemerintah daerah melembagakan model yang paling efektif, dan menggunakan model tersebut untuk mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Namun, pandemi COVID-19 memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk memfokus ulang prioritas dan sumber daya mereka untuk penanganan pandemi. KOMPAK beradaptasi dengan cepat demi membantu pemerintah merancang dan mengimplementasikan intervensi penanganan pandemi serta menyesuaikan berbagai kegiatannya guna mendukung pemenuhan kebutuhan dan pencapaian prioritas pemerintah pusat dan daerah yang terus berubah.

Pada bulan April 2020, KOMPAK merevisi rencana kerja tahunan yang mencakup delapan prioritas yang dinilai KOMPAK akan memberikan dampak paling efektif bagi respons pandemi. Portofolio KOMPAK selaras dengan pilar-pilar kerangka kerja “Kemitraan untuk Pemulihan” dari Pemerintah Australia yang menasar stabilitas dan pemulihan ekonomi, dengan fokus pada tata kelola, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih baik.

KOMPAK menjalankan prioritas baru ini sembari memaksimalkan kekuatan inti dan kegiatan unggulannya. Tim Penasihat Strategis Independen (*Independent Strategy Advisory Team/ISAT*) KOMPAK dalam misi mereka di bulan Oktober 2020, menyimpulkan:

‘KOMPAK menangani situasi pandemi yang sulit ini dengan baik melalui perombakan fokus rencana kerja ke penanganan COVID-19 yang berpijak pada kekuatan dari investasi unggulannya. Respons pandemi yang dilakukan KOMPAK karenanya menjadi tepat waktu, terarah, dan efektif.’

2 Bank Dunia, *INDONESIA ECONOMIC PROSPECTS: Towards a Secure and Fast Recovery*, Jakarta, Desember 2020

Tim ISAT lebih lanjut menyebutkan bahwa:

‘Sejak dahulu, kekuatan KOMPAK adalah kehadirannya yang solid di daerah, pengetahuan praktisnya tentang cara kerja di kabupaten dan desa, sekaligus kemampuannya memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh di lapangan dalam diskusi kebijakan di tingkat nasional sehingga menghasilkan kebijakan dan peraturan yang relevan. KOMPAK mampu melakukan penilaian cepat atas lingkungan operasionalnya termasuk kendala yang dihadapi sekaligus menyesuaikan keterlibatan mereka dengan pemangku kebijakan di pemerintah pusat dan daerah dengan cepat guna memberikan bantuan tepat waktu dalam respons pandemi.’

Respons KOMPAK sejauh ini dilakukan lewat penyesuaian cepat untuk membantu pemerintah mengomunikasikan perubahan kebijakan melalui pengembangan materi panduan dan membantu pemerintah daerah menerapkan peraturan yang berubah dengan cepat.

Sebagai contoh, KOMPAK mendukung pemerintah pusat untuk menganalisis dan mengonsolidasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk COVID-19. Dukungan ini menghasilkan panduan yang lebih sederhana terkait cara pemerintah kabupaten dan desa menyesuaikan anggaran tahunan dan rencana kerja dalam respons COVID-19. Hingga Juni 2020, 1.674 pejabat pemerintah telah menerima pelatihan atau menghadiri webinar untuk memahami dan menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan publik; sebanyak 24 pemerintah kabupaten di wilayah kerja KOMPAK telah merevisi anggaran tahun 2020 mereka dan menerima alokasi anggaran. Pemberian dukungan untuk pemerintah daerah memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dan model yang ada.

Pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat menggunakan instrumen perencanaan dan penganggaran yang dikembangkan oleh KOMPAK dalam mengimplementasikan pedoman nasional. Sementara itu, pemerintah kecamatan memikul peran yang lebih besar khususnya melalui Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dalam mendukung pemerintah desa

merencanakan responsnya. Dukungan ini membantu pemerintah desa membentuk Gugus Tugas COVID-19, mekanisme pemberian umpan balik dari masyarakat, dan program perlindungan sosial yang lebih inklusif.

KOMPAK juga berhasil menggunakan penelitian, pengalaman, dan pembelajarannya untuk memberi kontribusi dalam respons pandemi pemerintah.

Misalnya, dalam mengenali risiko yang dihadapi oleh kelompok yang sangat rentan yang tidak termasuk dalam definisi umum kerentanan (yang menggunakan kesulitan ekonomi sebagai indikator), KOMPAK berhasil mengadvokasi pemerintah untuk menerapkan definisi kerentanan yang inklusif dalam respons COVID-19. Dengan demikian, kelompok-kelompok seperti rumah tangga yang dikepalai perempuan, orang tanpa dokumen kependudukan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) menerima manfaat yang lebih baik dalam respons pandemi.

Karakteristik lain dari cara kerja KOMPAK ialah kemampuannya menjalankan program lintas kegiatan unggulan dalam membantu respons pandemi. Fleksibilitas ini sangat membantu pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Pemerintah desa perlu mendanai dan mengelola bantuan langsung tunai baru yang dimaksudkan bagi masyarakat miskin dan rentan ini menggunakan mekanisme perencanaan dan transfer fiskal yang ada. Kerja KOMPAK dalam penguatan kecamatan dan desa memungkinkan diberikannya bantuan teknis dan pelatihan kepada pemerintah desa demi mempersiapkan mereka untuk mendistribusikan BLT-Dana Desa. KOMPAK juga menggunakan mekanisme sistem informasi desa (SID) untuk mengidentifikasi penerima yang memenuhi syarat dan orang-orang yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki dokumen identitas sah. Dengan informasi ini, KOMPAK membantu desa-desa mengerahkan fasilitator Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) guna membantu masyarakat rentan mendapatkan dokumen sah yang diperlukan untuk mengakses program bantuan sosial.

Secara umum, KOMPAK bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan penyediaan layanan dan peluang ekonomi. Untuk mencapai hal ini, KOMPAK mendukung inisiatif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan memberikan layanan dasar serta pengembangan ekonomi. Pandemi memberikan kesempatan untuk menguji pendekatan KOMPAK dan efektivitas pendekatan ini dalam membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi.

Perubahan fokus KOMPAK untuk mendukung respons COVID-19 pemerintah dilakukan berdasarkan pengalaman dan pendekatan yang telah dikembangkan selama enam tahun terakhir. Terkait hal ini, laporan ISAT November 2020 menyebutkan:

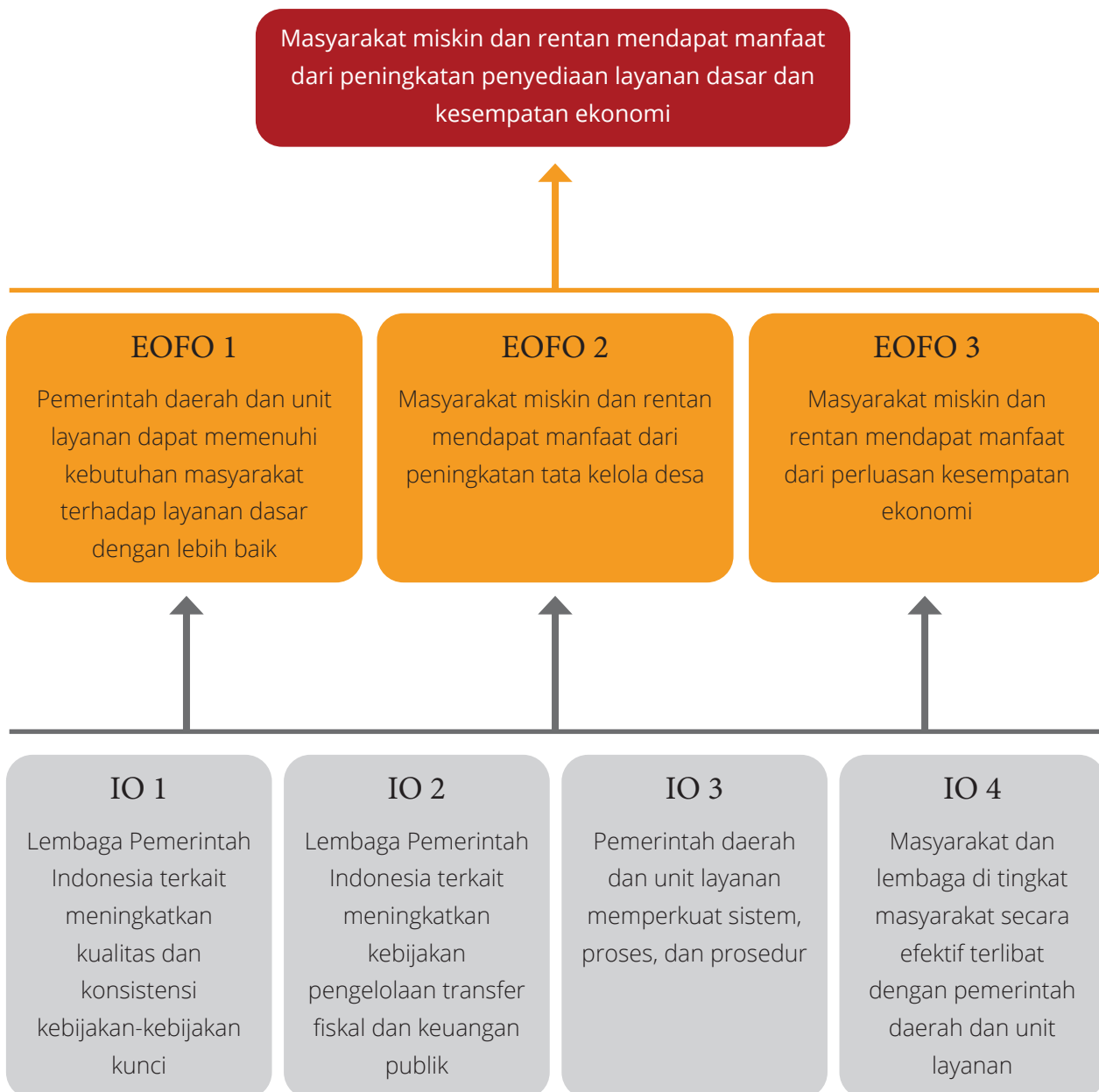
‘Hasil investasi jangka panjang Australia di KOMPAK telah menunjukkan keunggulannya selama pandemi. Tidak ada program, organisasi atau fasilitas lain yang memiliki kemampuan serupa dengan KOMPAK untuk membantu Pemerintah [Indonesia] dalam krisis semacam ini.’

Ke depannya, KOMPAK akan terus menyeimbangkan fokus pemenuhan kebutuhan mendesak dalam respons COVID-19 dengan tujuan jangka panjang untuk melembagakan model dan kebijakan yang terbukti efektif. KOMPAK akan mempertahankan investasi di bidang-bidang unggulannya yang juga berkontribusi pada pencapaian tujuan KOMPAK secara keseluruhan, capaian akhir, dan capaian jangka menengah.

CAPAIAN FASILITAS DAN KEGIATAN UNGGULAN KOMPAK

Kerangka kerja strategis KOMPAK terdiri dari capaian akhir (EOFO) dan capaian antara (IO) serta kegiatan unggulan. EOFO dan IO adalah bagian dari rancangan awal program dan memberikan kerangka kerja jangka panjang yang konsisten yang dapat memberikan arahan dalam penyesuaian program. Kegiatan unggulan yang dikembangkan pada 2019 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sektor dan tujuan kegiatan yang dikerjakan KOMPAK sampai dengan 2022. Sebagian besar kegiatan KOMPAK (termasuk laporan ini dan rencana kerja tahunan) disusun berdasarkan kegiatan unggulan. Untuk memastikan bahwa KOMPAK tetap berpegang pada tujuan awal, bagian ini memberikan gambaran tentang capaian kunci dan tantangan dalam upaya merealisasikan EOFO dan IO.

Capaian Akhir (EOFO) dan Capaian Antara (IO) KOMPAK



KEGIATAN UNGGULAN KOMPAK



1. Pengelolaan keuangan publik (PFM)

Menggunakan instrumen dan analisis PFM untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar.



2. Penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati (PASH)

Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kelengkapan data kependudukan.



3. Penguatan kecamatan dan desa

Menjadikan kecamatan dan desa sebagai pusat tata kelola peningkatan kualitas layanan dasar.



4. Sistem informasi desa

Mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan dan penganggaran.



5. Akuntabilitas sosial

Memperkuat akuntabilitas sosial guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan.



6. Keperantaraan pasar

Mendorong keperantaraan pasar untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.



7. Lintas sektor

Mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, inovasi, serta riset dan data analitik yang kuat.



8. Penghentian bertahap

Secara bertahap menghentikan kegiatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang tidak secara langsung sejalan dengan prioritas kegiatan unggulan.

CAPAIAN AKHIR (EOFO)

EOFO 1: Pemerintah daerah dan unit layanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar dengan lebih baik

Dengan dukungan KOMPAK, pemerintah daerah telah memperoleh kemajuan penting dalam perencanaan dan penyediaan layanan bagi masyarakatnya. COVID-19 telah memberikan tekanan tambahan pada pemerintah kabupaten dan desa, tetapi sistem dan pendekatan yang dipelopori oleh KOMPAK membantu pemerintah untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan ini secara lebih akurat.

Pemerintah kabupaten kini memiliki informasi yang dapat mereka gunakan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Melalui kemitraan dengan pemerintah dan kelompok lain, KOMPAK mampu mengambil pelajaran dari pengalaman di daerah dan menerapkannya pada kerangka kebijakan yang lebih luas. Hasilnya adalah tersedianya pedoman nasional dan sistem perencanaan untuk pemerintah kabupaten terkait respons dan penganggaran COVID-19. KOMPAK juga telah menyediakan data yang bermanfaat bagi pemerintah melalui studi dampak COVID-19 pada perempuan dan kelompok rentan dan terus memperbaiki instrumen untuk menganalisis kemiskinan (SEPAKAT), sistem informasi desa (SID), program perlindungan sosial (Bansos 360), dan mekanisme transfer fiskal.

Pemerintah desa juga kini menjadi lebih kuat. Dengan dukungan kecamatan (dan model PTPD KOMPAK), pemerintah desa mampu merespons COVID-19 dengan mengidentifikasi dan mendaftarkan kelompok rentan (melalui layanan penjangkauan catatan sipil), mendokumentasikan, dan menganalisis informasi tersebut (dengan bantuan sistem informasi desa) dan kemudian menggunakan data ini dalam perencanaan dan alokasi sumber daya melalui revisi APB Desa untuk COVID-19.

EOFO 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari peningkatan tata kelola desa

Masyarakat miskin dan rentan seharusnya mendapat manfaat paling besar dari kerja efektif pemerintah desa. Inisiatif KOMPAK untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas sosial pemerintah desa terbukti efektif dan teruji selama pandemi COVID-19.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum masyarakat membantu memastikan tersalurkannya aspirasi dari masyarakat ke pemerintah desa. Model dan pendekatan yang dikembangkan KOMPAK dan mitranya, seperti forum khusus untuk perempuan dan kelompok rentan (Musyawarah Khusus) serta mekanisme umpan balik masyarakat (Posko Aspirasi) telah disertakan ke dalam pedoman nasional yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Model dan pendekatan ini juga telah diadaptasi oleh desa untuk merespons COVID-19, dengan hampir semua desa di lokasi yang didukung KOMPAK (95%) mengadakan Musdes Khusus³ untuk pemilihan dan pengesahan penerima manfaat BLT-Dana Desa. Mekanisme umpan balik, seperti grup *Whatsapp* desa atau Posko Aspirasi, kini telah terbentuk di lebih dari setengah desa dampingan KOMPAK. Selain itu, upaya penanggulangan COVID-19 di desa semakin transparan dengan dipublikasikannya daftar penerima manfaat yang dapat diakses umum di 85% desa.

EOFO 3: Masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari perluasan kesempatan ekonomi

KOMPAK sudah menguji coba model keperantaraan pasar di tujuh kabupaten. Selama pandemi COVID-19, KOMPAK fokus menjaga keberlangsungan uji coba ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi yang lebih luas, terutama pada penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekonomi bagi masyarakat melalui perannya mendistribusikan bantuan pangan. Efektivitas model ini, khususnya dalam membantu

3 Musdes Khusus ini berbeda dengan Musyawarah Khusus yang ditujukan untuk perempuan dan kelompok rentan. Musdes Khusus adalah forum khusus tingkat desa untuk membahas penerima manfaat BLT-Dana Desa sedangkan Musyawarah Khusus adalah forum sebelum Musdes yang khusus menargetkan perempuan dan kelompok rentan untuk mengumpulkan masukan/suara/kebutuhan mereka yang kemudian akan dibawa ke Musdes reguler sebagai usulan kegiatan untuk dibiayai menggunakan anggaran desa.

kelompok miskin dan rentan, masih perlu dievaluasi lebih jauh sebelum dipromosikan untuk penerapan yang lebih luas.

CAPAIAN ANTARA (IO)

IO 1: Lembaga Pemerintah Indonesia terkait meningkatkan kualitas dan konsistensi kebijakan-kebijakan kunci

Respons COVID-19 berujung pada banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang harus diterapkan pemerintah daerah. Hingga Mei 2020, ada sebanyak 208 kebijakan kementerian/lembaga yang telah dikeluarkan untuk pemerintah daerah.⁴ KOMPAK merespons dengan mendukung pemerintah pusat—Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemendesa PDTT, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)—untuk menyusun dan menerbitkan pedoman yang dikonsolidasikan dan disederhanakan serta memperkuat bukti dampak pandemi terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kegiatan KOMPAK di tingkat pusat dan daerah menempatkannya di posisi yang unik untuk berkontribusi pada kebijakan nasional sembari membantu pemerintah daerah menerapkan kebijakan tersebut.

KOMPAK membantu penyusunan delapan kebijakan dan pedoman nasional utama.⁵ Kebijakan dan pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah kabupaten dan desa dalam merevisi anggaran mereka untuk respons COVID-19, mengumpulkan data kelompok rentan, serta menyelenggarakan BLT-Dana Desa. Pedoman dan perangkat serta dokumen pendukung telah

4 Bappenas, PUSKAPA, KOMPAK dan UNICEF (2020). *Berpacu dengan Waktu: Catatan Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak COVID19- pada Anak dan Individu Rentan.*

5 Kebijakan dan pedoman nasional yang dikembangkan dengan bantuan KOMPAK:

1. Kemendagri (2020). "Permendagri Nomor 2020/40 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Daerah (RKPD)."
2. Kemendagri (2020). "Pedoman Penanganan COVID-19 Menggunakan Anggaran Desa."
3. Kemendagri (2020). "Instruksi Kemendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 melalui Anggaran Desa."
4. Kemendagri (2020). "Pedoman Bagi Kecamatan dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi COVID-19 dan serta Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru."
5. Kemendagri (2020). "Pedoman bagi Kecamatan/PTPD untuk Memfasilitasi Desa Merevisi Anggaran Desa."
6. Bappenas (2020). "Buku Pegangan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)."
7. Kemendesa PDTT (2020). "Buku Pegangan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Desa."
8. Kemendesa PDTT (2020). "Buku Pedoman Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Desa."

digunakan oleh semua kabupaten di tujuh provinsi sasaran KOMPAK (menjangkau lebih dari 95 juta orang) dan dapat diakses oleh semua pemerintah daerah di Indonesia.

Untuk perempuan dan kelompok rentan, KOMPAK dan mitranya telah melakukan empat studi komprehensif untuk memberikan data dan membantu respons pemerintah.⁶ Studi yang didukung oleh KOMPAK menggarisbawahi bagaimana pandemi memperdalam ketimpangan yang sudah ada sebelumnya, dan berdampak secara tidak proporsional pada perempuan dan kelompok rentan. Studi ini mendukung advokasi KOMPAK untuk memperluas definisi kerentanan, meningkatkan penjangkauan program perlindungan sosial ke kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus menunjukkan pentingnya proses pengumpulan dan verifikasi data berbasis masyarakat.

IO 2: Lembaga Pemerintah Indonesia terkait meningkatkan kebijakan pengelolaan transfer fiskal dan keuangan publik

Untuk mendanai rencana penanggulangan COVID-19 pemerintah, dibutuhkan penyesuaian anggaran dan mekanisme transfer fiskal. Seluruh 24 kabupaten termasuk 100% desa wilayah kerja KOMPAK telah merevisi anggarannya untuk upaya penanganan pandemi. KOMPAK menitikberatkan dukungannya pada enam dari sepuluh alokasi dana daerah, yang meliputi 38% dari transfer ke daerah (Rp288 triliun/\$30 miliar).⁷ KOMPAK membantu Kementerian Keuangan meninjau formula alokasi dan indikator untuk Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) serta Dana Insentif Daerah (DID), yang kemudian menghasilkan pedoman bagi pemerintah kabupaten agar dapat menggunakan dana penanggulangan pandemi dengan lebih bijaksana.

Untuk memperbarui mekanisme transfer fiskal Indonesia dalam jangka panjang, KOMPAK terus

6 Studi yang dilakukan dengan dukungan KOMPAK:

1. Bappenas, PUSKAPA, KOMPAK, dan UNICEF (2020). "Berkejaran dengan Waktu: Catatan Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak COVID-19 pada Anak dan Kelompok Rentan"
2. Bappenas, DPO, AIPI, MAHKOTA, dan KOMPAK (2020). "Laporan Rapid Assessment Dampak COVID-19 Bagi Penyandang Disabilitas: Mereka yang Tergerak dan Terpapar Selama Pandemi, Suara Disabilitas di Indonesia"
3. KOMPAK, MAHKOTA, dan BaKTI (2020). "Penguatan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Bangsa Papua."
4. Bappenas, PUSKAPA, dan KOMPAK (2020). "Lembaga Kuat, Komunitas Tangguh: Kajian Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil Pelayanan Dasar PASH, Pendidikan dan Kesehatan. Studi di Daerah Terpilih di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan."

7 Lihat bagian PFM laporan ini untuk detail lebih lanjut

memberikan masukan kepada pemerintah mengenai penggunaan dan masa depan Dana Otonomi Khusus (Otsus), implementasi insentif berbasis kinerja desa secara nasional, dan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam rencana kerja kabupaten. Hal ini didasarkan pada hasil kerja KOMPAK selama enam tahun terakhir, sekaligus mempersiapkan pemerintah untuk kelancaran transisi dukungan seiring selesainya program KOMPAK pada pertengahan 2022.

IO 3: Pemerintah daerah dan unit layanan memperkuat sistem, proses, dan prosedur

Pandemi COVID-19 menambah beban pemerintah daerah dan unit layanan. Namun di sisi lain mampu mendorong laju pembaruan dan mengangkat manfaat pendekatan KOMPAK. KOMPAK telah menguji coba model layanan adminduk, dimana para fasilitator Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) secara aktif mengidentifikasi dan membantu masyarakat memperoleh dokumen yang dibutuhkan, seperti akta kelahiran. Model ini terbukti penting bagi upaya penanggulangan COVID-19 dalam menentukan sasaran dan menyalurkan program perlindungan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas kompilasi data untuk sistem informasi desa.

Walaupun masih terdapat tantangan pada kualitas dan integrasi data masyarakat miskin dan rentan, KOMPAK membantu menghubungkan sistem informasi desa dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah dan menerapkan prosedur validasi dan verifikasi data berbasis komunitas yang lebih kuat. Hal ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi program perlindungan sosial, sehingga bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat yang tepat sekaligus mengurangi terjadinya duplikasi atau salah sasaran.

Peran pemerintah kecamatan juga semakin besar dalam membantu pemerintah desa menerapkan kebijakan nasional dan kabupaten serta mengoordinasikan upaya penanggulangan. KOMPAK memprioritaskan penguatan kecamatan dan mendorong PTPD memberikan dukungan teknis kepada desa. Strategi ini terbukti efektif, terlihat dari hampir seluruh desa (98%) di lokasi KOMPAK telah menerima asistensi kecamatan untuk mendukung perencanaan dan penanggulangan COVID-19. Seperti dukungan bagi penyelenggaraan Musdes Khusus untuk menyeleksi penerima BLT-Dana Desa sekaligus mengawasi pendataan kelompok miskin dan rentan serta pendistribusian bantuan langsung tunai di lebih dari 90% desa.

KOMPAK memberikan bantuan khusus kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam hal koordinasi respons. Bantuan ini termasuk penyusunan, distribusi, dan sosialisasi berbagai pedoman untuk pemerintah desa tentang pencegahan dan respons COVID-19, yang disesuaikan dengan situasi unik di wilayah Papua dan diterbitkan dalam bahasa lokal. Bantuan juga diberikan untuk membantu mengarahkan kembali Dana Otsus, menyusun rencana dan anggaran respons COVID-19 provinsi, dan menyesuaikan program pembangunan yang ada (Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) dan Distrik Membangun, Membangun Distrik (DMMD) untuk mendukung respons COVID-19.⁸

IO 4: Masyarakat dan lembaga di tingkat masyarakat secara efektif bekerja sama dengan pemerintah daerah dan unit layanan

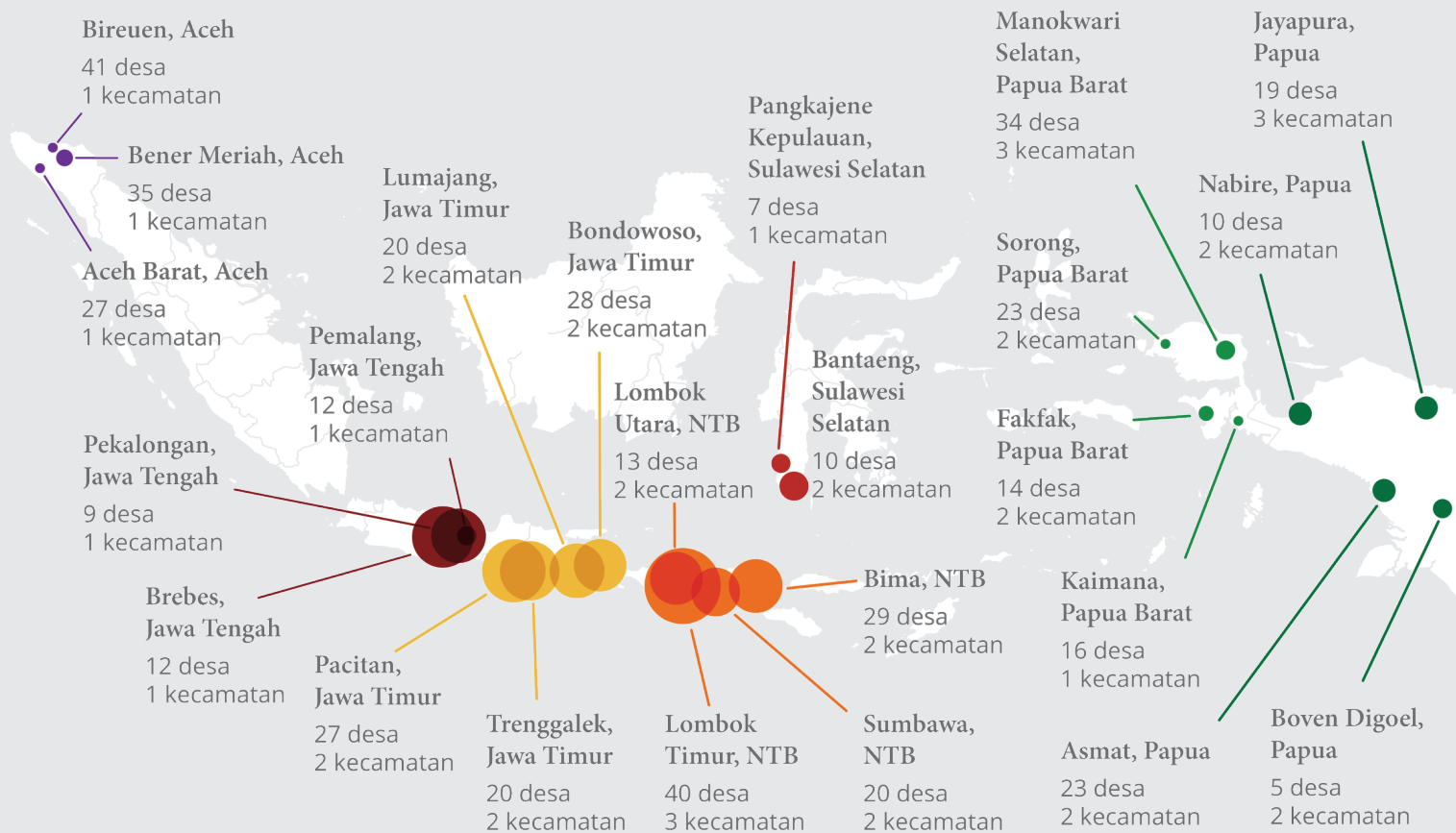
Pemerintah desa telah menggunakan Dana Desa untuk menyalurkan BLT-Dana Desa, mendistribusikan informasi tentang kesehatan dan menjaga jarak, serta mengawal respons COVID-19. Untuk memenuhi tuntutan ini secara efektif, KOMPAK mempromosikan pendekatan berbasis masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dukungan kepada pemerintah desa untuk memberikan layanan dan menyiapkan sistem yang menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

Untuk mencapai hal ini, mekanisme utamanya ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kuat. KOMPAK memberikan dukungan berupa pedoman, pelatihan, dan mekanisme akuntabilitas sosial guna memberikan keterampilan, wewenang, serta perangkat bagi BPD dan masyarakat untuk mengawasi dan memberi masukan bagi kegiatan respons. Hal ini termasuk memperluas mekanisme umpan balik masyarakat, membentuk Musdes Khusus untuk mengidentifikasi penerima manfaat BLT-Dana Desa, dan memanfaatkan kelompok perempuan untuk mendukung Gugus Tugas COVID-19 Desa demi terselenggaranya respons yang lebih inklusif. KOMPAK juga bermitra dengan program dan lembaga lain (seperti MAHKOTA, PEKKA, dan AIPJ2) untuk memperkuat pemahaman tentang dampak COVID-19 terhadap gender dan inklusi sosial, khususnya pada perempuan dan penyandang disabilitas.

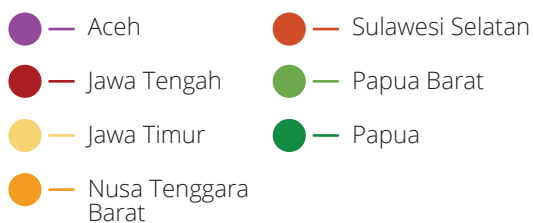
8 Provinsi Papua (2020). *"Rencana Aksi COVID19- Papua"*

LOKASI KERJA KOMPAK:

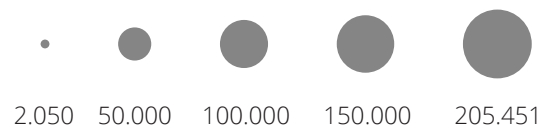
7 Provinsi, 24 Kabupaten, 41 Kecamatan, 496 Desa



Provinsi



Populasi desa wilayah kerja KOMPAK (berdasarkan data desa)



IKHTISAR KINERJA KOMPAK

Hasil dalam laporan ini disajikan berdasarkan laporan program dan mitra, survei KOMPAK, tinjauan kinerja, dan data sekunder.

Survei desa dan kabupaten

Pada bulan Desember 2020, KOMPAK melakukan survei desa dan kecamatan di seluruh lokasi sasaran. Survei dilakukan oleh staf monitoring and evaluation KOMPAK dengan menghubungi atau mengunjungi perwakilan desa dan mengumpulkan data menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status permasalahan tertentu, guna melihat apakah KOMPAK turut berkontribusi pada penyelesaiannya. Survei memberikan informasi bagi KOMPAK untuk menetapkan target dan menilai progres intervensi dengan lebih baik.

	Target	Data Terkumpul	Tingkat Respons
Survei Kabupaten	24	23	96%
Survei Kecamatan	41	41	100%
Survei Desa	496	484	98%

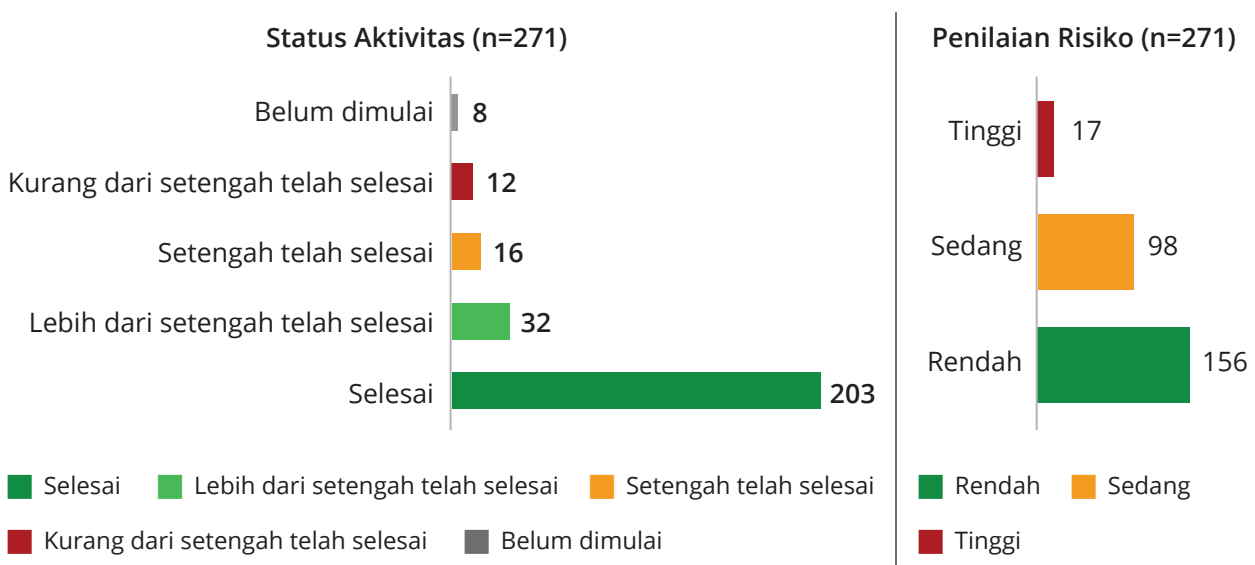
Data jumlah desa di Aceh telah diperbarui dari 18 desa menjadi 103 desa, sesuai dengan lokasi Program KOMPAK lainnya, di mana semua desa tersebut berada di kecamatan dampingan KOMPAK.

Tinjauan kinerja

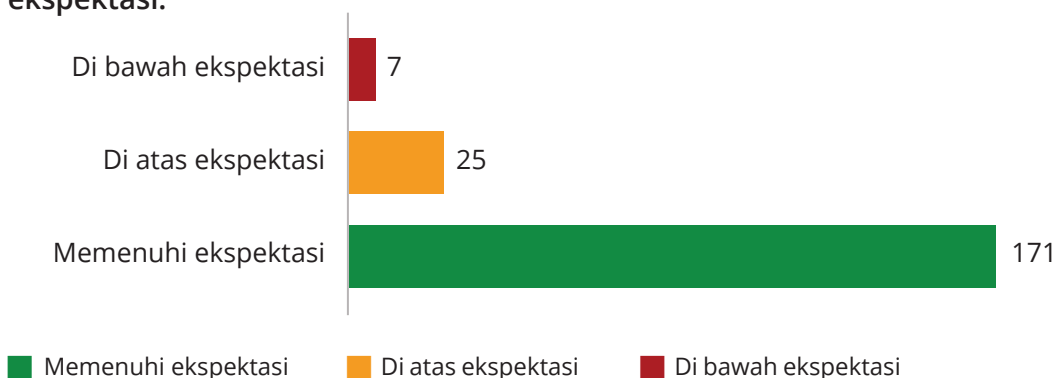
KOMPAK juga menyelesaikan tinjauan kinerja kegiatan unggulan dan tim provinsi pada Januari 2021. Tinjauan ini memberikan kesempatan bagi tim untuk menilai kemajuan Rencana Kerja Tahunan (yang disesuaikan dengan situasi COVID-19), mengidentifikasi risiko, berbagi pembelajaran, dan mendiskusikan prioritas berikutnya.

Revisi Rencana Kerja Tahunan mencakup 278 kegiatan, masing-masing terkait dengan kegiatan unggulan dan wilayah (baik provinsi maupun pusat). Setiap bagian dari laporan ini memuat ringkasan tinjauan kinerja di bagian 'Kemajuan dan Tantangan'. Untuk setiap kegiatan, tim memberi nilai tingkat kemajuan (Selesai/Lebih dari setengah telah selesai/Setengah telah selesai/Kurang dari setengah telah selesai/Belum dimulai), risiko (Rendah/Sedang/Tinggi), serta kualitas kegiatan yang telah selesai (Memenuhi/Melebihi/Di bawah ekspektasi). Rangkuman untuk KOMPAK secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Status Kegiatan dan Penilaian Risiko per Desember 2020:



Dari 203 kegiatan yang telah selesai, 196 kegiatan telah memenuhi atau melebihi ekspektasi:

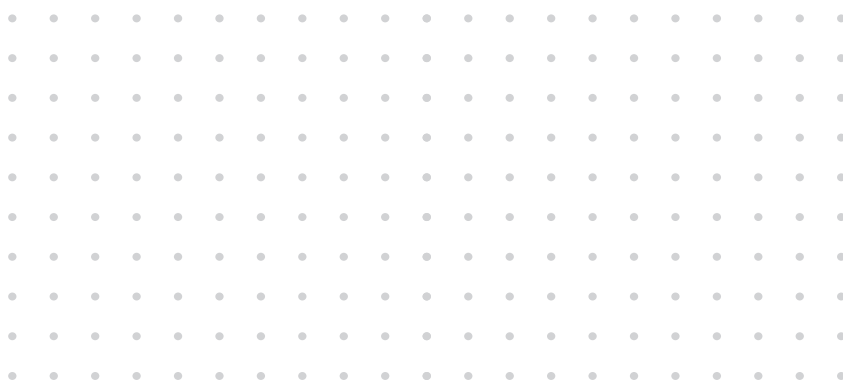


KOLABORASI MITRA

KOMPAK tidak melaksanakan kegiatannya secara terpisah. KOMPAK bersandar pada kemitraan dan jaringan yang kuat dengan pemerintah pusat dan daerah, mitra pelaksana, fasilitas lain yang didanai DFAT, lembaga penelitian dan multilateral, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Para mitra ini memungkinkan KOMPAK memanfaatkan keahlian dan sumber daya untuk memperkuat kualitas dan jangkauan kegiatan.

Mitra Pelaksana Utama Kegiatan KOMPAK

MITRA	AREA KOLABORASI
PUSKAPA	Kegiatan PASH di tingkat nasional dan daerah.
BaKTI	Implementasi Program LANDASAN di Papua dan Papua Barat.
Seknas FITRA	Desain dan implementasi model akuntabilitas sosial, antara lain Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Mekanisme Aspirasi Masyarakat (Posko Aspirasi).
PEKKA	Desain dan implementasi model akuntabilitas sosial, khususnya untuk pemberdayaan dan partisipasi perempuan. Dihentikan secara bertahap pada Juli 2020.



Mitra DFAT dan Bidang Kerja Sama

MITRA	AREA KOLABORASI
TN2PK	<p>Kerja sama advokasi kebijakan kinerja desa.</p> <p>Penyusunan Catatan Kebijakan untuk memperkuat peran BUMDES dalam pengembangan ekonomi daerah.</p>
Bank Dunia	<p>Menyusun ringkasan kebijakan bersama tentang implementasi Undang-Undang Desa.</p> <p>Kerja sama dalam penyempurnaan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).</p> <p>Kolaborasi persiapan pelaksanaan program P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) sebagai pelembagaan dan inklusi pembelajaran dari Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) yang dirintis oleh KOMPAK.</p> <p>Kolaborasi penyusunan kerangka Sistem Manajemen Pembelajaran sebagai komponen P3PD.</p> <p>Kolaborasi untuk mendukung Kemendagri dalam persiapan program penguatan kecamatan.</p> <p>Fasilitasi ToT E-DMC (<i>Training of trainer Electronic</i>-Desa Melawan COVID) di wilayah KOMPAK (250 desa)</p> <p>Input penggunaan data Sistem Informasi Desa (SID) untuk perencanaan pembangunan desa.</p> <p>Kerja sama penyusunan pedoman akuntabilitas sosial dengan Kemendesa PDTT.</p>

MITRA	AREA KOLABORASI
MAMPU	<p>Penyusunan dan peluncuran Pedoman Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa.</p> <p>Kerja sama sosialisasi BLT-Dana Desa dan survei rumah tangga.</p> <p>Mengidentifikasi peluang ekonomi bagi perempuan penerima manfaat Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan (MAMPU) selama tahap awal pandemi.</p> <p>Memberikan masukan untuk pengembangan studi kerentanan PASH.</p>
MAHKOTA	<p>Bekerja sama dalam merancang Program Kewirausahaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos).</p> <p>Program hibah Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA) untuk anak di Papua.</p> <p>Kerja sama kajian dampak sosial COVID-19 kepada penyandang disabilitas.</p> <p>Kajian GESI BANGGA Papua – analisis pelaksanaan prinsip-prinsip GESI dalam program BANGGA Papua.</p>
PEDULI	<p>Memberikan masukan untuk pengembangan studi kerentanan PASH.</p> <p>Kerja sama kajian dampak sosial COVID-19 terhadap penyandang disabilitas.</p>
PRISMA	<p>Bekerja sama dalam proyek penggemukan sapi di Bener Meriah—dibatalkan pada awal tahun 2020 karena pandemi.</p>
AIPJ	<p>Kerja sama kajian dampak sosial COVID-19 terhadap penyandang disabilitas.</p>

MITRA	AREA KOLABORASI
-------	-----------------

Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas

Kerja sama kajian dampak sosial COVID-19 terhadap penyandang disabilitas.

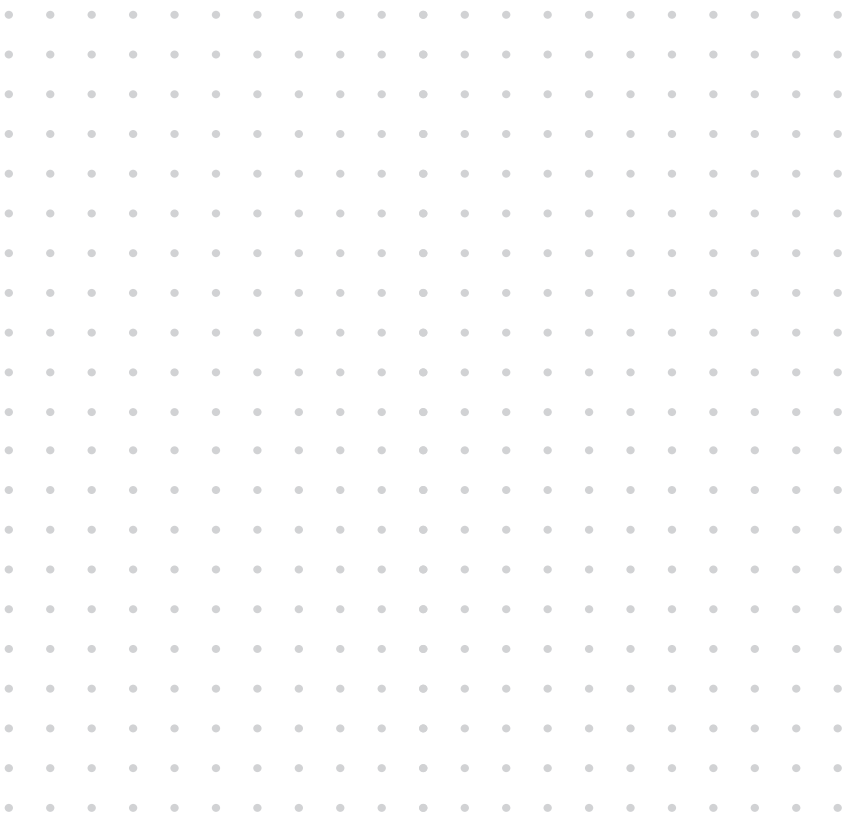
SIAP SIAGA	KERJA SAMA
------------	------------

SIAP SIAGA

Kerja sama penanganan COVID-19 di desa dan kelurahan.

UNICEF

Bermitra untuk menyusun catatan kebijakan *"Race Against Time"*.
Memberikan masukan teknis untuk Bappenas dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional PASH.





Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan Keuangan Publik

Prioritas COVID-19: Pemerintah daerah merevisi anggaran untuk merespons COVID-19.

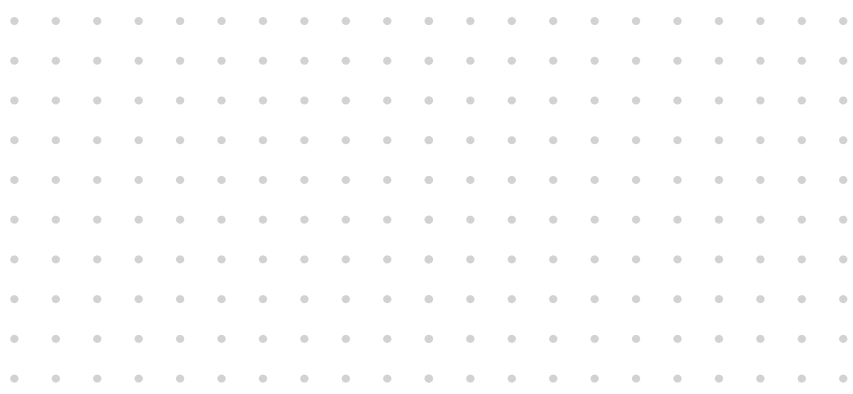
RINGKASAN PENCAPAIAN

Konsekuensi yang tidak diharapkan dari respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19 adalah terbitnya banyak peraturan yang kompleks dan tumpang tindih. Sepanjang tahun, alokasi dana untuk merespons pandemi menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, KOMPAK memfokuskan upayanya dalam membantu kabupaten menentukan arah dalam ruang regulasi ini.

KOMPAK merangkul peraturan baru yang diterbitkan Kemendagri dan Kemenkeu serta memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten untuk mempersiapkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam merespons pandemi COVID-19. Hasilnya, ke-24 kabupaten ini telah mengajukan revisi anggaran dan mengalokasikan dana untuk merespons pandemi.

ANALISIS SITUASI

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan tanggung jawab tambahan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Sepanjang tahun, pemerintah kabupaten dan desa perlu mendanai dan mengelola program baru bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin dan rentan sekaligus mengawasi berbagai



inisiatif kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat juga perlu diadaptasi dengan situasi yang terus berubah ini agar pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam kegiatan penanganannya dengan sumberdaya yang memadai. Pemerintah juga lebih menekankan pada penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas transfer ke daerah.

Selama lebih dari lima tahun, KOMPAK telah bekerja membantu pemerintah pusat untuk memperkuat kebijakan transfer fiskal serta mendukung pemerintah kabupaten dan desa untuk memperbaiki kualitas belanja mereka. Pekerjaan KOMPAK di tingkat nasional dan daerah menempatkan KOMPAK pada posisi yang strategis untuk membentuk kebijakan nasional dan membantu pemerintah daerah mengimplementasikannya.

Di tingkat nasional, KOMPAK mendukung Kemenkeu dalam meningkatkan kebijakan dan alokasi dana bagi pemerintah daerah. Sasarannya adalah penanganan COVID-19 dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, serta Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH), melalui penggunaan transfer fiskal yang efektif (Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus). Hal ini telah diidentifikasi sebagai daya dorong strategis yang paling relevan untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar.

Di tingkat daerah, KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan instrumen keuangan publik guna meningkatkan belanja daerah dan kinerja penyediaan layanan dasar. Instrumen-instrumen ini mencakup perangkat lunak analisis dan perencanaan kemiskinan (dikenal sebagai SEPAKAT), analisis pengeluaran tingkat kabupaten, dan standar pelayanan minimum (SPM). KOMPAK juga mendukung Kemenkeu untuk meluncurkan insentif baru berbasis kinerja untuk desa berdasarkan uji coba di lokasi terpilih.

KEMAJUAN DAN TANTANGAN



1,04 juta dolar Australia

Total pengeluaran program sepanjang Januari–Desember 2020 (dari anggaran tahunan \$1,17 juta dolar Australia)



89%

Tingkat pengeluaran (pengeluaran/anggaran) untuk Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020



94%

Kegiatan dalam Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020 yang telah selesai



99%

Kegiatan yang telah selesai dan memenuhi atau melebihi ekspektasi

FOKUS	AKTIVITAS	STATUS	RISIKO PERTENGAHAN TAHUN
Nasional	Melakukan tinjauan berkelanjutan terhadap kebijakan perencanaan ⁹ dan penganggaran pemerintah terkait COVID serta memberikan panduan kepada pemerintah kabupaten tentang kepatuhan.	Selesai	●
	Menyusun pedoman bersama Kemendagri bagi pemerintah kabupaten mengenai cara memfokuskan ulang APBD dan rencana kerja dalam RKPD untuk penanganan COVID-19.	Selesai	●
	Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas untuk meninjau perumusan dan implementasi DAK fisik untuk mengadopsi pembelajaran dalam penanganan COVID-19.	Selesai	●
Daerah	Memberikan bantuan teknis—termasuk lokakarya dan dukungan saat pelaksanaan—kepada pemerintah kabupaten untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Merevisi APBD untuk penanganan COVID-19, termasuk relokasi dana transfer fiskal¹⁰ dan revisi alokasi SPM; • Menyusun prosedur operasi standar (SOP) kabupaten tentang anggaran untuk penanganan COVID-19; dan • Merevisi dokumen perencanaan daerah dalam RKPD 2020 dan menyusun RKPD 2021 yang memasukkan penanganan COVID-19 serta target SPM. 	Selesai (luar Papua) Lebih dari setengah telah selesai (Papua)	●
	Memberikan masukan teknis untuk merevisi Strategi Komunikasi BANGGA Papua dan materi-materi untuk penanganan COVID-19.	Selesai	●

9 Termasuk SPM, instrumen transfer fiskal (DAK fisik dan non-fisik, DID) dan dokumen perencanaan (RKPD dan lain-lain).

10 DAK fisik dan non-fisik, DID

Rencana kerja KOMPAK tahun 2020 mengidentifikasi empat tujuan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Sepanjang tahun 2020, KOMPAK telah memberikan penekanan yang lebih besar pada pencapaian tujuan utama ini sambil tetap mendukung pemerintah daerah untuk merespons pandemi secara efektif.

Tujuan utama yang pertama adalah memperkuat kapasitas provinsi dan kabupaten dalam menggunakan sistem dan analisis Pengelolaan Keuangan Publik untuk perencanaan dan penganggaran. Tujuan ini selaras dengan hasil utama dalam revisi Rencana Kerja Tahunan untuk penanganan COVID-19. Secara khusus, fokusnya adalah mengamankan anggaran daerah, yaitu APBD dan APBDesa, untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan pendataan masyarakat rentan yang terdampak pandemi.

Tujuan kedua adalah meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengakses dan menggunakan dana dari pemerintah pusat untuk mendukung pemberian layanan. Hingga saat ini, dana tersebut masih menjadi sumber pendanaan yang penting dan fleksibel bagi pemerintah kabupaten.

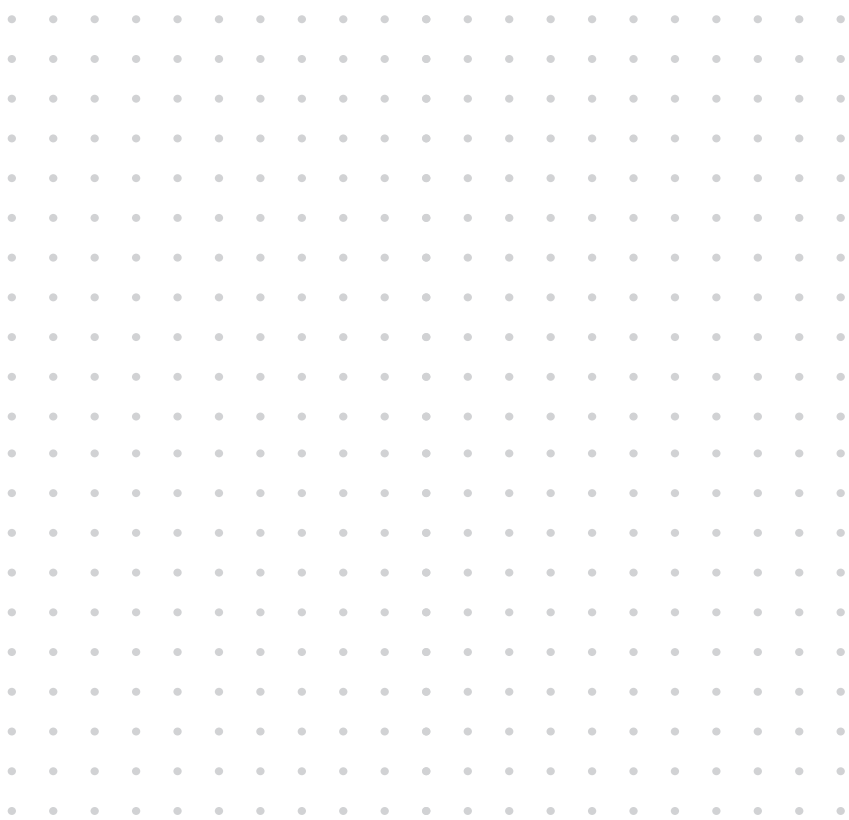
Tujuan ketiga adalah memperkuat kapasitas provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Di wilayah Papua, KOMPAK memberikan dukungan tambahan dalam penggunaan Dana Otsus untuk penanganan COVID-19. Di samping itu, reformasi Dana Otsus juga tengah dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi yang diselesaikan pada 2018 dan 2019, termasuk mempersiapkan ketiga provinsi ini mengoptimalkan potensi fase pendanaan Otsus yang selanjutnya hingga tahun 2030. KOMPAK juga mengadaptasi dukungannya ke BANGGA Papua - program bantuan tunai untuk perlindungan sosial di Provinsi Papua - untuk meningkatkan sosialisasi tentang COVID-19.

Sementara tujuan utama yang keempat adalah mendukung kelembagaan model pendanaan insentif berbasis kinerja untuk desa. Karena pandemi, pemerintah pusat menunda peluncuran inisiatif ini; meskipun demikian, KOMPAK terus melanjutkan uji coba di tingkat kabupaten serta memberikan bantuan teknis kepada Kemenkeu.

COVID-19: Mendukung pemerintah daerah merevisi anggaran penanganan COVID-19

Di awal tahun 2020, KOMPAK membantu Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas untuk menganalisis dan mengonsolidasikan kebijakan terkait rencana dan anggaran penanganan COVID-19. Kolaborasi ini kemudian mendorong terbitnya pedoman yang disederhanakan tentang cara yang harus dilakukan pemerintah kabupaten dan desa untuk memfokuskan kembali anggaran APBD dan APB Desa, termasuk rencana kerja (RKPD) untuk penanganan COVID-19.

Selanjutnya, KOMPAK mengadakan serangkaian sosialisasi dan pelatihan untuk membahas pedoman tersebut. Berdasarkan pengalaman KOMPAK, pemerintah kabupaten dan desa kemungkinan masih memerlukan pendampingan agar bisa melaksanakan pedoman yang diterbitkan di tingkat nasional ini. Dimulai bulan Maret 2020, sebanyak 1.674 pejabat pemerintah menerima pendampingan atau menjadi peserta pelatihan serta webinar yang diselenggarakan KOMPAK dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan COVID-19 dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam kegiatan ini, pejabat dari semua tingkat pemerintahan berkesempatan untuk mendengarkan dan berinteraksi langsung dengan pejabat kementerian. Berkat fasilitasi KOMPAK, pedoman ini dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh petugas pelaksana.



Pedoman dan kebijakan yang disusun dengan bantuan KOMPAK



Update Transfer Daerah dan Dana Desa untuk Respons dan Penanganan COVID-19

Dokumen ini merangkum peraturan tentang revisi anggaran kabupaten dan desa (APBD/APB Desa) untuk penanganan COVID-19. Dalam dokumen ini dibahas bimbingan teknis tentang prosedur, mata anggaran, dan alokasi untuk pemerintah daerah.

Diterbitkan: **Mei 2020**



Buku Pedoman Penggunaan Anggaran Desa untuk Penanganan COVID-19 di Desa

Dokumen ini menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini telah disesuaikan guna membantu pemerintah desa dan Gugus Tugas Desa mengalokasikan ulang anggaran untuk penanganan COVID-19.

Diterbitkan: **April 2020**



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri ini merupakan panduan bagi pemerintah kabupaten terkait cara memfokuskan kembali Rencana Kerja Tahunan untuk menangani COVID-19.

Diterbitkan: **Juli 2020**

Sebagai hasil dari program kerja sama ini, semua kabupaten di wilayah kerja KOMPAK berhasil menyerahkan anggaran dan rencana kerja yang telah direvisi tepat waktu. Selain itu, semua kabupaten juga telah mengalokasikan revisi dana APBD untuk membantu penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan Kemendagri dan Kemenkeu.

Status APBD Kabupaten dan Rencana Kerja Revisi COVID-19 sebagai Respons COVID-19

Warna **HIJAU** menunjukkan yang telah selesai

PROVINSI	KABUPATEN	APBD diubah sebagai respons terhadap COVID-19?	RKPD 2020 diubah dalam respons COVID-19?	RKPD 2021 diubah dalam respons COVID-19?
Aceh	Aceh Barat	●	●	●
	Bener Meriah	●	●	●
	Bireuen	●	●	●
Jawa Tengah	Brebes	●	●	●
	Pekalongan	●	●	●
	Pemalang	●	●	●
Jawa Timur	Bondowoso	●	●	●
	Lumajang	●	●	●
	Pacitan	●	●	●
	Trenggalek	●	●	●
Nusa Tenggara Barat	Bima	●	●	●
	Lombok Timur	●	●	●
	Lombok Utara	●	●	●
	Sumbawa	●	●	●
Sulawesi Selatan	Bantaeng	●	●	●
	Pangkajene dan Kepulauan	●	●	●

PROVINSI	KABUPATEN	APBD diubah sebagai respons terhadap COVID-19?	RKPD 2020 diubah dalam respons COVID-19?	RKPD 2021 diubah dalam respons COVID-19?
Papua	Asmat	●	●	●
	Boven Digoel	●	●	●
	Jayapura	●	●	●
	Nabire	●	●	●
Papua Barat	Fakfak	●	●	●
	Kaimana	●	●	●
	Manokwari Selatan	●	●	●
	Sorong	●	●	●
Total Keseluruhan		24	14	16

*Papua dan Papua Barat tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan RKPD, sehingga menjawab "Tidak".



1.1 Memperkuat Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam Menggunakan Sistem Analisis Pengelolaan Keuangan Publik untuk Perencanaan dan Penganggaran (SEPAKAT, Standar Pelayanan Minimal [SPM], dan Analisis Kendala)

Selama tujuh tahun terakhir, KOMPAK telah mengembangkan dan merintis pendekatan untuk membekali pemerintah kabupaten dengan sistem dan informasi agar bisa lebih efektif dalam merencanakan dan menganggarkan program pembangunan serta mencapai tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar. Untuk menilai efektivitas pendekatan ini, KOMPAK melakukan studi tentang dampak sistem *public financial management*/PFM (pengelolaan keuangan publik) pada layanan dasar dan indikator pembangunan dari tahun 2015 hingga 2019, serta pada 2020 untuk menilai dampak COVID-19. Temuan ini akan diterbitkan pada pertengahan 2021.

Temuan awal meliputi:

- Pada periode 2015–2019, kabupaten dampingan KOMPAK rata-rata menunjukkan kemajuan yang relatif lebih baik dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) daripada kabupaten pembanding, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Namun, berbagai upaya masih perlu dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan gender (IPG).
- Meskipun rata-rata skor IPM di kabupaten dampingan KOMPAK sudah lebih baik daripada kedua kelompok pembanding, komponen IPM terkait pendidikan di kabupaten masih perlu mendapat perhatian.
- Dalam jangka pendek, fokus peningkatan komponen pendidikan dapat diarahkan pada perbaikan angka harapan lama sekolah (HLS), terutama bagi perempuan.
- Di sisi lain, komponen indikator pelayanan kesehatan di kabupaten dampingan KOMPAK menunjukkan kemajuan yang lebih baik daripada kedua kelompok pembanding, dan juga tingkat kemajuan yang cukup baik untuk kelompok perempuan.

KOMPAK mendukung tiga inisiatif utama: Sistem Analisis Kemiskinan SEPAKAT, penggunaan Standar Pelayanan Minimum untuk layanan dasar, dan Analisis Kendala Anggaran Daerah.

SEPAKAT

SEPAKAT merupakan perangkat lunak analisis kemiskinan yang dikembangkan oleh Bappenas, Bank Dunia, dan KOMPAK. Sistem ini memberikan akses data dan analitik kepada kabupaten untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran termasuk memantau kemajuan pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan. SEPAKAT mengintegrasikan himpunan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), sensus nasional, pendataan Potensi Desa (PODES), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

SEPAKAT bisa digunakan lebih optimal, khususnya untuk merencanakan penanganan COVID-19, jika himpunan data yang menjadi andalan sistem ini ditingkatkan kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktunya. Berdasarkan survei kabupaten, 10 dari 24 kabupaten dampingan KOMPAK yang menggunakan SEPAKAT memberikan skor yang memuaskan, yaitu 4,4 dari skala 5 (untuk detailnya, lihat tabel di bawah). Namun, kesenjangan tetap ditemukan pada data kelompok masyarakat miskin dan rentan, angka pengangguran serta peluang bisnis, terutama jika informasi ini dibutuhkan dalam waktu singkat (*hampir real-time*).

Pada 2020, KOMPAK telah menyusun tiga pedoman, yaitu Pedoman Pengantar, Panduan Pengguna, dan Pedoman Teknis Penggunaan SEPAKAT, untuk menunjukkan kegunaan SEPAKAT bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

Lewat kerja sama dengan Bappenas, KOMPAK juga mengadakan pelatihan daring SEPAKAT kepada petugas dari 5 provinsi, 44 kabupaten, dan 9 kota.

Pada saat penulisan laporan ini, Bappenas tengah mengambil langkah-langkah konstruktif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang SEPAKAT dengan:

1. Membentuk sekretariat untuk mengawasi pelaksanaan SEPAKAT;
2. Memiliki server untuk kebutuhan data sistem;
3. Menyediakan staf tetap untuk memelihara dan menjalankan sistem tersebut.

Dengan mengombinasikannya ke pedoman yang disusun pada tahun 2020, langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan kegunaan sistem tersebut oleh pemerintah daerah.

Jurus Jitu Kabupaten Pekalongan Tekan Angka Kemiskinan

Banjir rob kerap menjadi mimpi buruk bagi Timbul Trijaya dan keluarganya. Saat air laut tumpah menggenangi Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, rumah sangat sederhana milik Timbul bisa terendam sehari-hari dengan ketinggian air mencapai 50.

Namun mimpi buruk itu tak pernah terulang lagi. Pada 2019, keluarga Timbul menerima bantuan rehabilitasi 'Rumah Tidak Layak Huni' (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Selain tidak lagi tergenang, rumah Timbul kini juga memiliki fasilitas untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK) sendiri.

Sementara itu, perajin gula aren di Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, terus berbangga hati. Harga gula aren yang mereka produksi sebelumnya hanya Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, tetapi kini terdongkrak menjadi Rp20.000. Para pengrajin tersebut mendapatkan pelatihan untuk bisa membuat berbagai jenis variasi gula aren, seperti gula aren rasa jahe. Diyono, Ketua KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dari Perajin Gula Aren Lestari (Pagar) menjelaskan bahwa mereka diajari cara mengemas gula aren agar bisa punya merek sendiri, yaitu Gula Aren Sarang Semut. Jadi, harga jualnya bisa lebih tinggi.

Program pendampingan RTLH dan pelatihan pengrajin gula aren hanyalah sebagian kecil dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang lahir dari Laboratorium Kemiskinan, yang merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Program ini diperkenalkan pada 2018 dengan melibatkan kerja sama lintas sektor. Inovasi ini bahkan telah diuji di tiga desa tertinggal, yaitu Botosari, Kertijaya, dan Mulyorejo.

Semua inovasi ini menggunakan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu). Aplikasi yang dikembangkan oleh Bappenas, Bank Dunia, dan KOMPAK ini memiliki fitur-fitur yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan. Dengan aplikasi SEPAKAT, pemerintah daerah dapat menganalisis kemiskinan hingga ke tingkat mikro, serta mengevaluasi permasalahan kemiskinan secara terpadu dan akurat. "KOMPAK memperkenalkan dan memberikan pelatihan SEPAKAT untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jelas Didin Nasruddin, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA Litbang Kabupaten Pekalongan. "Kami mempelajari cara kerja SEPAKAT untuk menemukan masalah dan menentukan prioritas, serta mencari solusi pengentasan orang miskin yang sesuai di daerah kita."

Selama lebih dari dua tahun, beberapa indikator menunjukkan inovasi Laboratorium Kemiskinan mampu menekan angka kemiskinan di tiga desa sasaran. Misalnya, jumlah rumah tangga miskin turun dari 1.425 menjadi 1.120. Inovasi ini juga mampu mengurangi jumlah RTLH dari 348 menjadi 86, serta tingkat kemiskinan di beberapa indikator lainnya.

Kemajuan Laboratorium Kemiskinan berhasil mengantarkan Kabupaten Pekalongan meraih Top 45 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2020. Menurut Nasruddin, pada tahun 2021, Laboratorium Kemiskinan akan diperluas hingga ke enam desa dengan program seperti pelatihan kerja dan pemberian bantuan kerja, peningkatan RTLH, MCK, penyediaan air bersih, pelayanan bagi anak yang tidak bersekolah, dan penanganan individu penyandang disabilitas.

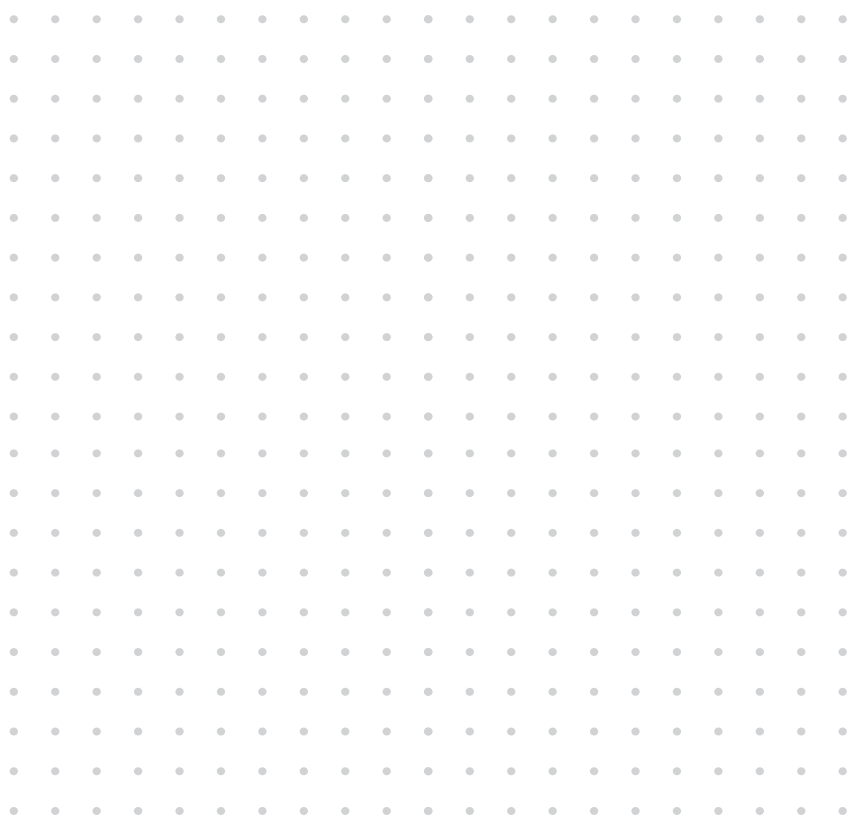
Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan pada 2006 oleh Kemendagri berisi 65 target kualitas layanan dasar untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten, seperti cakupan imunisasi atau tolok ukur pendaftaran sekolah. SPM adalah tujuan jangka panjang bagi KOMPAK dan Pemerintah Indonesia.

Meskipun COVID-19 menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian SPM, KOMPAK menunjukkan perkembangan dalam mempercepat pelaksanaan SPM:

1. Memfasilitasi serangkaian diskusi antara Kemendagri dan Bappenas tentang pengalaman pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM.
2. Menyiapkan panduan untuk integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Patut dicatat bahwa pedoman ini telah disetujui oleh Kemendagri untuk digunakan oleh pemerintah daerah.
3. Menyiapkan panduan lewat konsultasi dengan Kemendagri dan Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPM oleh pemerintah daerah.
4. Memberikan bantuan teknis kepada beberapa kabupaten dampingan KOMPAK untuk menghitung kebutuhan anggaran pemenuhan SPM (Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh).

KOMPAK melanjutkan kolaborasi dengan Kemendagri, Bappenas, dan pemerintah kabupaten untuk mengintegrasikan SPM dalam rencana kerja kabupaten melalui RKPD. Integrasi SPM ini telah dilembagakan melalui peraturan Kemendagri sehingga pada tahun 2020, kabupaten akan melaporkan indikator SPM sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dua puluh kabupaten dampingan KOMPAK telah mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 serta dalam penyusunan proposal untuk mendapatkanmendapat Dana Alokasi Khusus tahun 2021.



Provinsi	Kabupaten	SEPAKAT tersedia	SEPAKAT digunakan Kabupaten (jumlah dokumen)	Tingkat manfaat
Aceh	Aceh Barat	●	● 1	● Berguna
	Bener Meriah	●	●	●
	Bireuen	●	● 2	● Sangat Berguna
Jawa Tengah	Brebes	●	●	●
	Pekalongan	●	● 5	● Sangat Berguna
	Pemalang	●	●	●
Jawa Timur	Bondowoso	●	● 2	● Netral
	Lumajang	●	●	●
	Pacitan	●	● 3	● Netral
	Trenggalek	●	● 6	● Sangat Berguna
Nusa Tenggara Barat	Bima	●	●	●
	Lombok Timur	●	●	●
	Lombok Utara	●	● 3	● Sangat Berguna
	Sumbawa	●	● 6	● Berguna
Sulawesi Selatan	Bantaeng	●	● 1	● Sangat Berguna
	Pangkajene dan Kepulauan	●	● 1	● Sangat Berguna
Papua	Asmat	●	●	●
	Boven Digoel	●	●	●
	Jayapura	●	●	●
	Nabire	●	●	●
Papua Barat	Fakfak	●	●	●
	Manokwari Selatan	●	●	●
	Sorong	●	●	●
Jumlah kabupaten		10	7	4.4

● Ya ● Tidak

Sumber: Survei Kabupaten KOMPAK, Desember 2019.

1.2 Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk Mengakses dan Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non-Fisik, serta DID) untuk Mendukung Pemberian Layanan dan Pelembagaan Model KOMPAK

Sepanjang tahun 2020, KOMPAK memfokuskan upayanya pada dua bidang besar berikut:

Rekomendasi Kebijakan, merekomendasikan kepada Kemenkeu untuk meningkatkan desain dan formula alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan non-fisik) dan Dana Insentif Daerah (DID); dan

Peningkatan Kapasitas, melalui bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan sehingga dapat menyusun proposal yang lebih baik.

Rekomendasi Kebijakan

KOMPAK memberikan rekomendasi kepada Kemenkeu untuk mengkaji indikator dan formula alokasi DAK fisik dan non-fisik, serta DID. KOMPAK juga memberikan rekomendasi untuk memantau efektivitas dana tersebut. Secara khusus, KOMPAK telah:

- Memberikan rekomendasi kebijakan mengenai formula alokasi DAK fisik (tahun anggaran/ TA 2021 dan 2022) dan reformulasi DID (TA 2021) dalam penanganan COVID-19. Masukan KOMPAK telah tercermin dalam UU APBN No. 9/2020 untuk APBN TA 2021. Selain itu, masukan KOMPAK juga digunakan sebagai rekomendasi untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 87/2020 pada 16 Juli 2020 tentang pengelolaan DID tambahan TA 2020 yang mencakup usulan indikator penanggulangan dan pemulihan dalam pandemi COVID-19. Selain itu, advokasi KOMPAK juga mendorong alokasi DID tambahan sebesar Rp5 triliun untuk penanganan COVID-19.
- Mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi DAK fisik yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan KRISNA.

- Merekomendasikan kepada Kemenkeu dan Kemenkes tentang pembiayaan DAK non-fisik yang ditujukan untuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Terkait rekomendasi ini, Kemenkes kemudian menggunakan dokumentasi KOMPAK sebagai salah satu acuan untuk alokasi BOK TA 2021.

KOMPAK akan terus membantu mengevaluasi serta mendesain kebijakan dan indikator DID untuk tahun 2021 dan memastikannya relevan untuk pemulihan dalam pandemi COVID-19.

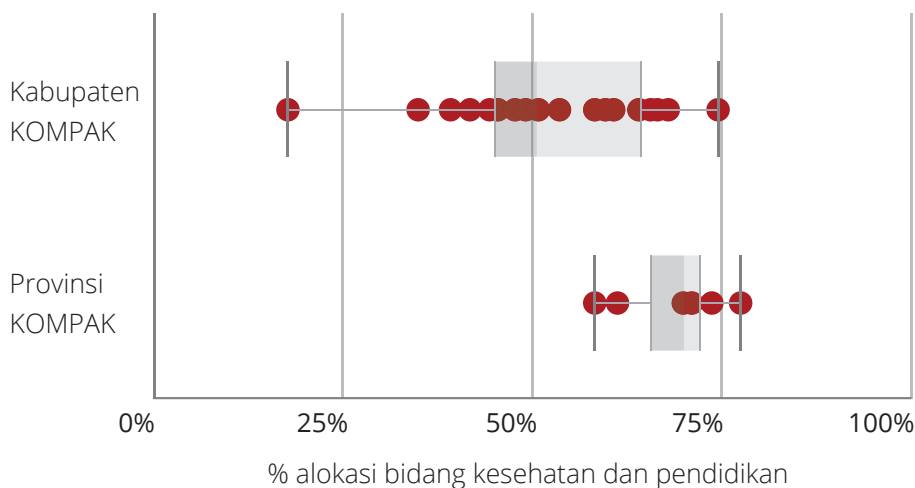
Peningkatan Kapasitas

Pada tahun 2020, KOMPAK telah menunjukkan berbagai upaya untuk menyosialisasikan kebijakan, terkait koordinasi dalam penyusunan kebijakan antar-kementerian dan institusi yang terkait, mendapatkan masukan dari pemerintah daerah, dan memberikan pelatihan serta dukungan dalam melaksanakan kebijakan baru.

KOMPAK memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebijakan dan panduan DAK dan DID serta untuk menyusun proposal dana yang lebih baik. Sepanjang tahun 2020, KOMPAK memberikan pelatihan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten di wilayah kerja KOMPAK. Pelatihan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah mengubah proposal DAK fisik 2021 dan alokasi serta indikator kesehatan dan pendidikan DAK non-fisik untuk pemulihan dalam pandemi COVID-19. Hasilnya, semua provinsi dan kabupaten dampingan KOMPAK, yaitu 7 provinsi dan 24 kabupaten, dapat lebih memahami kebijakan DAK, dan telah mengirimkan proposal DAK fisik untuk pendidikan dan kesehatan melalui aplikasi KRISNA.

Berdasarkan data DAK fisik TA 2021, kabupaten dan provinsi di wilayah kerja KOMPAK (63%) mengalokasikan lebih banyak dana untuk semua layanan pendidikan dan kesehatan daripada rata-rata angka nasional (60%). Alokasi tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Pacitan (75%), sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Fakfak (18%). Meskipun mendapatkan hasil rata-rata yang baik, 15 dari 24 kabupaten dan 1 dari 7 provinsi dampingan KOMPAK menerima alokasi DAK fisik untuk kesehatan dan pendidikan yang lebih rendah daripada rata-rata nasional.

Persentase alokasi DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan oleh kabupaten dan provinsi



Sumber: Kementerian Kesehatan, Alokasi DAK Fisik, 2021.

Sebagai hasil dari beberapa inisiatif peningkatan kapasitas, kabupaten dan provinsi dampingan KOMPAK sudah lebih memahami Dana Insentif Daerah (DID). Sepanjang tahun 2020, kabupaten dan provinsi ini memantau indikator DID secara berkala, dan menyampaikan penyesuaian pemanfaatan DID mereka untuk merespons COVID 19. Jumlah pendanaan DID meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan lima provinsi dan semua kabupatennya (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan) menerima DID TA 2021. Sebelumnya di tahun 2020, Bener Meriah (Aceh), Brebes (Jawa Tengah), serta Pangkajene dan Kepulauan (Sulawesi Selatan) tidak menerima DID.

Contoh keberhasilan dari KOMPAK dalam meningkatkan kapasitas adalah lahirnya dua buklet tanya jawab umum (FAQ). Buklet FAQ ini membantu pemerintah kabupaten agar lebih efektif dalam menggunakan dana pemerintah pusat melalui DAK non-fisik untuk mendukung sekolah dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan layanan pendidikan non-formal untuk bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran daring dan jarak jauh. Buklet yang disusun bersama dengan Kemenkeu dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa digunakan oleh semua kabupaten di Indonesia—diterbitkan di situs web Kemendikbud. Selain itu, KOMPAK juga memfasilitasi webinar dengan mitra pemerintah untuk menyosialisasikan materi-materi dalam buklet ini.

1.3 Memperkuat Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Aceh untuk Melaksanakan Kebijakan Otsus

Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi yang paling tertinggal di Indonesia. Beragam masalah seperti layanan kesehatan yang buruk, data berkualitas rendah, serta orang asli dan masyarakat perdesaan yang rentan menekankan perlunya respons COVID-19 yang terencana dengan baik, dan juga pentingnya bantuan jangka panjang untuk mendorong pembangunan di wilayah ini.

Dukungan utama KOMPAK untuk Otsus di Papua dan Papua Barat meliputi:

- Kajian Studi Implementasi Otsus Papua dan Papua Barat serta Rekomendasi Kebijakan Rancangan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Hasil kajian telah digunakan sebagai masukan dalam diskusi kritis sepanjang tahun 2020 tentang kebijakan Otsus ke depannya, termasuk dalam dengar pendapat parlemen dan diskusi antara kementerian dengan Bappenas Kemenkeu, Kemendagri, Pemerintah Papua dan Papua Barat tentang keberlanjutan Otsus di Papua dan Papua Barat. Alhasil, pemerintah dan DPR sepakat memasukkan revisi UU Otsus sebagai salah satu program legislasi nasional tahun 2021.
- KOMPAK juga membantu Kemenkeu menyimulasikan pembiayaan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat. Hasil kerja sama ini digunakan Kemenkeu sebagai masukan untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan pada bagian-bagian terkait dalam rancangan revisi UU 21/2001 (UU Otsus).
- Terkait pertanggungjawaban dan pelaporan dana Otsus, KOMPAK mendukung Kemendagri dan pemerintah provinsi untuk merevisi nomenklatur anggaran Otsus. Revisi tersebut dilakukan guna memastikan keselarasan dengan peraturan lain dan memungkinkan Dana Otsus digunakan untuk bantuan sosial.

Provinsi Papua

Di Papua, KOMPAK menganalisis situasi sosial ekonomi dan kesehatan, meneliti bagaimana COVID-19 berdampak pada kemiskinan, kapasitas fiskal, kegiatan ekonomi, serta kesehatan dan pendidikan. Analisis ini digunakan untuk menginformasikan Rencana dan Anggaran Penanganan COVID-19 di Papua tahun 2020–2021 dan rencana kabupaten terkait.

Selanjutnya, lewat kerja sama dengan MAHKOTA, KOMPAK menyusun catatan opsi tentang perlindungan sosial di Provinsi Papua sebagai tanggapan terhadap COVID-19. Kerja sama ini membantu pemerintah provinsi untuk memperluas program bantuan sosial, khususnya bantuan langsung tunai, guna mendukung masyarakat yang paling terkena dampak pandemi dan pelemahan ekonomi yang menyertainya.

Provinsi Papua Barat

Di Papua Barat, KOMPAK membantu merancang Program Strategis Pembangunan Peningkatan Kampung (PROSPPEK) yang didanai Otsus. Tujuan PROSPPEK adalah memperluas model KOMPAK yang sudah berjalan, seperti sistem informasi kecamatan dan desa (SAIK+), integrasi perencanaan antara desa dan unit layanan, serta pemberdayaan kader desa, ke seluruh desa di Provinsi Papua Barat. Terkait penanganan COVID-19, KOMPAK mendukung pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang dana PROSPPEK, dengan fokus pada kegiatan kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar dana Otsus untuk kegiatan PROSPPEK dan lebih dari Rp400 miliar pada 2021.

Selain itu, KOMPAK juga membantu Pemprov Papua Barat untuk merancang program hibah untuk anak-anak dan orang tua di Papua Barat. Program perlindungan sosial bagi orang asli Papua (OAP) ini merupakan perluasan dari PROSPPEK yang dibangun pada sistem SAIK+ yang memuat data terpilah OAP dan non-OAP. Pengumpulan data untuk SAIK+ didukung oleh instrumen khusus dan dilakukan di tingkat desa. KOMPAK memfasilitasi pelatihan pendataan untuk kader desa di 121 desa, dan pelatihan pengoperasian SAIK+ dilakukan di 97 desa. Selain itu, verifikasi data partisipatif melalui musyawarah desa digunakan sebagai mekanisme strategis untuk memastikan prioritas kelompok masyarakat yang paling membutuhkan manfaat bansos.

BANGGA Papua

BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial berupa pemberian uang tunai kepada orang tua/pengasuh dari anak-anak OAP berusia di bawah empat tahun di tiga kabupaten terpencil di Provinsi Papua. Uji coba BANGGA Papua dimulai pada 2019 dengan dukungan MAHKOTA dan KOMPAK. Namun, pada 2020, pemberian bantuan sosial melalui BANGGA Papua ditiadakan

oleh pemerintah provinsi karena anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dituanrumahi Provinsi Papua. Tetapi dengan advokasi dari KOMPAK dan MAHKOTA, pemerintah provinsi mengisyaratkan untuk melanjutkan pendanaan BANGGA Papua pada tahun anggaran 2021.

Meskipun BANGGA Papua tidak bisa menyalurkan bantuan hibah tunai pada tahun 2020, KOMPAK terus memberikan bantuan teknis kepada Sekretariat Bersama (Sekber) kabupaten dan provinsi dalam pengembangan dan pelaksanaan Strategi Komunikasi BANGGA Papua. Kolaborasi teknis ini melibatkan:

- Pengembangan pedoman penggunaan situs web BANGGA Papua dan dinamika di media sosial;
- Strategi komunikasi di daerah untuk menyosialisasikan pesan-pesan tentang kesehatan dan gizi; serta
- Penyiapan pesan yang tepat terkait penanggulangan COVID-19 yang mendorong perilaku menjaga jarak, kesehatan, dan kebersihan.

Pada bulan Juni 2020, KOMPAK dan MAHKOTA menyelesaikan evaluasi proses BANGGA Papua. Evaluasi ini menilai efektivitas proses penyelenggaraan kegiatan; melihat ada-tidaknya penyimpangan (dan kesesuaian) dari desain awal program; dan bagaimana pengalaman rumah tangga penerima manfaat serta masyarakat lokal terkait program tersebut. Evaluasi proses menyoroti beberapa pembelajaran yang digunakan untuk penyusunan pedoman teknis BANGGA Papua dan replikasi program. Pembelajaran utama yang relevan dengan mandat KOMPAK tentang penguatan kelembagaan dan komunikasi meliputi:

- Dalam konteks Papua, BANGGA Papua adalah mekanisme perlindungan sosial yang efektif untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat di wilayah terpencil.
- Struktur Sekretariat Bersama yang mengawasi pelaksanaan program telah berfungsi relatif baik dengan dukungan mitra pembangunan. Namun, kunci keberhasilan program ini adalah memastikan komitmen politik dan keuangan yang berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Komunikasi dirasa sangat penting dalam konteks Papua karena wilayah terpencil dan tingkat literasi yang rendah. Perlu upaya yang ditargetkan dan disesuaikan untuk

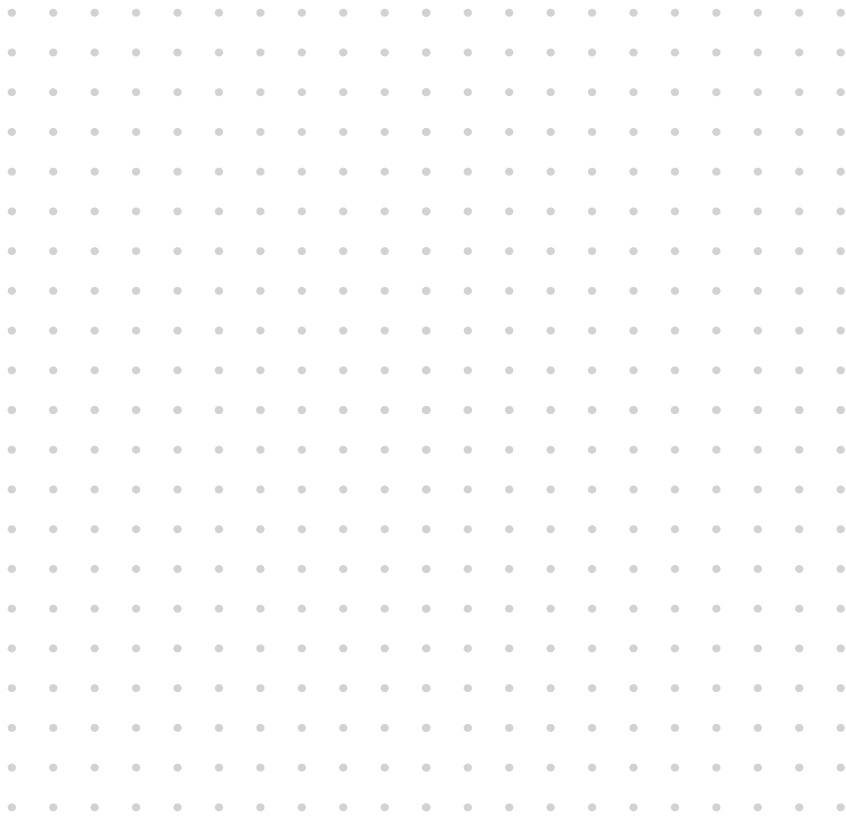
memastikan penerima manfaat serta pemerintah daerah mengetahui program dan memahami tujuannya. Upaya berbagi pesan sosialisasi terbukti efektif dengan melibatkan tokoh masyarakat, seperti tokoh gereja dan petugas kesehatan.

- Berdasarkan analisis gender dan inklusi sosial (GESI) lebih lanjut yang dilakukan oleh KOMPAK, BANGGA Papua juga menunjukkan potensi untuk mengatasi beberapa masalah mendasar GESI dalam masyarakat patriarki dan komunal di Papua, dengan memberikan perempuan pengelolaan atas sumber daya keuangan serta pengambilan keputusan. Analisis tersebut akan dijelaskan lengkap di bagian GESI dari laporan ini.

1.4 Mengembangkan dan Mendukung Pelembagaan Model Pendanaan Insentif Berbasis Kinerja Desa guna Memperkuat Pemberian Layanan

Kemenkeu terus mempersiapkan peluncuran insentif berbasis kinerja untuk desa secara nasional, yang memberikan penghargaan kepada desa berdasarkan pengelolaan keuangan, penyaluran layanan dasar, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu telah mengalokasikan 3% dari Dana Desa untuk insentif ini, yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik di setiap kabupaten. Uji coba yang sedang dijalankan KOMPAK di enam kabupaten diantaranya (Bima, Bantaeng, Sumbawa, Aceh Barat, Bener Meriah, dan Lumajang) serta dukungan untuk Jawa Timur dalam mengadaptasi percontohan ini (Dukungan Keuangan Provinsi – Insentif Desa, Bantuan Keuangan – Insentif Desa), menjadi pembelajaran dan masukan berharga untuk peluncuran insentif ini secara nasional. Misalnya, berdasarkan pengalaman di lokasi percontohan, KOMPAK menyusun pedoman penilaian dan evaluasi kinerja, yang telah dimasukkan dalam PMK No. 222/2020. Selain itu, KOMPAK mempelajari dampak uji coba terhadap kinerja desa serta pemberian layanan dasar, dan hasilnya akan digunakan untuk mendasari formulasi ulang Dana Desa untuk TA 2021.

Namun, pengalokasian ulang dana untuk penanganan COVID-19 mengalami penundaan, meskipun pembayaran pertama dijadwalkan akan dilakukan pada 2021. KOMPAK akan terus memantau efektivitas model ini di daerah percontohan.







Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)

— Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)

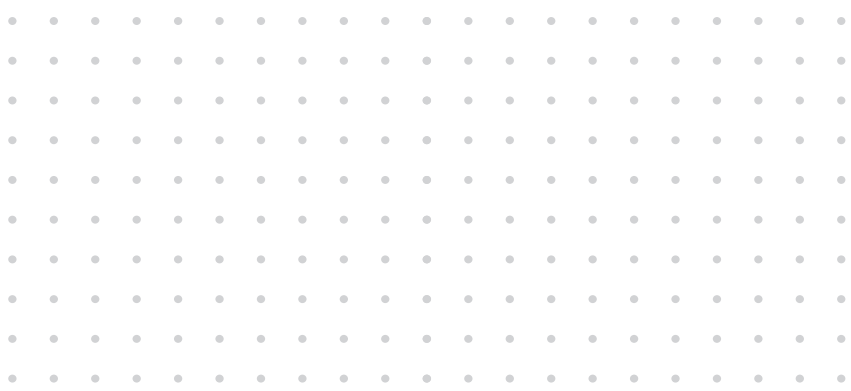
Prioritas COVID-19: Penguatan peran dan kapasitas pembina PASH untuk mendukung pendataan masyarakat rentan terdampak pandemi COVID-19.

RINGKASAN PENCAPAIAN

KOMPAK merintis model pencatatan sipil berbasis desa yang digunakan fasilitator PASH untuk mengidentifikasi dan membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran. Model fasilitator ini sangat penting dalam penanganan COVID-19 karena membantu menentukan penerima manfaat dan menyampaikan program perlindungan sosial serta meningkatkan himpunan data untuk sistem informasi desa. Hasilnya, ada lebih banyak masyarakat rentan yang teridentifikasi dan dapat mengakses layanan. Pada Desember 2020, 55% desa memiliki setidaknya satu fasilitator PASH yang dilatih untuk mengidentifikasi masyarakat rentan dan 33% desa dapat memberikan layanan pencatatan administrasi kependudukan secara daring.

ANALISIS SITUASI

Selama lima tahun terakhir, KOMPAK mendukung pemerintah dalam Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) di semua tingkatan, termasuk desa, sehingga dokumen identitas hukum dan data kependudukan dapat dihasilkan secara tepat waktu dan akurat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah (RPJMN) yang sebelumnya, target cakupan akta kelahiran adalah 85 persen. Namun, pemerintah kini menargetkan cakupan secara menyeluruh pada 2024.

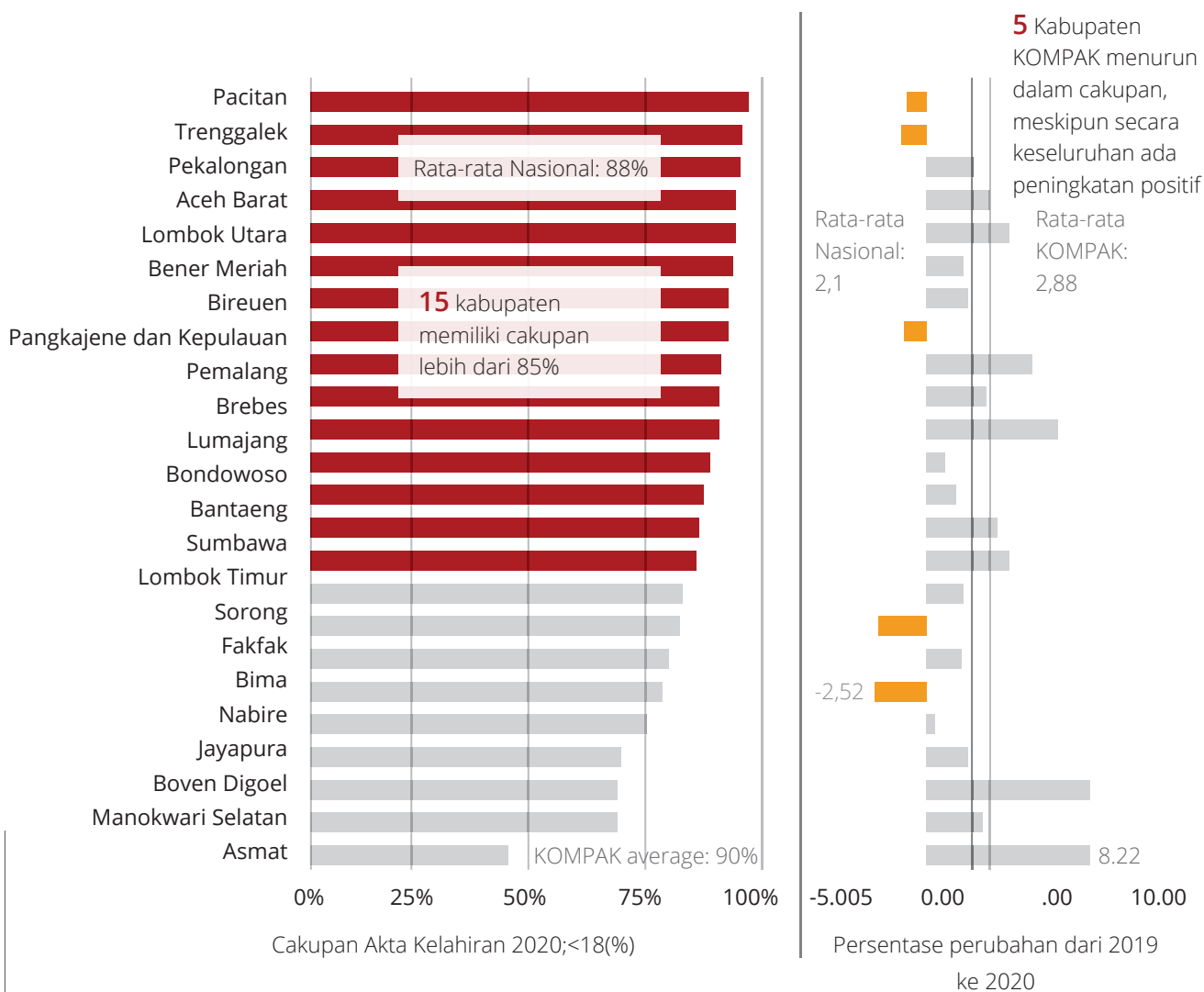
Data kependudukan yang akurat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya KOMPAK untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan alokasi sumber daya untuk layanan dasar. Secara lebih spesifik, kegiatan unggulan PASH KOMPAK berfokus untuk: (1) mengurangi disparitas dalam mengakses identitas hukum; (2) menyederhanakan proses untuk memperoleh identitas hukum; (3) mengintegrasikan proses PASH di sektor terkait; (4) memperjelas mekanisme penganggaran untuk layanan PASH; dan (5) meningkatkan ketersediaan serta interoperabilitas data administrasi kependudukan dan statistik hayati.

Lebih lanjut, tren positif juga terjadi dalam cakupan pencatatan sipil di kabupaten wilayah kerja KOMPAK. Studi terbaru yang dilakukan oleh PUSKAPA di 10 kabupaten dampingan KOMPAK menilai perubahan dalam cakupan pencatatan sipil tahun 2015–2019, dan menunjukkan peningkatan cakupan akta kelahiran dari 64% menjadi 74%, dengan peningkatan serupa untuk dokumen pencatatan sipil lainnya. Secara rata-rata, jumlah data ini hampir dua kali lipat dari proporsi kepemilikan akta kelahiran pada balita di beberapa wilayah. Penanda lain untuk kategori akta nikah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Studi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang didukung KOMPAK, termasuk fasilitator berbasis desa, telah mempermudah warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Perubahan kapasitas kantor catatan sipil setempat dalam memperoleh data terpilah terkait pencatatan kelahiran juga terlihat. Hampir semua kantor dapat menghasilkan data berdasarkan kelompok umur, padahal kemampuan ini tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya pada 2015.

Studi menyimpulkan bahwa model fasilitator PASH berbasis desa (Layanan Adminkuk Berbasis Kewenangan Desa, LABKD) yang digunakan KOMPAK telah membantu meningkatkan cakupan. Peningkatan kapasitas desa untuk memberikan layanan pencatatan sipil menyebabkan lebih banyak pencatatan sipil dan menghapuskan hambatan hukum untuk mengakses layanan.

Serupa dengan hasil studi PUSKAPA, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 menunjukkan bahwa di kabupaten wilayah kerja KOMPAK secara keseluruhan memiliki kinerja yang lebih baik daripada rata-rata nasional, dengan peningkatan sebesar 2,88 poin persen dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 2,10 poin pada tahun 2019–2020.

Sebagian besar daerah-daerah yang berkinerja buruk berada di Papua dan Papua Barat, meskipun cakupan layanan akta kelahirannya sudah sangat rendah, tetapi gagal mencapai peningkatan yang berarti, kecuali di Kabupaten Asmat dan Kaimana. KOMPAK melakukan kegiatan PASH secara terbatas di Papua dan Papua Barat selama periode ini, tetapi akan meningkatkan kegiatan dan dukungannya dalam rencana kerja tahun 2021.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional [SUSENAS], 2020.

KOMPAK telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas layanan PASH melalui fasilitator PASH berbasis desa pada 24 kabupaten di tujuh provinsi. Fasilitator PASH ini merupakan staf kantor desa atau relawan masyarakat yang membantu penduduk desa mempersiapkan dokumen pendukung, memproses aplikasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten, dan menyerahkan dokumen jadi kepada mereka. Layanan rumah ke rumah (*door-to-door*) ini sepenuhnya didanai oleh anggaran desa sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara cuma-cuma. Model fasilitator PASH berbasis desa (LABKD) sangat berguna untuk daerah dengan sumber daya PASH yang terbatas, daerah dengan cakupan dokumen kependudukan rendah, dan daerah terpencil dengan jumlah penduduk miskin dan rentan yang tinggi.

Biaya administrasi pengurusan akta kelahiran (untuk umum)

% desa (n=484)	Jawa Timur	Sulawesi Selatan	Jawa Tengah	NTB	Aceh	Papua	Papua Barat	Total
Tanpa biaya	100%	94%	100%	100%	82%	2%	12%	70%
Kurang dari Rp 50.000		6%			4%		1%	2%
Lebih dari Rp 51.000					10%		1%	2%
Desa tanpa layanan PASH					3%	98%	86%	27%

Sumber data: Survei Desa Dampingan KOMPAK, 2020.

Akibat pandemi COVID-19, program KOMPAK untuk PASH menjadi makin penting. Untuk merespons pandemi dan dalam upaya untuk mengurangi dampaknya terhadap kelompok miskin dan rentan, pemerintah telah memperluas skema bantuan sosial dan memperkenalkan program baru Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Seluruh program bantuan sosial COVID-19 menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, DTKS yang ada memiliki kesalahan pengecualian dan penyertaan. Selain itu, DTKS juga tidak memasukkan data individu yang menjadi miskin dan rentan akibat COVID-19.

Program KOMPAK dalam pencatatan sipil kelompok rentan dan peningkatan hubungan dengan sistem informasi desa dan kabupaten membantu meningkatkan penetapan target dan ketepatan waktu bantuan sosial. Model fasilitator PASH berbasis desa (LABKD) menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan individu rentan agar mendapatkan bantuan sosial. Model ini merupakan sistem yang penting dalam meningkatkan akurasi himpunan data pada individu rentan, khususnya DTKS.

KEMAJUAN DAN TANTANGAN



1,03 juta dolar Australia

Total pengeluaran program antara Januari dan Juni 2020 (dari anggaran tahunan AU\$1,27 juta).



81%

Tingkat pengeluaran (pengeluaran/anggaran) untuk Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020.



89%

Kegiatan dalam Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020 telah selesai.



96%

Kegiatan yang telah selesai memenuhi atau melebihi ekspektasi.

FOKUS	AKTIVITAS	STATUS	RISIKO/ TANTANGAN
Nasional	Melakukan analisis terhadap <ul style="list-style-type: none"> Situasi PASH terkait COVID-19. Strategi risiko dan mitigasi PASH terkait COVID-19 untuk anak-anak dan populasi rentan.. 	Selesai	●
	Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas untuk meninjau, menyusun, atau memberikan masukan teknis pada dokumen-dokumen kebijakan terkait PASH guna merespons COVID-19. ¹¹	Selesai	●
Daerah	Memberikan bantuan teknis kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten untuk mengoordinasikan pendataan penduduk miskin dan rentan yang terdampak COVID-19.	Selesai (luar Papua) Lebih dari setengah telah selesai (Papua)	●
	Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa untuk memperbarui data kelompok miskin dan rentan. Bantuan ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data sistem informasi desa; dan Daftar penerima program bantuan sosial yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan ini dikelola bersama melalui kegiatan unggulan sistem informasi desa (SID). 	Selesai (luar Papua and Sulawesi Selatan) Lebih dari setengah telah selesai (Papua)	●
	Melatih fasilitator PASH berbasis desa tentang cara mengidentifikasi dan mendata penduduk rentan terdampak COVID-19.	Selesai (luar Papua and Papua Barat) Lebih dari setengah telah selesai (Papua)	●

11 Bantuan ini mencakup peninjauan regulasi, protokol, dan pedoman.

2.1 Meningkatkan Cakupan, Kapasitas, Pembiayaan Lokal, dan Interkonektivitas Pendekatan PASH Berbasis Desa dan Kecamatan

KOMPAK dan PUSKAPA membantu pemerintah daerah untuk memperluas pendaftaran kelompok rentan. Meskipun pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial menyulitkan pelaksanaan program, peningkatan jumlah kelompok rentan karena masalah kesehatan dan ekonomi membuat upaya ini makin penting, yang dibuktikan dengan replikasi program di sembilan kabupaten non-dampungan KOMPAK.

KOMPAK dan PUSKAPA telah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dan desa untuk:

- Menyusun pedoman kabupaten untuk mengelola layanan PASH selama pandemi;
- Mengembangkan layanan pencatatan sipil secara daring;
- Melatih fasilitator PASH dan staf di tingkat kabupaten dan desa tentang kerentanan serta metode untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan kelompok rentan; dan
- Mengintegrasikan dan memeriksa ulang himpunan data untuk Sistem Informasi Desa (SID), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Semua desa di 25 kecamatan dampungan KOMPAK, di luar wilayah Papua dan Papua Barat, telah menerapkan model fasilitator PASH berbasis desa (LABKD). Sementara di Papua dan Papua Barat, model tersebut masih dalam tahap awal implementasi. Survei Desa yang dilakukan KOMPAK juga menunjukkan bahwa hampir semua desa dampungan KOMPAK, di luar wilayah Papua dan Papua Barat, memiliki fasilitator PASH berbasis desa atau perangkat desa sebagai petugas penghubung untuk menyediakan layanan PASH berbasis desa.

Siapa yang menyediakan layanan administrasi kependudukan di desa?

(n=484)	Aceh	Jawa Tengah	Jawa Timur	NTB	Sulawesi Selatan	Papua	Papua Barat	Total
Fasilitator PASH desa	66%	36%	49%	4%	88%			30%
Perangkat desa (memiliki tugas lain)	30%	64%	51%	96%	12%	2%	14%	44%
Layanan PASH disediakan di luar desa	4%					98%	86%	27%

Mendukung pelebagaan model layanan PASH berbasis desa

KOMPAK mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan melembagakan sistem PASH berbasis desa di tingkat nasional dan daerah. KOMPAK dan PUSKAPA menyusun pedoman dan prosedur operasi standar (SOP) untuk layanan PASH berbasis desa, yaitu Pedoman Teknis Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Pedoman tersebut berisi materi pelatihan tentang penyampaian layanan PASH berbasis desa, dan memberikan gambaran umum bagi pemerintah daerah tentang cara menghubungkan layanan pencatatan sipil serta mengalokasikan dana menggunakan Dana Desa.

Model LABKD sangat efektif untuk kabupaten dengan sumber daya dan layanan penjangkauan pencatatan sipil yang terbatas, cakupan pencatatan sipil yang rendah, banyaknya desa terpencil, dan/atau tingkat kemiskinan dan individu rentan yang tinggi.

Menguatkan peran dan kapasitas fasilitator PASH untuk mendukung pendataan masyarakat rentan yang terdampak COVID-19

Di samping kegiatan advokasi untuk definisi kerentanan yang lebih inklusif, KOMPAK dan PUSKAPA juga telah melatih fasilitator PASH dalam menerapkan definisi kerentanan yang baru ini. Selama tahun 2020, pelatihan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Aceh, dan Jawa Tengah dengan jumlah peserta seluruhnya 486 orang (75% laki-laki dan 25% perempuan). Sebagai upaya standarisasi penyampaian pelatihan, KOMPAK dan PUSKAPA menyusun pedoman dan SOP untuk melatih fasilitator PASH dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data.

Data Terintegrasi Memastikan Tak Ada Penduduk yang Tak Terdata

Daftar penerima bansos yang belum divalidasi sering kali mengabaikan warga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan di Desa Ambulu, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan KOMPAK bekerja sama melakukan verifikasi, validasi, dan pencocokan data kependudukan dengan data bantuan pemerintah pusat. Kini, penyaluran bantuan pemerintah dan rencana pembangunan menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran berkat data akurat yang terhubung dengan berbagai data demografi.

Ketika COVID-19 merebak ke daerah tempat tinggal Nenek Satriya di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ia membutuhkan bantuan untuk mengakses bansos yang walaupun merupakan haknya tidak pernah ia ketahui keberadaannya.

Keluarga Nenek Satriya menggantungkan hidupnya pada usaha membuat keranjang bambu kecil atau besek untuk ikan yang dijalankan cucunya untuk menghidupi istri dan dua anaknya, serta Satriya. Di masa awal pandemi, harga jual *besek* ikan turun menjadi Rp10.000 per keranjang, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp20.000 per keranjang. Akibatnya, penghasilan cucunya tidak cukup untuk menghidupi mereka semua.

Oleh karena itu, keluarga Satriya berhak mendapatkan bantuan uang tunai dan bantuan makanan. Namun, mereka tidak memiliki KTP yang diperlukan untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat. Mendengar hal tersebut, fasilitator PASH di Desa Ambulu, Didik Pranoto menemui Satriya. Awalnya Satriya enggan mengajukan KTP. "Buat apa punya KTP? Saya sudah tua, *nggak* butuh KTP," ujarnya ketika berulang kali didatangi Didik dan petugas Desa Ambulu.

Didik berhasil meyakinkan Satriya untuk mengurus dokumen pencatatan sipilnya sehingga Satriya bisa masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Akhirnya Satriya yang berusia 83 tahun bisa menerima bantuan dari pemerintah. "Kenapa saya (bisa) dapat?" ujarnya, seolah tak percaya ketika Didik memberitahukan bahwa ia terdata sebagai penerima bantuan.

Nenek Satriya merupakan salah satu dari 121 keluarga yang menerima BLT-Dana Desa di Desa Ambulu pada 2020. Nilainya Rp600.000 untuk tiga bulan pertama dan Rp300.000 untuk enam bulan berikutnya. Bantuan tersebut bisa ia dapatkan berkat adanya interkoneksi data Sistem Informasi dan Administrasi Desa (SAID), data pencatatan sipil dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bondowoso, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi acuan penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hasil Survei Desa di wilayah kerja KOMPAK (Desember 2020)

Agar bisa lebih memahami jangkauan layanan pencatatan sipil, KOMPAK melaksanakan survei terhadap semua desa yang dapat diakses di lokasinya (98% dari semua desa dampingan KOMPAK). Survei menunjukkan bahwa desa-desa di provinsi—di luar wilayah Papua dan Papua Barat—lebih siap untuk memberikan layanan pencatatan sipil selama COVID-19. Daerah-daerah tersebut juga menjadi penerima dukungan paling banyak dari KOMPAK dan PUSKAPA berupa bantuan teknis dan pelatihan.

Temuan menunjukkan sebagian besar desa di luar wilayah Papua dan Papua Barat telah menetapkan protokol penyelenggaraan layanan pencatatan sipil selama COVID-19.¹² Desa-desa ini hampir secara menyeluruh menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pencatatan sipil yang aman ketika kontak tatap muka diperlukan. Selain itu, ada juga kebijakan untuk memberikan layanan pencatatan sipil secara daring—dilakukan oleh dua provinsi (Jawa Timur dan Jawa Tengah) yang melaporkan cakupan lebih dari 50%.

12 Kemajuan di Papua dan Papua Barat terbilang rendah dibandingkan provinsi lainnya karena KOMPAK baru mendukung PASH di kedua provinsi ini pada tahun 2020. Beberapa kegiatan juga tertunda karena pandemi dan keterbatasan pelayanan. Oleh karena itu, uji coba PASH akan dilanjutkan pada tahun 2021. Tidak ada intervensi yang signifikan (kecuali melalui BANGGA Papua) telah dilakukan sebelum tahun 2020 untuk PASH di kedua provinsi itu.

Layanan administrasi kependudukan dan identitas hukum

(% desa menunjukkan 'ya')	Aceh	Jawa Tengah	Jawa Timur	NTB	Papua	Papua Barat	Sulawesi Selatan	Total
Penyesuaian protokol/ SOP/administrasi kependudukan sebagai respons COVID-19	70%	85%	100%	60%	40%	31%	100%	69%
Pelatihan bagi fasilitator PASH tentang kerentanan dan dampak COVID-19	100%	97%	82%	47%	3%	6%	88%	60%
Tersedia layanan daring adminduk	30%	85%	71%	29%	4%	1%	29%	36%
Layanan adminduk tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 (mis. bermasker, menjaga jarak, dll.)	100%	100%	100%	99%	68%	59%	100%	89%
Tersedia data jumlah kematian	43%	97%	100%	81%	63%	24%	100%	73%

Data menunjukkan bahwa layanan pencatatan sipil di desa-desa terus dilakukan dengan persentase sekitar 80% dari tingkat layanan sebelum pandemi. Angka ini sejalan dengan target KOMPAK. Antara Juli dan Desember 2020, setiap desa menerbitkan 36 akta kelahiran, dibandingkan dengan 46 akta kelahiran pada periode yang sama pada tahun 2019. Semua data ini sejalan dengan target/ harapan KOMPAK ketika layanan melambat akibat pandemi. Fokus pada kerentanan tampaknya telah meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas. Layanan meningkat 8% dari 98 desa (2019) menjadi 123 desa (2020) yang melayani setidaknya satu penyandang disabilitas yang didukung dengan layanan pencatatan sipil.

Pelayanan adminduk yang difasilitasi oleh pemerintah desa

Provinsi	Akta kelahiran yang diterbitkan		Kartu keluarga yang diterbitkan		Desa dengan pendampingan penyandang disabilitas #
	Rata-rata per desa	Total	Rata-rata per desa	Total	
Aceh	22	2.111	26	2.449	16
Jawa Tengah	35	1.153	83	2.755	11
Jawa Timur	38	3.586	96	9.079	35
Nusa Tenggara Barat	53	5.214	90	8.771	46
Papua	68	68	0	0	0
Papua Barat	2	21	0	5	1
Sulawesi Selatan	30	518	51	872	11
Total	36	12.671	49	23.931	120

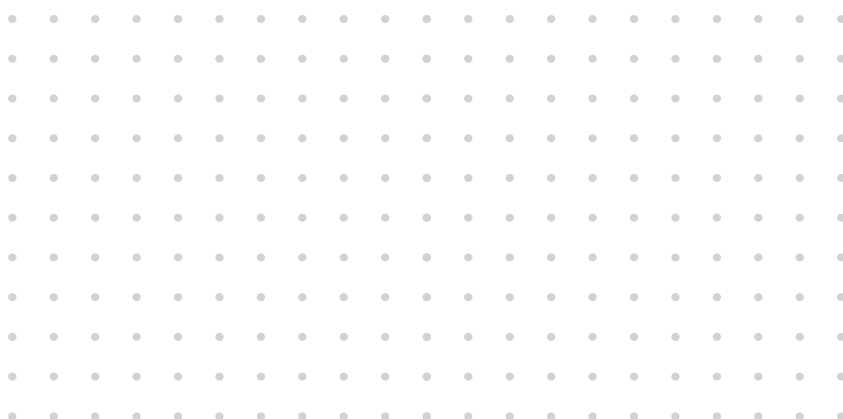
2.2 Memperkuat Kerja Sama Lintas Sektor, Terutama dengan Unit Layanan Lainnya (misalnya klinik, rumah sakit, dan sekolah) untuk Mempercepat Cakupan PASH

Penelitian PUSKAPA telah menunjukkan bahwa, meskipun cakupan akta kelahiran meningkat, banyak anak masih belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan sipil tidak dilakukan pada saat anak lahir. Jumlah anak tanpa akta kelahiran sangat tinggi untuk kategori anak di bawah 5 tahun. Masalah anak tanpa akta kelahiran biasanya dikaitkan dengan pasangan menikah yang tidak terdaftar dan terindikasi tidak mendaftarkan kelahiran anaknya. Kelompok-kelompok ini juga cenderung lebih miskin dan lebih rentan.

Tingkat pencatatan sipil yang rendah memengaruhi keakuratan himpunan data jumlah populasi, dan sering kali mengakibatkan tidak terdatanya populasi kelompok rentan dan transien. Akibatnya, program pemerintah mungkin dipersiapkan berdasarkan informasi yang tidak mutakhir atau tidak lengkap.

Upaya KOMPAK untuk meningkatkan hubungan dan koordinasi antara sekolah dan fasilitas kesehatan dengan desa, kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bermanfaat khususnya bagi anak-anak dan anggota keluarga pada umumnya. Sepanjang tahun 2020, KOMPAK dan PUSKAPA telah memberikan dukungan teknis di tingkat daerah untuk:

- Menyusun pedoman serta instrumen pemantauan dan evaluasi dalam program KKN mahasiswa untuk mendukung layanan PASH di Nusa Tenggara Barat (kerja sama antara universitas setempat dengan Disdukcapil Lombok Utara). Program ini merupakan tindak lanjut dari uji coba KOMPAK yang akan dihentikan secara bertahap, yaitu Universitas Membangun Desa (UMD), yang bertujuan untuk memanfaatkan program KKN di universitas untuk lebih mendukung kebutuhan pembangunan desa.¹³
- Memperkuat mekanisme sekolah untuk mengidentifikasi siswa tanpa KTP dan mempercepat kepemilikan identitas hukum pada siswa sebagai bagian dari perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura.
- Meningkatkan alokasi anggaran kerja sama lintas sektoral terkait PASH untuk pemerintah daerah/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mendukung terbitnya peraturan bupati tentang Percepatan Pelayanan PASH di empat Kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Peraturan tersebut memuat aturan kerja sama lintas sektor dalam pendataan dan verifikasi data kependudukan kelompok rentan.



13 Untuk informasi lebih lanjut mengenai UMD, silakan merujuk ke Laporan Evaluasi UMD KOMPAK (2020) (<https://www.kompak.or.id/id/download/2020/389evaluasi-pelaksanaan-model-universitas-membangun-desa-umd.pdf>).

Muni'ah, Keluarga Pendatang yang Akhirnya Menerima Bantuan Sosial

Penduduk Desa Tengah, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat banyak yang berasal dari keluarga pendatang. KTP lama yang tidak diganti setelah migrasi menyulitkan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial.

Rumah kecil seluas 24 m² ini tidak memiliki dinding pemisah. Selembar kain memisahkan dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Jendelanya terbuat dari papan berlubang, sedangkan lantainya dari semen kasar. Di Desa Tengah ini, Muni'ah (45) tinggal bersama suami dan empat anaknya. Suaminya, Hasanuddin (43) menggarap sawah tadah hujan milik keluarga. Penghasilannya yang minim menjadikan mereka terjebak hutang rentenir.

Muni'ah bertanya-tanya mengapa keluarganya tidak menerima bantuan pemerintah. Adapun tetangga dengan anak yang lebih sedikit, menerima modal usaha dan bantuan medis.

Sebelum tahun 2018, untuk mendapatkan dokumen kependudukan, warga Desa Tengah harus menempuh perjalanan sekitar 52 km ke Sumbawa Besar. Pada 2018, Kabupaten Sumbawa menetapkan peraturan mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan Pejabat Pencatatan Sipil Desa (PPKD) untuk menerbitkan dokumen identitas. Warga tidak perlu lagi bepergian jauh untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Melalui bantuan KOMPAK, Kelompok Kerja PASH terbentuk, fasilitator PASH kini mengunjungi warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan, dan berfokus pada masyarakat yang tinggal berada di dusun terpencil serta penyandang disabilitas. Fasilitator mengumpulkan data, menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Muni'ah menuturkan bahwa, Ibu Lenny (fasilitator PASH) mengunjungi rumahnya dan menanyakan apakah dia sudah memiliki KTP dan kartu keluarga. Ibu Lenny menjelaskan bahwa dokumen ini diperlukan jika kita ingin mendapatkan bantuan pemerintah. Muni'ah dan Hasanuddin membutuhkan waktu satu hari untuk melengkapi persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Tiga hari kemudian, PPKD mendapat informasi bahwa Perubahan Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran keempat anak Muni'ah sudah dicetak dan siap diambil.

Tak lama kemudian, keluarga Muni'ah tercatat sebagai keluarga kurang mampu. Pada 2019, mereka mendapat bantuan perbaikan rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRKP). Mereka juga mendapat bantuan pendidikan, pelayanan dan jaminan kesehatan (BPJS), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, Muni'ah juga menerima BLT-Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan.

Berdasarkan Survei KOMPAK pada bulan Desember 2020, hanya setengah dari kecamatan dampingan KOMPAK (22 dari 41 kecamatan) yang dilaporkan mengambil peran koordinasi aktif untuk PASH dengan unit layanan kesehatan atau pendidikan. Meskipun demikian, sebagian besar kecamatan di Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan koordinasi, baik dengan unit pelayanan kesehatan maupun pendidikan.

Kecamatan dengan dukungan Disdukcapil mengoordinasikan layanan penjangkauan ke unit layanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan penerbitan akta kelahiran dalam 6 bulan terakhir

(n=41)	Aceh	Jawa Tengah	Jawa Timur	NTB	Papua	Papua Barat	Sulawesi Selatan	Total
Ya, dengan unit kesehatan dan pendidikan		33%	25%	67%		13%	50%	20%
Ya, dengan unit kesehatan (Puskesmas, Posyandu, dll.)	67%		50%	11%		13%	50%	27%
Ya, dengan unit pendidikan (PAUD, sekolah, dll.)				11%	13%			3%
Tidak	33%	67%	25%	11%	88%	75%		43%

Untuk memverifikasi dampak kegiatan ini, KOMPAK menyelesaikan fase 2 studi PASH. Studi tersebut menegaskan bahwa program-program dampingan KOMPAK mendorong kerja sama lintas sektoral antara BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), desa, kecamatan, Disdukcapil, dan program kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial.

2.3 Mengembangkan dan Memasukkan Rekomendasi Kebijakan guna Memperkuat Layanan PASH untuk Kelompok Rentan (Termasuk untuk Kelompok Minoritas, Penyandang Disabilitas, dan Orang yang Terkena Dampak Keadaan Darurat)

Cakupan layanan dokumen kependudukan masih terkendala oleh permasalahan birokrasi. Namun, meskipun telah mengganggu sistem, pandemi juga memberikan peluang untuk melakukan perubahan yang cepat dan berkesinambungan.

Meningkatkan bukti dan kebijakan untuk menciptakan program perlindungan sosial pemerintah yang lebih inklusif dan responsif terhadap dampak COVID-19

PUSKAPA dan KOMPAK telah mengadvokasi Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan definisi kerentanan versi pemerintah. PUSKAPA dan KOMPAK percaya bahwa sistem PASH yang mendata semua orang (inklusif) dan mengelola data kependudukan secara efektif (akuntabel) akan mampu mendukung peningkatan layanan dasar dan alokasi sumber daya berbasis data.

Sikap ini diambil berdasarkan dua dokumen utama, yaitu studi PUSKAPA tentang kategori kerentanan dan catatan kebijakan yang meneliti dampak COVID-19 pada anak-anak dan individu yang rentan.

Meskipun pemerintah telah menerima kajian dan rekomendasi dari KOMPAK, PUSKAPA, dan mitra lainnya, dukungan lebih lanjut diperlukan di tingkat nasional dan daerah untuk mengimplementasikannya ke dalam program dan kebijakan.

Selain itu, KOMPAK dan PUSKAPA menyelesaikan analisis situasi PASH di masa COVID-19 yang menilai risiko dan strategi mitigasi untuk kelompok rentan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan situasi di 15 provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia per Mei 2020. Tulisan ini menganalisis risiko PASH dan strategi mitigasi untuk 43 kelompok rentan selama pandemi. Analisis ini akan digunakan dalam diskusi dengan Sekretariat PASH Nasional yang akan segera diluncurkan.

Memperkuat kebijakan tentang penyediaan layanan PASH dalam keadaan darurat

Pengalaman KOMPAK dalam mendukung layanan PASH pascagempa di Lombok tahun 2018 memberikan pelajaran berharga bagi penanganan COVID-19. Misalnya, dalam situasi darurat, keleluasaan untuk menyederhanakan proses dan persyaratan dokumen kependudukan dimungkinkan melalui peraturan daerah (kabupaten). Biaya tak terduga untuk mengaktifkan kembali layanan PASH dapat didanai melalui anggaran daerah. Selain itu, pemangku kepentingan Disdukcapil sebaiknya terus dilibatkan dalam setiap kegiatan pendataan untuk mengidentifikasi

penerima manfaat, karena pada akhirnya kelayakan untuk mendapatkan bantuan sosial bergantung pada kepemilikan Nomor Induk Kependudukan.

Pada 2020 KOMPAK menyelesaikan studi tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk layanan pendataan kependudukan. Studi ini akan memperkaya materi diskusi dengan Sekretariat PASH Nasional. Studi ini menjelaskan rekomendasi terkait dengan:

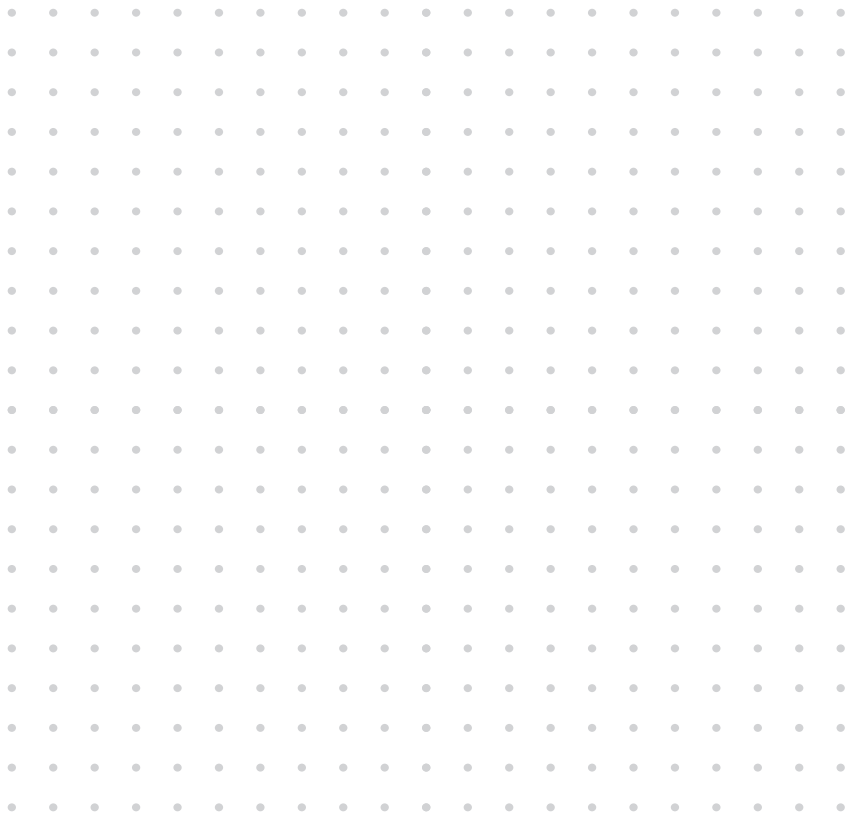
- Pembentukan fasilitator dan sumber daya pendataan kependudukan selama dan setelah keadaan darurat;
- Pendaftaran korban bencana;
- Interkonektivitas data PASH dan program bantuan sosial di lingkungan pascabencana.

Inisiatif untuk memperkuat layanan PASH bagi perempuan dan kelompok rentan

Pada 2020, KOMPAK dan PUSKAPA menyusun pedoman dan SOP untuk pelaksanaan LABKD. Pedoman tersebut berisi tata cara pelatihan untuk para fasilitator dan panduan praktis untuk fasilitator PASH. Adapun SOP memuat standar rekrutmen untuk petugas catatan sipil desa, dan memberikan informasi terkait pemutakhiran data kependudukan, alur pendaftaran dokumen kependudukan di desa, koordinasi antara petugas catatan sipil desa dengan Disdukcapil, dan identifikasi kelompok rentan.

Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi juga telah dikembangkan untuk Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pedoman nasional model PASH berbasis desa (Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa) saat ini sedang ditinjau akhir oleh Bappenas sebelum disebarluaskan.

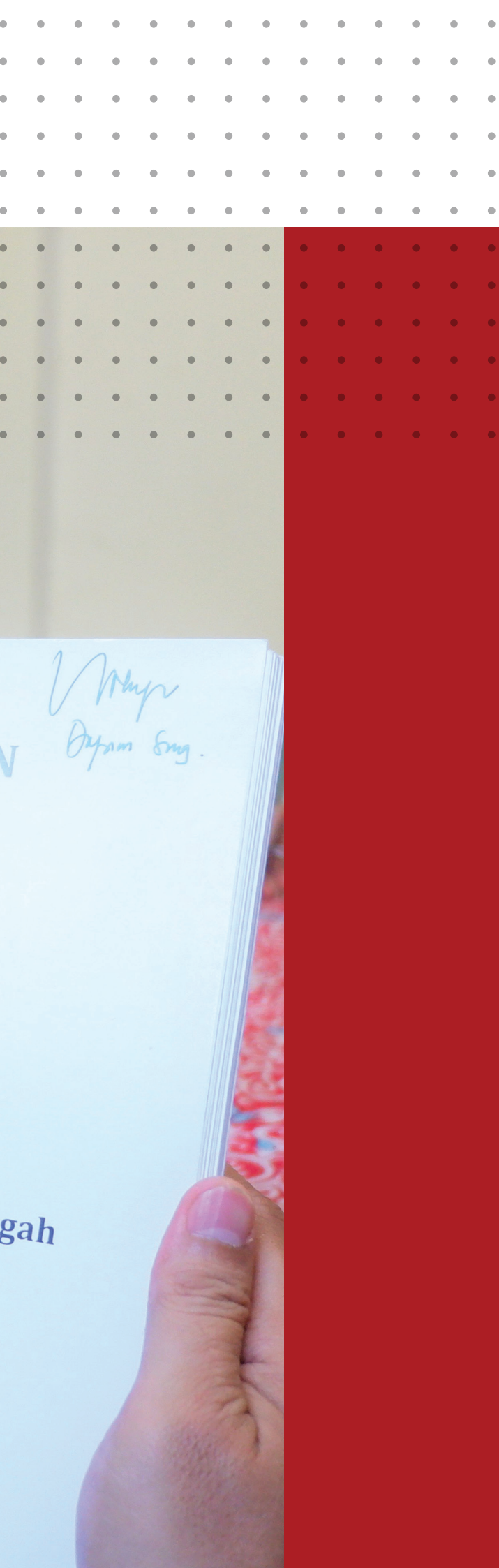
KOMPAK dan PUSKAPA juga mengadaptasi pedoman ini untuk Kemendesa PDTT guna memperluas layanan PASH berbasis desa berdasarkan platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa dari Kemendesa PDTT.





BAHAN BACAAN

**Pelatihan PTPD
Sebagai Fasilitator PbMAD
di Kabupaten
Lokasi KOMPAK Provinsi Jawa Tengah**



Penguatan Kecamatan dan Desa

Penguatan Kecamatan dan Desa

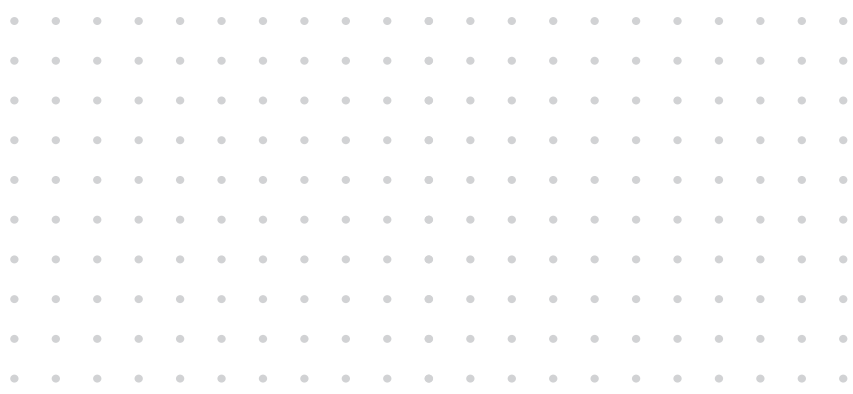
Prioritas COVID-19: Penguatan peran dan kapasitas pemangku kepentingan kecamatan dan desa untuk merevisi dan menggunakan APB Desa untuk menangani COVID-19.

RINGKASAN PENCAPAIAN

KOMPAK memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada pemerintah desa dan kecamatan guna merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk penanganan COVID-19. Hingga Desember 2020, 100% desa dampingan KOMPAK telah merevisi anggaran mereka, terutama mengalokasikan dana untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 serta untuk program perlindungan sosial (termasuk bantuan langsung tunai bagi mereka yang paling terdampak). KOMPAK juga mendukung pemerintah desa dalam menangani COVID-19 melalui Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) sambil terus meningkatkan koordinasi antara desa dan unit layanan (seperti klinik dan sekolah) di Papua dan Papua Barat.

ANALISIS SITUASI

Anggaran Desa (APB Desa) merupakan salah satu instrumen perencanaan anggaran terpenting di Indonesia. Sejak terbitnya UU Desa pada 2014, desa-desa di Indonesia telah mengalami peningkatan anggaran lebih dari empat kali lipat sejak tahun 2014—dari sekitar Rp356 juta (AU\$35.600) menjadi sekitar Rp1,5 miliar (AU\$151.000) per desa per tahun.



Seiring bertambahnya sumber daya, analisis yang dilakukan KOMPAK dan Bank Dunia menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia telah meningkatkan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan. Meskipun anggaran untuk urusan pemerintahan umum, pekerjaan umum, dan penataan ruang (termasuk perumahan dan permukiman) masih mendominasi secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal di desa terus meningkat. Faktanya, sejak 2015, pengeluaran desa telah meningkat lebih dari dua kali lipat untuk kesehatan (2,5% menjadi 5,5%) dan pendidikan (1,7% menjadi 3,6%).

Meskipun demikian, banyak desa terbebani dengan peningkatan tanggung jawab untuk mengelola alokasi anggaran yang lebih besar. Kapasitas staf yang terbatas, sistem perencanaan dan penganggaran yang rumit atau tidak memadai, dan berbagai otoritas/pemangku kepentingan yang menerbitkan berbagai peraturan adalah beberapa kendala yang dihadapi desa.

Tuntutan untuk menangani pandemi COVID-19 dengan cepat turut menambah beban desa. Misalnya, Keputusan Menteri Desa yang memungkinkan pemerintah desa menggunakan Dana Desa untuk bantuan tunai, khususnya BLT-Dana Desa, bantuan tunai untuk pekerjaan, layanan kesehatan, dan tindakan pengendalian COVID-19 menambah kompleksitas peraturan yang sudah menumpuk.

Sejak awal pandemi, KOMPAK telah memanfaatkan program yang ada terkait penguatan kecamatan dan desa (Kecamatan and Village Strengthening/KVS) untuk membantu pemerintah desa menangani COVID-19. KOMPAK juga telah mengadaptasi model PTPD-nya, sehingga kecamatan memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa dalam menganggarkan, merencanakan, dan melaksanakan penanganan COVID-19. Fokus KOMPAK dalam mendukung pemerintah desa selama pandemi telah berkontribusi pada peningkatan dana yang tersedia untuk menangani dan membantu menetapkan target pendanaan untuk mendukung kelompok rentan yang terkena dampak pandemi paling parah.

KEMAJUAN DAN TANTANGAN



1,7 juta dolar Australia

Total pengeluaran program antara Januari dan Juni 2020 (dari anggaran tahunan AU\$1,39 juta).



123%

Tingkat pengeluaran (pengeluaran/ anggaran) untuk Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020.



92%

Kegiatan dalam Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020 telah selesai.



99%

Kegiatan yang telah selesai memenuhi atau melebihi ekspektasi.

FOKUS	AKTIVITAS	STATUS	RISIKO/ TANTANGAN
Nasional	<p>Memberikan bantuan teknis kepada Kemendagri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menerbitkan kebijakan terkait revisi anggaran desa (APB Desa) untuk penanganan COVID-19. • Menyusun pedoman bagi camat untuk memantau dan merespons penanganan COVID-19. • Menyusun pedoman bagi fasilitator PTPD untuk merevisi APB Desa dan memfasilitasi bantuan langsung tunai kepada kelompok rentan dengan Dana Desa. 	Selesai	●
Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi anggaran desa (APB Desa). • Memfasilitasi bantuan langsung tunai kepada kelompok rentan dengan Dana Desa. • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerbitkan perubahan anggaran secara daring, penerima bantuan langsung tunai, dan membangun mekanisme pengawasan atau pengaduan. • Melakukan perencanaan bersama dengan fasilitas kesehatan, khusus di Papua dan Papua Barat. 	<p>Selesai (luar Papua Barat)</p> <p>Lebih dari setengah telah selesai (Papua Barat)</p>	●

Mendukung pemerintah desa membentuk Gugus Tugas COVID-19 dan mengawasi kegiatan penanggulangannya

Sembilan puluh lima persen pemerintah desa di wilayah kerja KOMPAK telah membentuk Gugus Tugas COVID-19 pada Juni 2020—diubah pada Juli 2020 menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Satgas ini membantu pemerintah desa mengawasi penanganan pandemi di desa—termasuk mengidentifikasi penerima manfaat untuk program Bantuan Langsung Tunai atau Program Padat Karya Tunai, penyuluhan kesehatan, dan sosialisasi menjaga jarak antarwarga. Adapun desa-desa yang tidak membentuk Gugus Tugas COVID-19 berada di

Asmat (11) dan Fakfak (3) di wilayah Papua. Akan tetapi, jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak karena 52 dari 146 desa di Papua dan Papua Barat tidak dapat diakses oleh staf survei KOMPAK.

Hampir semua Satgas memiliki anggota yang terdiri atas unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Meskipun KOMPAK tidak mengumpulkan data tentang gender, lebih dari 75 persen Satgas memasukkan bidan desa dan/atau anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang menunjukkan partisipasi perempuan.

Hanya sekitar sepertiga desa yang mengoordinasikan penanganan COVID-19 dengan desa atau lembaga lainnya. Sulawesi Selatan masuk dalam kategori provinsi yang melakukan koordinasi dengan baik, sementara Nusa Tenggara Barat dan Papua dikategorikan kurang terkoordinasi. Namun, di Nusa Tenggara Barat, desa-desa mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah kecamatan melalui PTPD, yang juga membantu dalam koordinasi antardesa.

Pandemi di Papua: Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik Membantu Desa Sabron Sari Memerangi COVID-19

Kasus positif COVID-19 pertama di Provinsi Papua terjadi pada akhir Maret 2020 di Desa Sabron Sari, Kecamatan Sentani Barat, Papua. Menurut Marwan Hashim, Kepala Desa Sabron Sari, salah satu warga desanya baru saja pulang umrah. Ketika dites, warga ini ternyata positif virus COVID-19.

Menanggapi temuan itu, Marwan kemudian mengumpulkan informasi dan mengecek regulasi untuk mendanai kegiatan sosialisasi, pengadaan dan penyemprotan disinfektan, serta pembentukan Gugus Tugas COVID-19 desa. Menurutnya, saat itu belum ada surat edaran bupati. Artinya, tidak ada instruksi resmi sama sekali. Namun, desa harus segera mengambil keputusan untuk menangani situasi ini.

Dalam periode ini, KOMPAK memberikan dukungan kepada pemerintah desa di empat kabupaten di Provinsi Papua. Dukungan tersebut antara lain membantu pemerintah desa membentuk Satgas COVID-19—termasuk membuat pedoman bersama Pemerintah Provinsi Papua bagi kepala desa, masyarakat, dan Satgas COVID-19 desa. Dukungan ini memberikan kepada pemerintah desa sistem untuk merevisi anggaran, memperluas program perlindungan sosial, dan menargetkan respons layanan kesehatan masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, KOMPAK telah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di Provinsi Papua melalui pelatihan dan bantuan teknis untuk perencanaan dan penganggaran, penyiapan dan penerapan Sistem Informasi Desa (SID), dan penguatan pemerintah kecamatan untuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa. Inisiatif ini memungkinkan pemerintah desa bergerak cepat dalam merespons pandemi.

Menurut Marwan, pemerintah desanya dengan segera meluncurkan BLT-Dana Desa untuk keluarga penerima manfaat yang terdampak COVID-19. Desa memiliki catatan akurat dan lengkap tentang individu serta rumah tangga miskin dan rentan yang tersimpan dalam Sistem Informasi Desa (SIO Papua). Data ini memungkinkan pemerintah untuk memverifikasi penerima manfaat dan menyalurkan dana. Marwan menyatakan desanya siap menyalurkan BLT-Dana Desa tahap ketiga kepada 146 kepala keluarga.

KOMPAK juga mendukung BAPPEDA Provinsi Papua untuk menyusun Rencana Aksi Tanggap COVID-19 dibantu oleh pemerintah daerah dengan menganalisis kondisi pandemi terkini. Andry, Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan BAPPEDA menjelaskan, "Setiap dua minggu kami mengevaluasi situasi dan penanganan COVID-19. Berdasarkan evaluasi tersebut, kami forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) menyepakati kebijakan yang perlu dirumuskan melalui Surat Edaran Gubernur untuk dilaksanakan oleh kabupaten sampai desa. Di titik inilah KOMPAK memiliki peran yang krusial."

Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah desa untuk merevisi anggaran dan rencana kerja desa serta menyalurkan BLT-Dana Desa

Dengan dukungan teknis KOMPAK, pemerintah desa merevisi dokumen perencanaan dan anggaran (APB Desa) untuk penanganan COVID-19. KOMPAK menyusun dan menyosialisasikan pedoman serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi instansi kecamatan dan kabupaten. KOMPAK berupaya mengadaptasi dan memperkuat mekanisme yang ada di desa untuk mengelola bantuan sosial, seperti Gugus Tugas COVID-19, fasilitator PASH, kelompok perempuan, dan sistem informasi desa. Selain itu, KOMPAK juga mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi fasilitator PTPD untuk memberikan bimbingan teknis yang dibutuhkan desa

dalam merevisi APB Desa, pendataan, verifikasi penerima BLT-Dana Desa, dan penanganan tanggap darurat COVID-19.

Penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kegiatan baru bagi banyak desa. Sebelum COVID-19, bantuan langsung tunai yang menggunakan APB Desa tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan menduplikasi atau tumpang tindih dengan program bantuan sosial (bansos) lainnya. Akibatnya, desa membutuhkan pedoman yang jelas, dan KOMPAK memberikan dukungan guna mengelola pendekatan baru untuk bantuan sosial ini secara efektif. Secara khusus, KOMPAK fokus untuk mendukung pelaksanaan check and balance (saling mengawasi dan mengimbangi) yang baru diamanatkan untuk mencegah duplikasi, inefisiensi, atau penipuan.

Penyusunan pedoman COVID-19 untuk pemerintah desa

KOMPAK mendukung penyusunan pedoman untuk membantu desa merevisi APB Desa dan mengelola bantuan langsung tunai (BLT-Dana Desa). Upaya ini merupakan kolaborasi dengan Bappenas, Kemendesa PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu serta memanfaatkan keahlian dari kegiatan unggulan KOMPAK lainnya (pedoman lainnya diprofilkan di bagian Pengelolaan Keuangan Publik, SID, dan Akuntabilitas Sosial).

Pedoman tersebut disebarluaskan ke seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa di wilayah kerja KOMPAK serta menjadi acuan bagi 75.000 desa di Indonesia. KOMPAK menindaklanjuti pendistribusian pedoman ini dengan mengadakan pelatihan bagi petugas kecamatan dan desa di kabupaten dampingan KOMPAK.

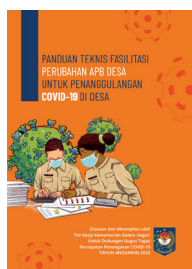
Revisi anggaran desa dan rencana kerja berdasarkan Survei Desa KOMPAK

Berdasarkan Survei Desa KOMPAK (sekitar 484 desa yang disurvei), semua desa dampingan KOMPAK telah merevisi APB Desanya pada Desember 2020.

Hampir semua desa telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan langsung tunai, penanganan dan pencegahan COVID-19, serta sosialisasi pesan-pesan kesehatan. Sekitar tiga perempat desa juga mengalokasikan anggaran untuk pendataan warga, kemungkinan besar diperuntukkan bagi

pemutakhiran data untuk program bansos. Namun, anggaran untuk bantuan padat karya dan non-tunai seperti untuk distribusi makanan masih terbilang rendah.

Publikasi: Penguatan Kecamatan dan Desa



Panduan Teknis Fasilitasi Perubahan APB Desa untuk Penanggulangan COVID-19 di Desa

Pedoman ini (dan sistem terkait) bertujuan untuk membantu pemerintah desa mengalokasikan ulang anggaran desa untuk penanganan dan kesiapsiagaan pandemi COVID-19. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lainnya untuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa, khususnya fasilitator pemerintahan desa (PTPD) di tingkat kecamatan.

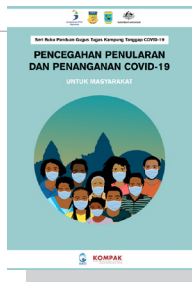
Diterbitkan: **Juli 2020**



Buku Pedoman Pencegahan Penularan dan Penanggulangan COVID-19 bagi Kepala Desa di Papua

Buku ini memberikan panduan kepada kepala desa di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penularan dan penanggulangan COVID-19.

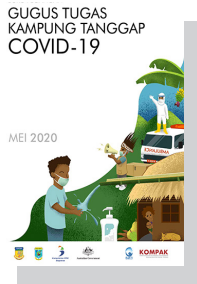
Diterbitkan: **Juni 2020**



Buku Pedoman Pencegahan Penularan dan Penanggulangan COVID-19 bagi Masyarakat di Papua

Buku ini memberikan informasi tentang penanggulangan COVID-19 dan bagaimana masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mencegah penyebaran/penularan virus.

Diterbitkan: **Juni 2020**



Buku Pedoman Gugus Tugas Kampung Tanggap COVID-19

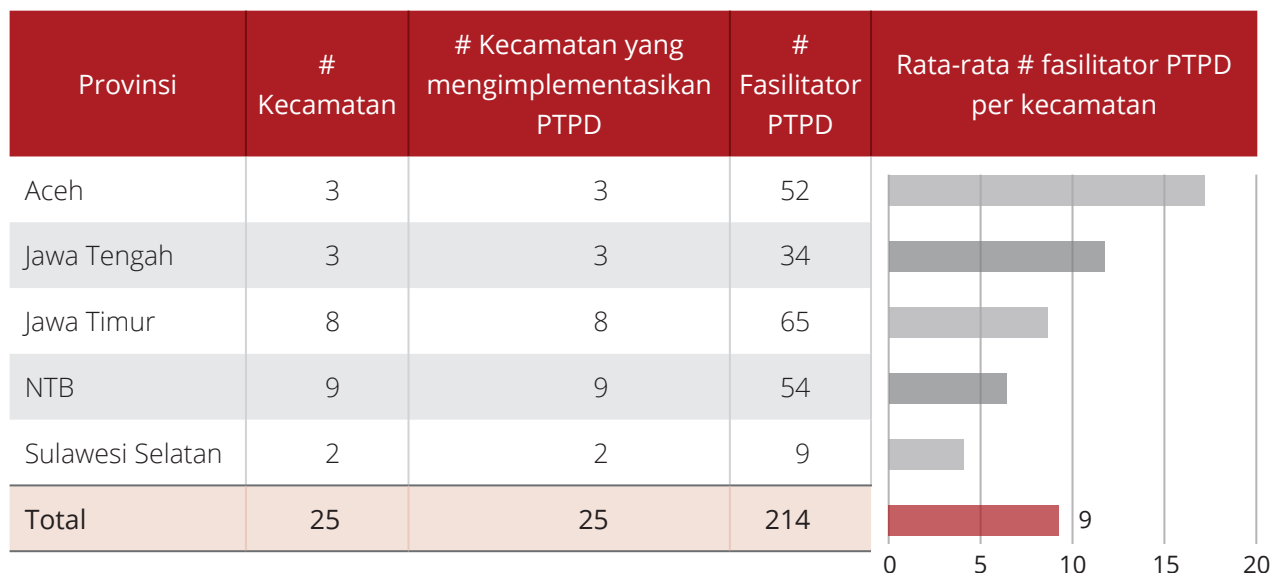
Buku panduan ini memuat peraturan, tata laksana, dan pedoman pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di tingkat desa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Diterbitkan: **Juni 2020**

3.1 Meningkatkan Cakupan dan Mendukung Pelembagaan Model Pemerintahan Kecamatan dan Desa (PTPD dan PbMAD)

Pada 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan Strategi Nasional Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD). Strategi ini memperkenalkan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dan model pembelajaran mandiri desa (Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa/PbMAD). Sejak awal, KOMPAK telah menjadi mitra utama dalam pengembangan dan implementasi PTPD dan PbMAD.

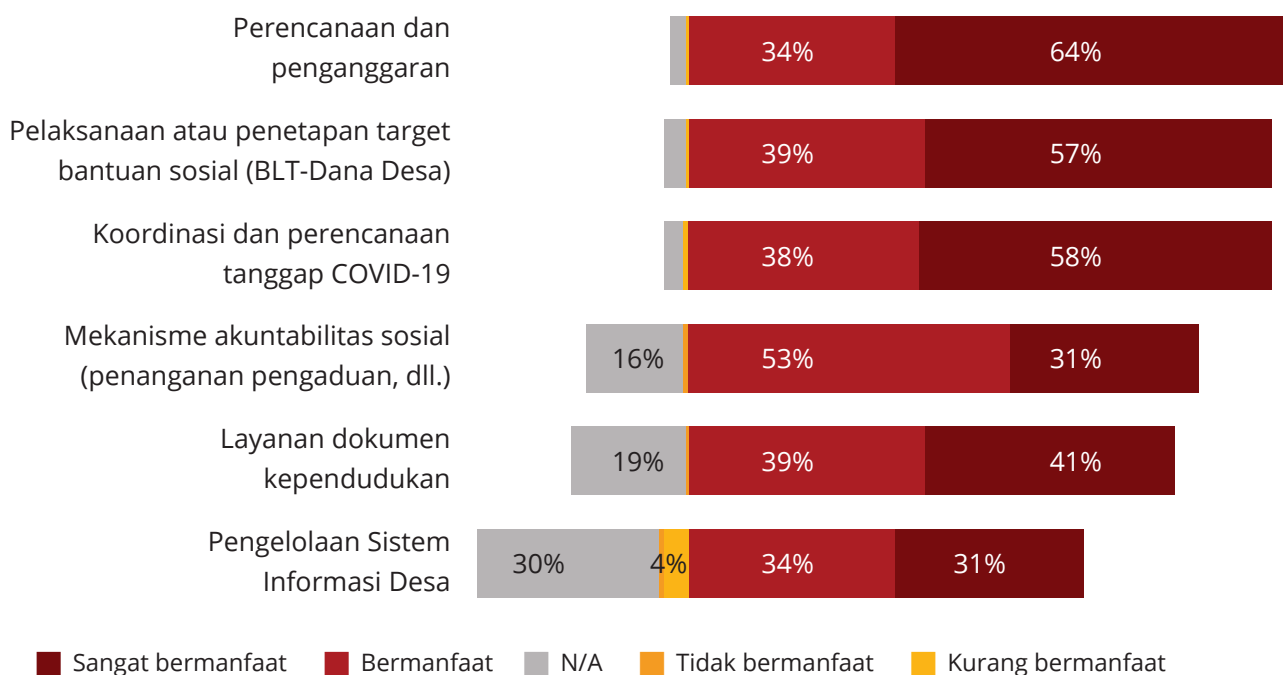
Cakupan kepegawaian PTPD di kecamatan dampingan KOMPAK (di luar Papua dan Papua Barat)



Sebagai bagian dari penanganan COVID-19, desa-desa di Indonesia mendapat tugas baru untuk menangani dan mengurangi dampak pandemi di lingkungan mereka dan di masyarakat. Dalam situasi ini, banyak pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling terkena dampak sambil mematuhi kebijakan nasional yang tumpang tindih—termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sebelum pandemi, KOMPAK telah melakukan berbagai upaya bagi kecamatan untuk memberikan dukungan yang efektif kepada desa, antara lain melalui model PTPD dan PbMAD. Ketika desa diberi mandat untuk melakukan kegiatan penanganan COVID-19, mekanisme dukungan kecamatan ini menjadi lebih berguna untuk memberikan bantuan teknis kepada desa.

Penilaian KOMPAK menunjukkan model PTPD dan PbMAD efektif dalam membantu pemerintah desa menyusun rencana kesiapsiagaan dan menangani pandemi. Survei KOMPAK pada Desember 2020 menemukan bahwa hampir semua desa dampingan KOMPAK, di luar wilayah Papua dan Papua Barat, menilai bantuan fasilitator PTPD bermanfaat atau sangat bermanfaat, terutama dalam membantu pemerintah desa pada perencanaan dan penganggaran (98%), pelaksanaan atau penetapan target bantuan sosial (BLT-Dana Desa) (96%), dan koordinasi serta perencanaan tanggap COVID-19 (96%).

Seberapa membantu [pemerintah desa] Anda dalam menemukan layanan yang diberikan oleh fasilitator kecamatan dan PTPD untuk: % tanggapan desa (n = 345 desa)

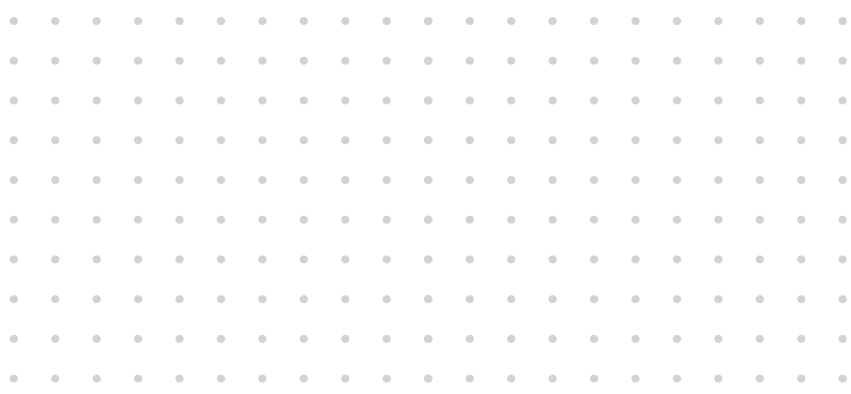


Sepanjang tahun 2020 KOMPAK telah merencanakan perluasan dan pelembagaan kegiatan PTPD dan PbMAD di tingkat nasional dengan memberikan masukan pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). P3PD adalah program nasional untuk mengembangkan kapasitas aparatur desa yang didanai oleh Bank Dunia. Pemerintah berencana untuk menerapkan P3PD di 100 kabupaten dan 10 hingga 15 kecamatan di setiap kabupaten pada tahun pertama. Penerapan ini berarti peningkatan perluasan untuk model PTPD dan PbMAD. KOMPAK memberikan masukan desain, pedoman program, dan pemetaan pemangku kepentingan. Selain itu, sesi transfer pengetahuan juga telah dilakukan KOMPAK dengan Kemendagri.

Cakupan, Replikasi, dan Pelembagaan Model PTPD

Provinsi	Kabupaten	# Kecamatan	Kecamatan yang mengimplementasikan PTPD	
			#	%
Aceh	Aceh Barat	12	4	33%
	Bener Meriah	10	6	60%
	Bireuen	17	17	100%
Jawa Tengah	Brebes	17	1	6%
	Pekalongan	19	1	5%
	Pemalang	14	14	100%
Jawa Timur	Bondowoso	23	23	100%
	Lumajang	21	2	10%
	Pacitan	12	8	67%
	Trenggalek	14	4	29%
Nusa Tenggara Barat	Bima	18	18	100%
	Lombok Timur	21	21	100%
	Lombok Utara	5	5	100%
	Sumbawa	24	24	100%
Sulawesi Selatan	Bantaeng	8	3	38%
	Pangkajene dan Kepulauan	13	1	8%
Total		248	152	60%

Catatan: tidak tersedia informasi untuk anggaran di wilayah Kabupaten Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan



Total anggaran kabupaten untuk 2020 (APBD) (dalam miliar rupiah)	Alokasi untuk kecamatan	Apakah wilayah memiliki	
		Kebijakan/peraturan delegasi wewenang dari bupati ke camat	Alokasi anggaran untuk kecamatan
1.389,81	2%	●	●
1.041,74	2%	●	●
2.048,09	0%	●	●
3.220,78	2%	●	●
2.256,23	3%	●	●
2.782,37	3%	●	●
2.079,28	3%	●	●
2.235,11	2%	●	●
1.671,46	2%	●	●
1.951,64	3%	●	●
1.592,79	3%	●	●
3.130,00	2%	●	●
904,73	2%	●	●
1.667,33	4%	●	●
		●	●
		●	
27.971	2%	16	15

P3PD akan menerapkan aspek-aspek penting dari pendekatan PTPD dan PbMAD serta memastikan perluasannya dapat berjalan secara konsisten. P3PD akan membantu melembagakan fasilitator Di tingkat daerah, KOMPAK telah mendukung pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan tentang pembentukan PTPD dan PbMAD. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas PTPD untuk penguatan sektoral di desa telah dimulai, seperti kegiatan pelatihan LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa) untuk PTPD di Aceh.

Menurut Survei Desa KOMPAK pada Desember 2020, dari 248 kecamatan (yang mendapatkan pendampingan dan yang tidak) di kabupaten wilayah kerja KOMPAK di luar Papua dan Papua Barat, sebanyak 61% atau 152 kecamatan telah menerapkan PTPD, dengan cakupan 100% di NTB.

3.2 Memperkuat Peran Koordinasi dan Pendampingan Kecamatan dalam Mendukung Pemberian Layanan ke Desa-Desa (Khususnya di Papua dan Papua Barat)

Dengan adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia, kecamatan memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan desa dan mengoordinasikan pemberian layanan dasar. Penambahan peran ini tentu memerlukan peningkatan kapasitas kecamatan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan nasional, kewenangan dan bimbingan yang jelas, serta alokasi dana yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Di wilayah kerja KOMPAK, 93% kecamatan telah melakukan rapat koordinasi dengan unit layanan dalam satu tahun terakhir. Walaupun demikian, frekuensi pertemuan bervariasi dengan sekitar setengah kecamatan melakukan dua sampai enam kali rapat koordinasi per tahun.

Pada 2019, KOMPAK dan Bappenas bekerja sama untuk menyusun desain percontohan Distrik Membangun, Membangun Distrik (DMMD) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yang diadaptasi dari model PTPD KOMPAK. Tujuan program ini adalah memperkuat kecamatan dalam mengawasi pemberian layanan dasar, pemberdayaan masyarakat asli, kewirausahaan, dan pertumbuhan daerah. DMMD merupakan pendekatan konkret untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan

Papua Barat. Untuk mendukung pelaksanaan rintisan DMMD tahun 2020, KOMPAK melakukan kegiatan pelatihan di 13 kecamatan di Jayapura.

3.3. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Inklusif dalam Pemberian Layanan

Perencanaan dan penganggaran partisipatif, yang secara ekstensif diakomodasi dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang), merupakan forum yang ditujukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, Musrenbang menjadi terlalu formal, tunduk pada golongan elit—terutama laki-laki, serta membatasi partisipasi secara lebih substansial. Akibatnya, hasil Musrenbang menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya, serta dapat menghambat partisipasi masyarakat di masa yang akan datang.

Menyikapi keterbatasan proses Musrenbang tersebut, pendekatan Musrenbang Inklusif yang diusung KOMPAK merupakan kegiatan musyawarah khusus dan tersendiri yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang reguler. Cara ini memungkinkan perempuan dan kelompok rentan lainnya—terutama masyarakat miskin, anak-anak, dan penyandang disabilitas, dapat menyuarakan aspirasi dan menyampaikan usulan rencana kegiatan mereka kepada pemerintah. Adapun 75% desa dampingan KOMPAK di luar wilayah Papua melaksanakan Musyawarah Khusus pada 2020 dengan cakupan terbesar di Sulawesi Selatan (88%) dan Nusa Tenggara Barat (86%).

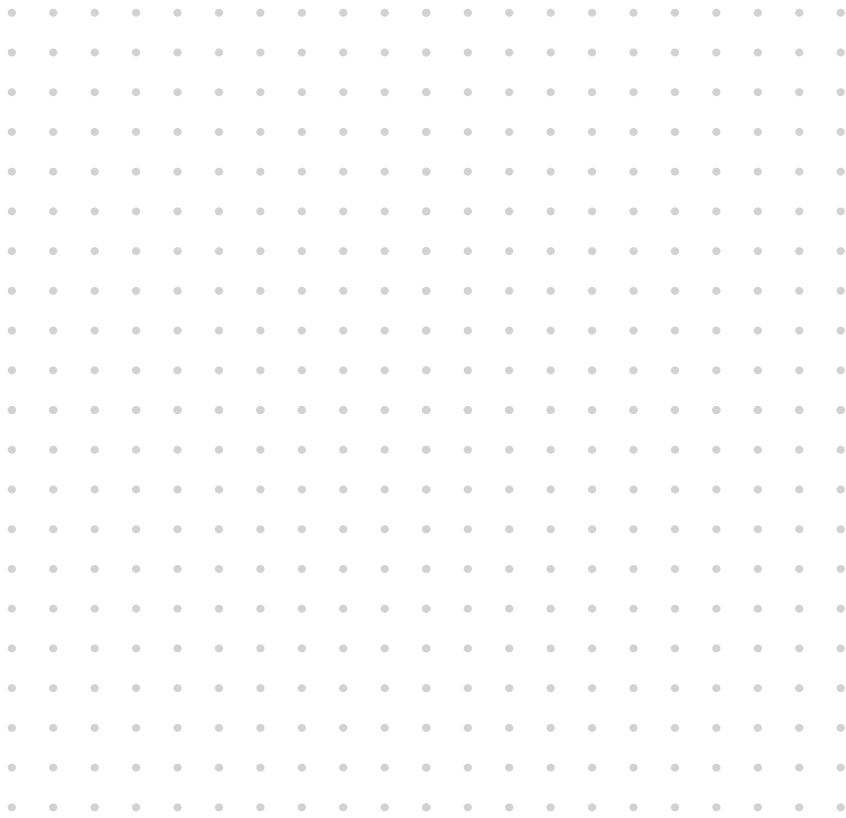
Cakupan Musrenbang Inklusif di Desa Dampingan KOMPAK

(n=345)	Ya, difasilitasi oleh BPD	Ya, difasilitasi oleh BPD dan perangkat desa	Ya, difasilitasi oleh perangkat desa	Tidak diimplementasikan
Aceh	20%	32%	14%	33%
Jawa Tengah	9%	9%	18%	64%
Jawa Timur	12%	55%	15%	19%
NTB	13%	26%	47%	14%
Sulawesi Selatan	18%	59%	12%	12%
Total	14%	36%	21%	28%

Selama masa pandemi, forum partisipasi masyarakat menjadi makin penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan penanganan pandemi, khususnya dalam menentukan penerima BLT-Dana Desa yang berhak. Untuk mendukung forum ini, KOMPAK fokus pada penguatan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pemberian pedoman, pelatihan, dan mekanisme akuntabilitas sosial. Topik pembahasan dalam musyawarah desa antara lain adalah penetapan revisi APB Desa, penetapan dan verifikasi data penerima bantuan sosial yang berhak. Forum tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan pengaduan warga, khususnya yang terkait dengan BLT-Dana Desa. Dukungan ini akan dibahas lebih lengkap dalam Akuntabilitas Sosial di bagian selanjutnya.

Evaluasi KOMPAK tahun 2020 menunjukkan perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk model Musyawarah Khusus, meskipun model tersebut terbukti berhasil meningkatkan partisipasi kelompok sasaran. Pengembangan ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan menjangkau kelompok rentan di luar lingkaran kelompok terdekat, keterlibatan lebih aktif dari organisasi berbasis kelompok lokal—khususnya organisasi penyandang disabilitas dan sejenisnya. Selain itu, perbaikan telah dilakukan dalam pelacakan dan pelaporan kembali rencana kegiatan yang dihasilkan forum untuk memastikan pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawabannya dan para peserta dapat melihat bahwa masukan mereka telah dipertimbangkan dan, jika mungkin, ditindaklanjuti.

Adapun untuk tujuan jangka panjang, KOMPAK mendukung kegiatan penguatan kapasitas desa dalam perencanaan inklusif dan melembagakan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat melalui BPD, yang secara khusus berfokus pada aspirasi perempuan dan penyandang disabilitas.







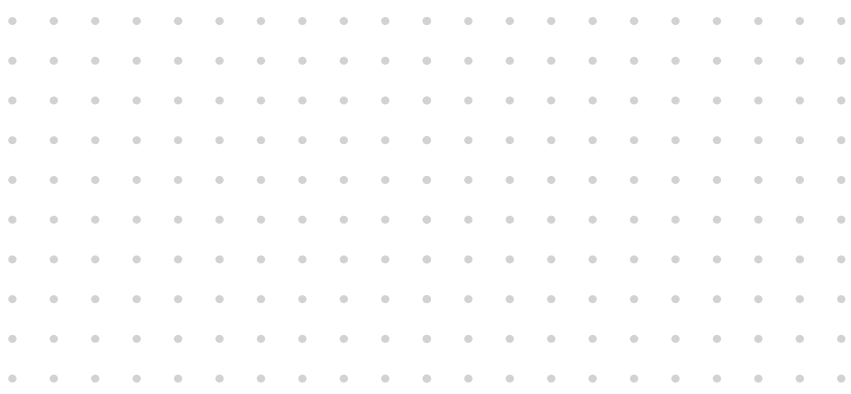
Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa

Prioritas COVID-19: Meningkatkan pengumpulan dan penggunaan data kelompok rentan dalam Sistem Informasi Desa untuk memungkinkan kegiatan penanganan COVID-19 yang lebih tepat sasaran.

RINGKASAN PENCAPAIAN

KOMPAK membantu pemerintah pusat dan daerah (desa dan kabupaten) untuk membangun dan memperkuat penggunaan SID dalam perencanaan dan penganggaran desa, penetapan target program bantuan sosial dan kemiskinan, serta untuk mendukung pemantauan dan pelaporan program. Sistem ini terbukti menjadi alat yang penting untuk mendokumentasikan penerima manfaat program bantuan sosial selama pandemi. Hingga Desember 2020, dua dari tiga desa mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki mekanisme untuk memverifikasi data kelompok rentan. KOMPAK juga telah menguji coba penggunaan data desa untuk memverifikasi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk program perlindungan sosial.



ANALISIS SITUASI

UU Desa mengarahkan semua desa untuk membangun Sistem Informasi Desa (SID). Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan isi SID, KOMPAK telah menggunakan kesempatan ini untuk membantu desa merancang dan mengimplementasikan SID guna menyediakan data yang akurat untuk perencanaan dan penganggaran, menetapkan target program dan layanan (kesehatan, pendidikan, dan PASH), serta mendukung pemantauan dan pelaporan. Sebagian besar desa dampingan KOMPAK, yaitu sekitar 90% pada Desember 2020, telah memiliki sistem informasi desa digital (daring atau luring) dibandingkan desa-desa lain yang masih menggunakan sistem data manual dengan dokumen cetak.

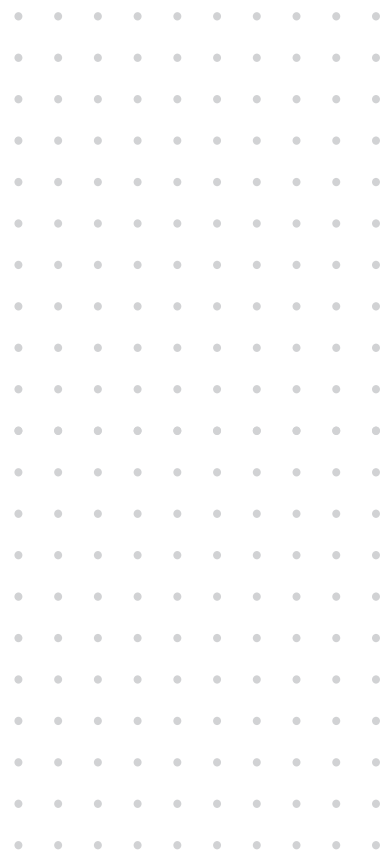
Minimnya peraturan terkait pelaksanaan Sistem Informasi Desa telah menimbulkan berbagai tafsir dan definisi oleh pemerintah daerah, yang harus menerapkan SID. Akibatnya, tidak ada keseragaman jenis data yang dikumpulkan dari desa. Masalah ini bisa menjadi kendala dalam rekapitulasi himpunan data tingkat desa untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Sistem informasi desa ini telah terbukti menjadi alat penting dalam merespons COVID-19. SID memungkinkan pemerintah desa untuk secara cepat dan akurat mengidentifikasi penerima manfaat potensial melalui BLT-Dana Desa—termasuk masyarakat yang belum terdaftar dalam bantuan sosial, yang hidup dalam kemiskinan atau yang baru saja kehilangan pekerjaan, termasuk juga kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas serta lansia. Seluruh level pemerintahan membutuhkan data yang akurat untuk dapat mengoordinasikan pemberian bantuan sosial, kesehatan, dan program pemulihan ekonomi.

Jenis sistem informasi desa di desa dan kabupaten wilayah kerja KOMPAK

Provinsi	Kabupaten	Total desa	Ya, daring	Ya, luring
Aceh	Aceh Barat	27	100%	0%
	Bener Meriah	35	100%	8%
	Bireuen	36	81%	8%
Jawa Tengah	Brebes	12	100%	0%
	Pekalongan	9	100%	0%
	Pemalang	12	8%	92%
Jawa Timur	Bondowoso	28	100%	0%
	Lumajang	20	95%	5%
	Pacitan	27	89%	11%
	Trenggalek	20	100%	0%
Nusa Tenggara Barat	Bima	29	55%	41%
	Lombok Timur	40	78%	23%
	Lombok Utara	13	85%	8%
	Sumbawa	20	5%	95%
Papua	Asmat	20	5%	60%
	Boven Digoel	5	40%	40%
	Jayapura	19	63%	37%
	Nabire	10	30%	60%
Papua Barat	Fakfak	13	100%	0%
	Kaimana	15	7%	0%
	Manokwari Selatan	34	91%	9%
	Sorong	23	0%	57%
Sulawesi Selatan	Bantaeng	10	10%	30%
	Pangkajene dan Kepulauan	7	29%	14%
Total		484	61%	25%

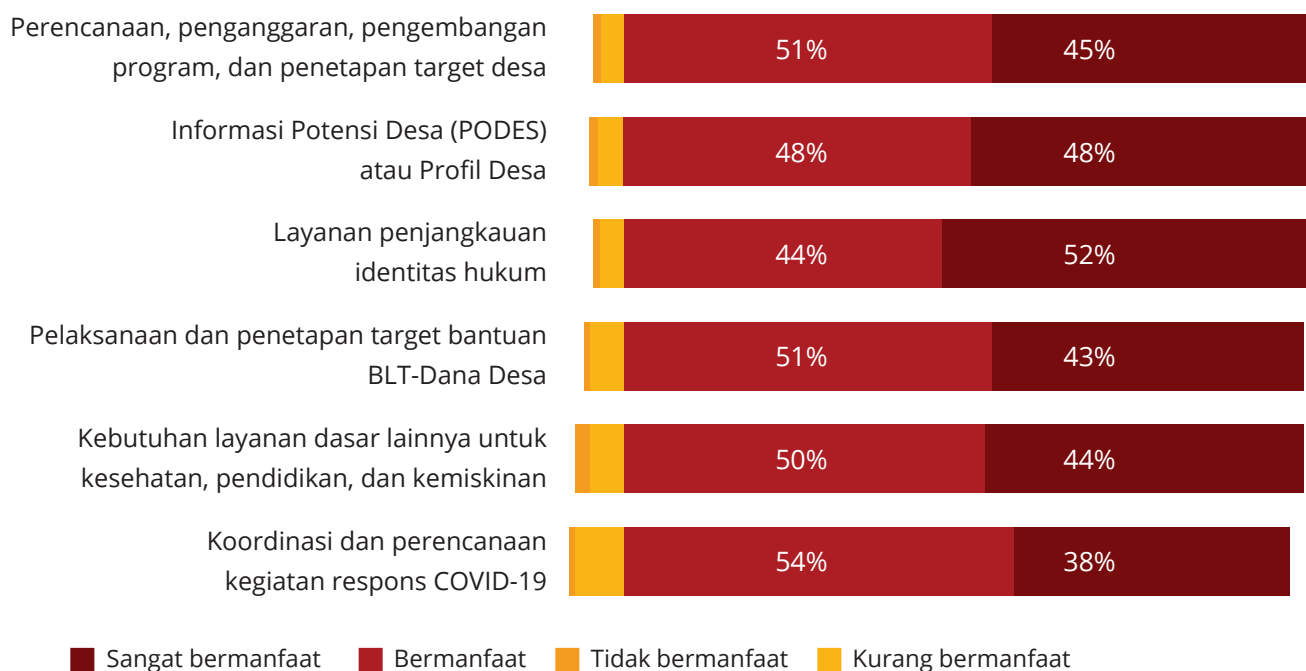
Manual, sistem dokumen kertas	Tanpa SID	Model Sistem Informasi Desa apa yang digunakan?
0%	0%	PRODESKEL, SIG Kominsa Aceh (SIGAP)
0%	0%	Sistem Informasi Desa Bener Meriah
3%	8%	SIG Kominsa Aceh (SIGAP)
0%	0%	PRODESKEL
0%	0%	PRODESKEL, SIDEKA
0%	0%	PRODESKEL
0%	0%	SAID
0%	0%	Combine Resource Institution (CRI)
0%	0%	Combine Resource Institution (CRI)
0%	0%	PRODESKEL, CRI
0%	3%	OPEN SID
0%	0%	PRODESKEL, OPEN SID
8%	0%	Combine Resource Institution (CRI)
0%	0%	OPEN SID
20%	15%	SAIK/SAID Papua
20%	0%	SAIK/SAID Papua
0%	0%	SAIK/SAID Papua
10%	0%	SAIK/SAID Papua
0%	0%	SAIK/SAID Papua
93%	0%	Manual/Dokumen kertas
0%	0%	SAIK/SAID Papua
22%	22%	SAIK/SAID Papua
60%	0%	SIADEK, Manual/Dokumen kertas
57%	0%	SIADEK, Manual/Dokumen kertas
8%	2%	



Sasaran pendampingan KOMPAK di sektor ini adalah agar desa memiliki himpunan data terkini untuk kelompok rentan sehingga ada lebih banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial untuk memitigasi dampak COVID-19. Data ini juga penting karena dapat membantu pemerintah desa merencanakan respons secara lebih akurat.

Seberapa bermanfaat Sistem Informasi Desa (atau yang setara)?

% tanggapan desa (n=376)



Penggunaan SID sebagai sumber data bantuan sosial menimbulkan berbagai kendala. Sistem data utama pemerintah terkait program perlindungan sosial adalah DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Menurut Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2020, “Dalam satu dekade terakhir, pemerintah telah melakukan upaya penting untuk mengembangkan platform yang mendata populasi miskin dan rentan. Pengembangan Basis Data Terpadu (BDT) pada 2011 yang saat ini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), merupakan inisiatif besar pertama untuk mengembangkan basis data tunggal dari sekitar 24 juta rumah tangga miskin dan rentan untuk digunakan oleh berbagai program.”¹⁴ Antarmuka pengguna untuk DTKS dikenal sebagai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Generasi Selanjutnya (SIKS-

14 Bank Dunia (2020). *Indonesia Public Expenditure Review*. P198. Diakses di: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review>

NG). DTKS bertujuan untuk mendata semua individu yang termasuk dalam kategori pendapatan pada 40 persen terbawah dan/atau penerima bansos. Pemerintah daerah dapat menggunakan dan memverifikasi data DTKS, tetapi perubahan hanya dapat dilakukan oleh kementerian atau melalui aplikasi daring kementerian untuk desa (SIKS-Droid).

Sistem informasi desa bertujuan untuk menyediakan data yang lebih akurat, terverifikasi, tervalidasi, dan termutakhir di tingkat desa. SID juga menyimpan informasi tentang penerima BLT-Dana Desa, dan desa dapat memberikan informasi ini untuk dimasukkan ke DTKS sehingga penerima berhak atas bantuan di program perlindungan sosial lainnya atau yang selanjutnya. Namun, sistem informasi desa belum terhubung dengan DTKS meskipun di beberapa daerah (seperti Kabupaten Bondowoso, Bireuen, Bantaeng, dan Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan) telah ada upaya untuk berbagi data dari DTKS dan sistem informasi PASH ke dalam SID untuk mendukung pemerintah daerah melaksanakan program pengentasan orang miskin. Program uji coba ini telah menghasilkan pelajaran dan model yang berharga untuk membantu pemerintah menstandarisasi dan memperluas penggunaan SID untuk memperbaiki data kemiskinan dan kependudukan.



KEMAJUAN DAN TANTANGAN



0,96 juta dolar Australia

Total pengeluaran program antara Januari dan Juni 2020
(dari anggaran tahunan AU\$0,93 juta)



103%

Tingkat pengeluaran (pengeluaran/
anggaran) untuk Revisi Rencana Kerja
Tahunan 2020



75%

Kegiatan dalam Revisi Rencana Kerja
Tahunan 2020 telah selesai



93%

Kegiatan yang diselesaikan telah
memenuhi atau melebihi ekspektasi.

FOKUS	AKTIVITAS	STATUS	RISIKO/ TANTANGAN
Nasional	Mengembangkan pedoman bersama Bappenas tentang pengumpulan data untuk sistem informasi desa terkait penduduk miskin dan rentan.	Selesai	●
Daerah	Memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah desa untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas sistem informasi desa agar dapat menyimpan himpunan data populasi yang rentan. • Memperbarui himpunan data desa untuk kelompok rentan dan rentan baru, seperti migran dan pengangguran. • Mengumpulkan dan melaporkan data spesifik COVID-19, termasuk melalui pengumpulan data daring (formulir/aplikasi daring). 	Selesai (di luar Aceh, Papua and Papua Barat) Lebih dari setengah telah selesai (di luar Aceh, Papua dan Papua Barat)	●

Meningkatkan pengumpulan dan penggunaan data kelompok rentan dalam sistem informasi desa untuk melakukan kegiatan penanganan COVID-19 yang lebih tepat sasaran

Sebanyak 95% pemerintah desa di lokasi yang dibantu KOMPAK telah membentuk Gugus Tugas COVID-19 pada Juni 2020. Gugus Tugas ini membantu pemerintah desa mengawasi penanganan pandemi lokal – termasuk mengidentifikasi penerima program BLT atau bantuan untuk pekerja, dan mensosialisasikan tentang kesehatan dan pembatasan jarak. Semua desa tanpa Gugus Tugas COVID-19 berlokasi di Asmat (11) dan Fakfak (3) di wilayah Papua; namun, jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, karena 52 dari 146 desa di Papua dan Papua Barat tidak dapat diakses oleh surveyor KOMPAK.

KOMPAK memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan dan analisis data sehingga kabupaten dan desa dapat memperbarui data DTKS. Pemerintah daerah menggunakan data DTKS untuk

mendaftar dan memantau penerima bantuan sosial dan program penanganan COVID-19 lainnya.

Pemutakhiran dilakukan di desa melalui sistem informasi desa dan kegiatan sosialisasi terkait, seperti oleh fasilitator PASH dan anggota Satuan Tugas Penanganan COVID-19, untuk mengidentifikasi dan mendata kelompok rentan. Pemutakhiran ini dimaksudkan agar penetapan sasaran program bantuan sosial lebih akurat dan lengkap, khususnya BLT-Dana Desa dan Program Padat Karya. Upaya ini juga membantu mencegah duplikasi bantuan sosial karena sistem informasi desa mencatat data penerima bantuan dan asal bantuan tersebut.

Meskipun belum ada kementerian yang secara khusus menangani sistem informasi desa, Bappenas saat ini memainkan peran kunci untuk SID melalui uji coba inisiatif Digital Monografi Desa (DMD).

Percontohan DMD merupakan peluang strategis yang bisa digunakan pemerintah untuk mengadopsi praktik SID KOMPAK ke dalam inisiatif nasional. Program ini merupakan langkah penting untuk mengakui peran desa dalam menghasilkan dan memperbarui data kemiskinan. Tujuan DMD adalah agar semua desa memiliki SID yang berfungsi untuk digunakan guna memperbarui DTKS.

Menyadari bahwa beberapa desa sudah menjalankan sistem yang berbeda, dan yang lainnya belum, Bappenas dengan dukungan KOMPAK mengembangkan prototipe yang disebut Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Desa, untuk desa-desa yang belum menerapkan SID. KOMPAK membantu Bappenas dengan desain keseluruhan percontohan DMD, pedoman operasional, dan materi pelatihan dengan menggunakan pengalaman dan pelajaran dari percontohan SID di wilayah kerja KOMPAK.

Bimbingan nasional, daerah, dan pelatihan untuk pemerintah daerah

Di tingkat nasional, KOMPAK memberikan masukan teknis untuk pengembangan buku saku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa. Masukan ini menyediakan sistem untuk desa-desa di seluruh Indonesia dan menguraikan strategi tentang cara mengidentifikasi dan mendata populasi rentan yang terkena dampak COVID-19. Buku panduan tersebut diterbitkan pada bulan Juni dan diproduksi setelah berkonsultasi dengan tujuh kementerian.

KOMPAK telah memfasilitasi pelatihan bagi 486 pejabat pemerintah daerah di tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten (25% perempuan) untuk menyosialisasikan panduan tersebut. KOMPAK juga mengadakan webinar untuk mendorong dialog dan sosialisasi kebijakan antara mitra kementerian dan pemerintah daerah.

KOMPAK mendukung pemerintah daerah untuk membuat berbagai peraturan dan kebijakan dalam rangka melembagakan praktik dan penggunaan sistem SID. Peningkatan kapasitas dalam kegiatan training of trainers/ToT (pelatihan bagi pelatih), diberikan kepada staf provinsi dan kabupaten. Di Aceh, pelatihan ini melibatkan fasilitator desa yang direkrut oleh Kemendesa PDTT untuk memastikan ketersediaan bantuan bagi pemerintah kabupaten dan desa dalam penggunaan SID di masa mendatang.

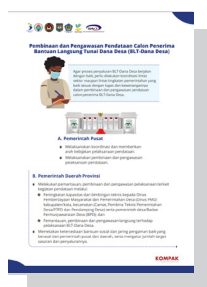
Daftar pedoman dan kebijakan yang disusun dengan bantuan KOMPAK



Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Pedoman ini mengonsolidasikan peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis dalam menyusun calon penerima manfaat mengikuti peraturan yang berlaku.

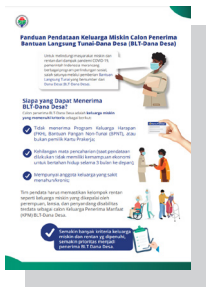
Diterbitkan: **Juni 2020**



Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa - Pamflet

Pamflet ini dirancang untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam pendampingan dan pengawasan pendataan calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.

Diterbitkan: **Juli 2020**



Panduan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa – Pamflet

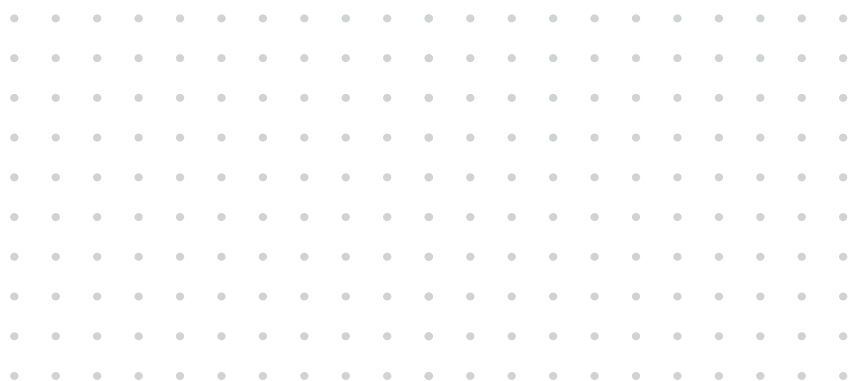
Pamflet ini dirancang sebagai ringkasan versi lengkap dari Buku Pedoman Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa. Pamflet ini dapat digunakan sebagai referensi singkat pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis penyusunan calon penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan: **Juli 2020**

Upaya pemerintah daerah memperbarui data kelompok rentan

Sejak 2018, KOMPAK terus memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten untuk menggunakan sistem informasi desa dalam membantu memverifikasi dan memperbarui jenis data DTKS. Selama pandemi COVID-19, upaya ini dipercepat karena tuntutan yang lebih besar terhadap data akurat yang diverifikasi oleh pemerintah desa dan masyarakat. KOMPAK telah membantu pemerintah kabupaten untuk menggunakan data yang telah divalidasi untuk memperbarui basis data DTKS dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Untuk menilai efektivitas bantuan KOMPAK, KOMPAK menyurvei pemerintah desa untuk menentukan apakah mereka secara aktif memperbarui data kelompok rentan untuk penanganan COVID-19. Di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, data DTKS kelompok rentan hampir semua telah dimutakhirkan (berkisar 96%–100% desa). Di Aceh, sekitar setengah desa dampingan KOMPAK (55%) melaporkan pemutakhiran data. Tingkat pemutakhiran data terendah ditemukan di desa di wilayah Papua (22%) dan Papua Barat (12%).



Apakah desa memverifikasi dan memvalidasi data kelompok rentan untuk basis data kemiskinan?

Provinsi	Desa	% DTKS terbaru	# data rumah tangga diperbarui SIKS-NG
Aceh	98	55%	2.950
Jawa Tengah	33	100%	24.779
Jawa Timur	95	100%	40.307
Nusa Tenggara Barat	102	96%	50.511
Papua	54	22%	2.254
Papua Barat	85	12%	226
Sulawesi Selatan	17	100%	6.049
TOTAL	484	69%	127.076

KOMPAK juga telah mendukung percontohan yang mengintegrasikan/menghubungkan sistem data karena menyadari pentingnya sistem data terintegrasi. Hal ini untuk meningkatkan akurasi dan data yang valid bagi perencanaan dan penganggaran, termasuk akurasi target bantuan sosial. Dengan demikian, dapat diketahui data yang lebih akurat dalam penyaluran bantuan sosial kepada kelompok miskin dan rentan yang paling membutuhkan. Pada 2020, KOMPAK membantu Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bantaeng untuk menghubungkan/mengintegrasikan sistem data berdasarkan penerapan model SAID di Bondowoso.¹⁵ KOMPAK membuat kerangka kelembagaan untuk kolaborasi lintas sektor (termasuk penyusunan peraturan daerah yang relevan seperti Kajian Satu Data di Pekalongan), mengidentifikasi jenis data dan himpunan data yang akan dihubungkan, dan menginisiasi pencocokan data SIAK dan DTKS di Kabupaten Bantaeng yang akan diverifikasi oleh desa-desa di kabupaten pada tahap selanjutnya.

¹⁵ Model SID di Bondowoso, yang dikenal sebagai Sistem Administrasi dan Informasi Desa – SAID, merupakan sistem data yang lebih terintegrasi. Melalui satu sistem, pemerintah desa, kecamatan, dan Bappenas dapat mengakses informasi dari satu sumber. Desa juga dapat membuat laporan dan menggunakan data untuk perencanaan dan penganggaran. Sistem ini mencakup data PASH dan memungkinkan layanan PASH disediakan secara daring. Selain itu, Bondowoso sedang mengembangkan sistem dengan data kesehatan ibu hamil dan bayi, di mana tanggal perkiraan kelahiran dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya (ambulans, tempat tidur rumah sakit). KOMPAK sedang mengerjakan sistem serupa di Pacitan dan Lumajang (Jawa Timur), Pekalongan (Jawa Tengah), Bantaeng (Sulawesi Selatan), dan Jayapura (Papua).

SAID Memastikan Warga Miskin dan Rentan Memperoleh Layanan Dasar Berkualitas

“Buat apa punya KTP. Saya sudah tua, *nggak* butuh KTP,” tukas Rumi (92) warga Desa Ambulu, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Bagi penduduk seusianya, memiliki KTP memang bukan perkara penting.

Sampai suatu ketika di bulan April 2020, saat Pemerintah Desa Ambulu melaksanakan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagai bentuk respons terhadap pandemi COVID-19, Rumi tercatat sebagai salah satu calon penerimanya. “Namun, saat kami melakukan pemadanan data pendataan dengan data kependudukan di SAID, ditemukan empat warga kami yang belum memiliki dokumen kependudukan. Salah satunya Ibu Rumi,” terang Didik, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ambulu.

Akhirnya Rumi dan ketiga warga lansia lainnya bersedia mengurus dokumen kependudukannya sebagai syarat untuk menerima BLT-Dana Desa. Pada 7 Juli 2020, Rumi dan 113 warga miskin yang terdampak COVID-19 menerima BLT-Dana Desa tahap ketiga sebesar Rp600.000.

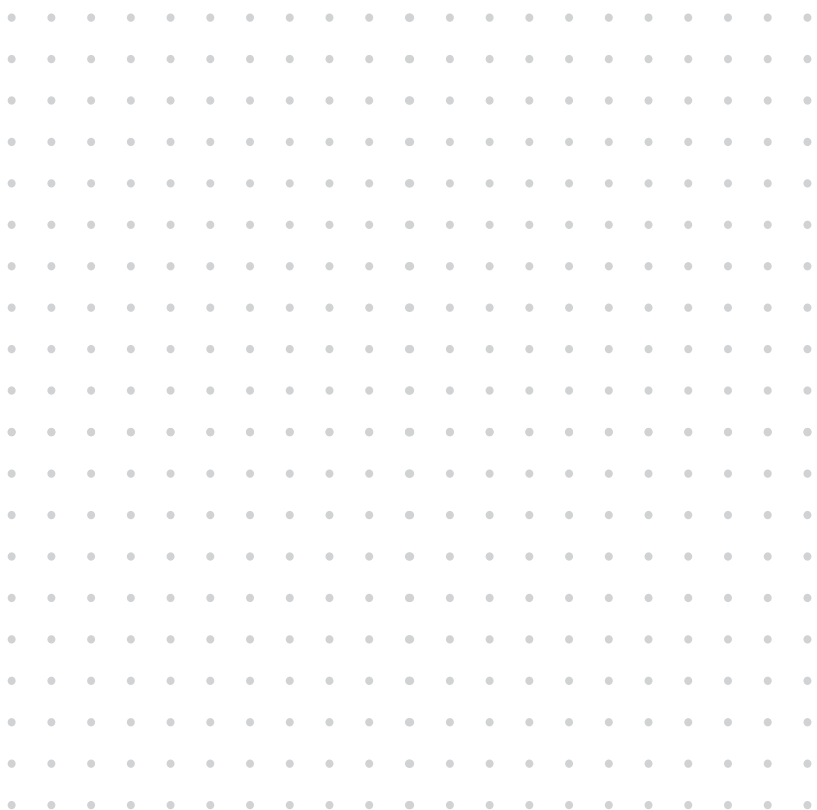
Mengurus layanan adminduk di Desa Ambulu kini makin mudah. Pada Desember 2019, Pemerintah Desa Ambulu meluncurkan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) daring yang terintegrasi dalam Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID). Melalui layanan secara daring ini, masyarakat cukup menyerahkan berkas persyaratan pembuatan dokumen kependudukan ke kantor desa. “Pencetakan dokumen kependudukan seperti KK dan Akta Kelahiran pun dapat dilakukan di kantor desa,” jelas Didik yang juga bertugas sebagai Fasilitator Adminduk Desa.

SAID sendiri merupakan sistem pengelolaan data dan informasi oleh pemerintah desa. SAID berisi data mengenai desa seperti profil, keuangan dan kegiatan pembangunan desa; data kependudukan; pemerintahan umum; serta kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Saat ini, seluruh 209 desa di Kabupaten Bondowoso telah mengembangkan dan memanfaatkan SAID.

Sejak Agustus 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso – dengan dukungan KOMPAK – melakukan revitalisasi SAID, salah satunya dengan menambah fitur layanan adminduk dan pemadanan data kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sampai Juni 2020, layanan adminduk daring Desa Ambulu telah menerbitkan 15 KK, 24 Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 12 Akta Kelahiran. "Saat ini tersisa empat keluarga yang masih dalam proses pengurusan KK. Maka diharapkan pada Juli 2020 seluruh 2.362 warga Desa Ambulu akan memiliki NIK," terang Didik.

Manfaat revitalisasi SAID juga dirasakan oleh pemerintah desa khususnya saat melakukan pemadanan DTKS dengan data kependudukan. Didik mengatakan bahwa pemadanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena kedua data tersebut dapat diakses melalui SAID. "Kami dapat mengetahui bahwa dari 114 penerima BLT-Dana Desa, ada 40 warga yang belum terdaftar dalam DTKS. Kami lakukan pemutakhiran DTKS melalui SAID sehingga di masa depan mereka bisa mendapat bantuan yang lebih berkelanjutan," jelas Didik.



Mendukung implementasi Aplikasi Desa Melawan COVID-19 yang diluncurkan oleh Kemendesa PDTT

Pada bulan Mei, Kemendesa PDTT meluncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID-19. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pendataan dan pelacakan desa untuk memantau data kesehatan, kehilangan pekerjaan, tingkat kemiskinan, dan bantuan sosial secara mingguan dan bulanan. Pendataan ini membantu untuk menunjukkan data secara real-time terkait penyebaran COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat serta memudahkan proses pelaporan atas kondisi desa terkait.

KOMPAK dan Bank Dunia memberikan masukan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Sejak diluncurkan, KOMPAK telah melatih 286 petugas (16% perempuan) dari lebih dari 250 desa di lima provinsi untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Menurut Survei Desa KOMPAK, satu dari tiga (33%) desa melaporkan penggunaan Aplikasi Desa Melawan COVID-19. Serapan tertinggi ditemukan di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, tetapi masih belum secara menyeluruh. Serapan terendah berada di wilayah Papua, dengan hanya sebagian kecil desa (<8 persen) yang menggunakan aplikasi tersebut.

Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan sistem informasi desa di Papua dan Papua Barat

Meskipun Papua dan Papua Barat masih tertinggal dari provinsi lain di wilayah kerja KOMPAK, kedua provinsi ini juga telah membuat kemajuan yang berarti. Ketika KOMPAK mulai bekerja di wilayah tersebut, desa-desa belum menerapkan sistem informasi desa. Saat ini, 106 dari 139 desa dampingan KOMPAK menggunakan SID untuk perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan layanan, seperti untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan penerima bantuan sosial sebagai respons COVID-19.

KOMPAK telah membantu meningkatkan sistem yang ada di Papua (Sistem Informasi Orang Papua, SIO Papua) dan Papua Barat (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus, SAIK+). Kedua sistem ini merupakan modifikasi dan penyempurnaan dari SAIK yang sudah

ada, menggunakan sistem teknologi informasi terkini dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. KOMPAK menyiapkan kedua sistem ini dengan tujuan agar dapat direplikasi dan dikembangkan.

SAIK+ menjadi tulang punggung rancangan program PROSPPEK yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 1.742 desa di Papua Barat.¹⁶ SIO Papua sedang dalam tahap awal replikasi oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Pada tahun 2020, KOMPAK mendukung pelebagaan SIO Papua dan SAIK+ melalui pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator dan melalui bantuan langsung dalam pengumpulan data. Di Papua Barat, sejak replikasi SAIK+ ke seluruh desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, KOMPAK fokus melatih 19 fasilitator SAIK+ dari instansi terkait di tingkat provinsi untuk melatih aparatur desa dan kader di kabupaten percontohan bukan dampingan KOMPAK sambil melanjutkan dukungannya di 4 kabupaten percontohan pada 2021. Pada 2020, 6.964 rumah tangga dari 13 desa di Papua Barat melakukan input ke dalam SAIK+. Di Papua, 41 desa sudah mulai melakukan pendataan 6.318 KK dan 29 desa sudah masuk ke dalam SIO Papua.

KOMPAK juga telah menghubungkan himpunan data SAIK kabupaten dengan basis data nasional untuk penerima manfaat kependudukan dan perlindungan sosial (seperti SIAK dan DTKS). Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah membuat kemajuan karena pada 2020, 34 desa telah menggunakan sistem informasi desa yang terhubung dengan basis data SIAK dan DTKS. Himpunan data terkait ini memberikan data yang lebih akurat untuk penetapan target penerima program bantuan sosial dan menjadi model untuk kabupaten lain.

16 Silakan merujuk ke Bagian PFM tentang Otsus untuk perincian pelaksanaan PROSPPEK dan dukungan KOMPAK di bidang ini.

Bergerak di Tengah Pandemi

Pemerintah Indonesia meningkatkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan yang terkena dampak COVID-19. Salah satu mekanisme utama penyaluran bantuan ini adalah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Untuk memastikan bantuan sosial sampai ke penerima yang tepat, pemerintah membutuhkan data penduduk setempat yang valid dan kredibel. Di Kabupaten Manokwari Selatan, pemerintah mengandalkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAIK) untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima BLT-Dana Desa.

SAIK adalah sistem informasi berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial, dan ekonomi setiap rumah tangga di desa. Sistem ini dikembangkan pada 2017 oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan dukungan dari KOMPAK dan mitra pelaksananya, Yayasan BaKTI. Sistem ini dapat beroperasi secara luring sehingga dapat digunakan di daerah terpencil yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.

Pemerintah menggunakan data SAIK sebagai dasar perencanaan dan penganggaran. Hal ini membantu menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat dan membantu mencapai sasaran penerima manfaat yang tepat. Saat ini, sekitar 100 desa di Papua dan Papua Barat menggunakan SAIK dalam proses perencanaan dan penganggaran.

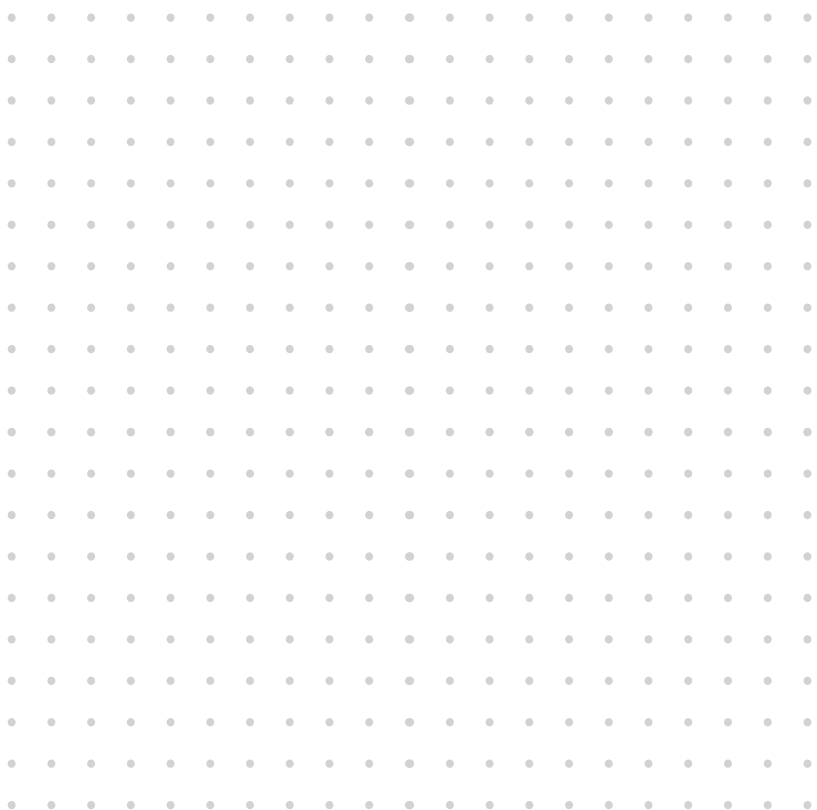
Ketika pemerintah pusat meluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial COVID-19 pada April 2020, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, yang bekerja sama dengan KOMPAK dan Yayasan BaKTI, dapat memanfaatkan data dari SAIK untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penerima bantuan sosial.

“Data SAIK kami gunakan dalam validasi data bantuan sosial karena dibuat langsung oleh para kader desa. Mereka adalah warga desa yang tentunya lebih mengetahui kondisi riil daerahnya,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Hengky Tewu.

Hengky menambahkan bahwa SAIK menyajikan data yang lengkap tentang kependudukan, kepemilikan aset, dan peringkat kesejahteraan. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19.

SAIK berkontribusi pada tercapainya 100% penyaluran BLT-Dana Desa di kabupaten ini. “Karena itulah, untuk validasi data bantuan sosial COVID-19, kami hanya mau menggunakan data SAIK yang kami percaya,” ungkap Kepala Distrik Ransiki, Bernard Mandacan.

Keberhasilan Manokwari Selatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa mendapat apresiasi dari Kemendesa PDTT. Menurut Sekjen Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Manokwari Selatan termasuk yang terbaik di Provinsi Papua Barat.







Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas Sosial

Prioritas COVID-19: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan COVID-19, pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat terhadap rencana anggaran dan pelaksanaan penanganan COVID-19.

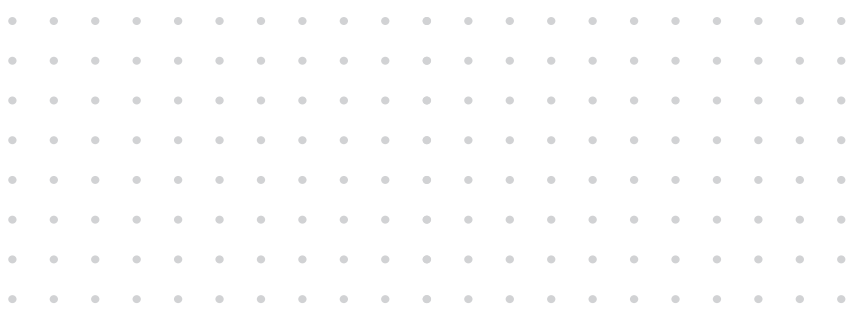
RINGKASAN PENCAPAIAN

KOMPAK mendukung pemerintah desa untuk memperkuat pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pada bulan Juni 2020, 95% desa telah membentuk Gugus Tugas COVID-19 dengan hampir semua anggota BPD berpartisipasi. Lebih dari 95% desa telah menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus untuk mengonfirmasi penerima bantuan sosial (bansos) dan 86% menerbitkan daftar penerima bansos untuk umum.

ANALISIS SITUASI

Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya acapkali tidak dilibatkan dalam perencanaan desa dan akuntabilitas sosial; akibatnya, isu-isu yang relevan dengan sektor masyarakat sering tidak terakomodasi. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat dan kelompok rentan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa, kemungkinan besar dana akan digunakan untuk kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Bank Dunia dan KOMPAK (2019). *Catatan Kebijakan UU Desa: Menempatkan Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa*.



Pandemi COVID-19 memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, dan mata pencaharian perempuan dan kelompok rentan lainnya secara tidak proporsional. Survei terbatas terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di wilayah kerja KOMPAK menemukan bahwa pandemi telah berdampak buruk pada pendapatan penyandang disabilitas yang bekerja (766 responden). Seratus persen penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal dan manula mengeluhkan kehilangan pendapatannya. Selain itu, 93% dari mereka yang berpendidikan rendah kehilangan pendapatannya. Studi lain oleh LD FEB UI dan UNESCO (2020) menemukan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal mengalami dampak ekonomi terbesar akibat pandemi. Studi tersebut juga menemukan pandemi berdampak pada perempuan yang bekerja, mereka tetap harus mengasuh anak dan mendidik anak yang belajar di rumah.

Pandemi juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah desa untuk memastikan partisipasi anggota masyarakat dan kelompok rentan. Pembatasan sosial dan perjalanan telah membatasi desa untuk menyelenggarakan Musrenbang apalagi mengadakan Musyawarah Khusus bagi perempuan dan kelompok rentan yang mungkin memiliki kendala kesehatan atau aksesibilitas. Sebelum COVID-19, tingkat partisipasi keseluruhan dalam Musrenbang tercatat rendah atau hanya sekitar 16 persen. Partisipasi lebih banyak didominasi laki-laki.¹⁸

Selama pandemi, pemerintah desa telah menggunakan Dana Desa untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (khususnya BLT-Dana Desa), menyosialisasikan informasi kesehatan, dan memantau penanganan COVID-19. Untuk mencapai target ini secara efektif, KOMPAK mendorong pendekatan berbasis masyarakat yang menempatkan peran warga mendukung pemerintah desa untuk memberikan layanan ini dan menyiapkan sistem akuntabilitas sosial sebagai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa.

Selama lima tahun terakhir, KOMPAK telah bekerja dengan pemerintah desa untuk menguji dan memperluas mekanisme akuntabilitas sosial. Kerja sama ini mencakup upaya untuk memperkuat keterampilan, peran, dan keterwakilan BPD dan meningkatkan transparansi serta mekanisme aspirasi dari masyarakat. Strategi-strategi yang telah terbukti sebelum pandemi saat ini menjadi lebih penting untuk memastikan respons yang kuat dan transparansi. Sistem akuntabilitas sosial yang efektif, dikombinasikan dengan pemerintah desa yang kuat, serta sistem informasi dan pendataan kependudukan akan memastikan kelompok rentan diberikan layanan yang mereka butuhkan.

18 Bank Dunia (2018). *Temuan Dasar dari Studi Desa Sentinel*.

KEMAJUAN DAN TANTANGAN



0,73 juta dolar Australia

Total pengeluaran program antara Januari dan Juni 2020 (dari anggaran tahunan \$0,47 juta).



156%

Tingkat pengeluaran (pengeluaran/anggaran) untuk Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020.



99%

Kegiatan dalam Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020 telah selesai.



94%

Kegiatan yang diselesaikan telah memenuhi atau melebihi ekspektasi.

FOKUS	AKTIVITAS	STATUS	RISIKO/ TANTANGAN
Nasional	Mengembangkan pedoman dengan Kemendesa PDTT (atau Kemendagri) untuk BPD agar dapat mengawasi program yang didanai APB Desa sebagai respons COVID-19 di desa.	Selesai	●
Daerah	Memberikan bantuan teknis kepada perangkat desa, BPD, dan anggota masyarakat untuk mengawasi program yang didanai APB Desa sebagai respons COVID-19, termasuk menggunakan pedoman dan mekanisme penanganan pengaduan.	Selesai (di luar Sulawesi Selatan) Lebih dari setengah telah selesai (Sulawesi Selatan)	●
	Mendukung jaringan PEKKA (kelompok perempuan dan Alumni Akademi Paradigta) untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Membagikan informasi dan materi pencegahan kepada anggota masyarakat sebagai respons COVID-19. • Mendukung pemerintah desa untuk mendistribusikan bantuan sosial seperti BLT-Dana Desa, <i>hand sanitizer</i>, masker, pamflet informasi, sembako (tergantung lokasi dan kebutuhan), dan untuk meningkatkan akurasi data bantuan sosial sebagai bagian dari respons COVID-19. 	Selesai	●
	Memberikan dukungan kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk mendistribusikan materi komunikasi tentang kesadaran dan respons COVID-19 di Papua dan Papua Barat.	Selesai	●

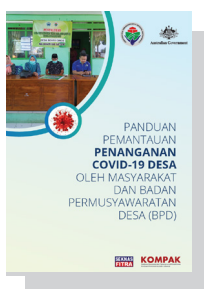
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat atas anggaran, rencana, dan pelaksanaan respons COVID-19

Penyusunan pedoman untuk mendukung BPD dan keterlibatan masyarakat

KOMPAK membantu Kemendesa PDTT menyusun dua pedoman. Dokumen-dokumen ini memberikan sistem kepada BPD dan masyarakat guna memantau dan mengawasi program yang didanai desa untuk menangani COVID-19. Pedoman ini memanfaatkan pembelajaran dari uji coba mekanisme akuntabilitas sosial yang telah dilakukan KOMPAK dengan mitranya, yaitu Seknas FITRA dan PEKKA.

Selain itu, untuk memperluas praktik pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme akuntabilitas sosial, KOMPAK bersama dengan Seknas FITRA, Bank Dunia, dan Kemendesa PDTT memasukkan komponen akuntabilitas sosial ke dalam desain Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Komponen tersebut dibangun berdasarkan program akuntabilitas sosial KOMPAK dan menggunakan Pedoman Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa, yang dikembangkan oleh KOMPAK dan Kemendesa PDTT.

Panduan dan Kebijakan yang Disusun dengan Dukungan KOMPAK



Buku Panduan Pemantauan Penanganan COVID-19 di Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Buku panduan ini berisi informasi, petunjuk, tata cara, dan langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan BPD untuk memantau penanganan COVID-19. Mulai dari proses perencanaan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran.

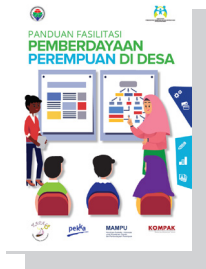
Diterbitkan: **Tahun 2020**



Buku Panduan Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi Anggaran Desa

Buku pedoman ini memberikan pedoman bagi pemerintah desa dan BPD dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Buku ini menguraikan praktik terbaik tentang akuntabilitas ke atas dan ke bawah untuk pemerintah dan BPD, termasuk mekanisme pelaporan dan pelibatan kepada pemerintah kabupaten (dan di atasnya), antara perangkat desa dan BPD, dan masyarakat.

Diterbitkan: **Tahun 2020**



Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa (bermitra dengan MAMPU dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA))

KOMPAK, PEKKA, MAMPU, dan KAPAL Perempuan berkolaborasi secara intensif dengan Kemendesa PDTT serta Kemen PP dan PA untuk menyusun buku *Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa*. Buku ini memaparkan dukungan kabupaten dan kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan perempuan melalui kebijakan, program dan kegiatan, serta pemerintah desa untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa.

Diterbitkan: **Tahun 2020**

Keterlibatan BPD dan anggota masyarakat dalam penanganan COVID-19

Survei KOMPAK terhadap pemerintah desa menunjukkan pengawasan yang kuat dari BPD dan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Lebih dari 90% desa melaporkan bahwa BPD terlibat aktif dalam pemantauan pemberian bantuan sosial (96%), berpartisipasi dalam Musdes Khusus (95%), dan memberikan masukan untuk merevisi anggaran desa (92%).

Survei juga melacak keterlibatan anggota masyarakat dalam mendukung kegiatan COVID-19, khususnya di Musdes Khusus (92%), dan dalam penyaluran bantuan sosial (89%). Sementara Jawa Tengah melaporkan keterlibatan masyarakat yang lebih rendah dalam perencanaan anggaran desa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ukuran desa yang cukup besar dengan lebih dari 3.000 rumah tangga, sehingga kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih banyak dilakukan di tingkat yang lebih rendah (seperti RT dan dusun).

Apakah BPD terlibat dalam salah satu kegiatan berikut terkait COVID-19 di desa?

(% desa yang menyatakan 'ya')	Aceh	Jawa Tengah	Jawa Timur	NTB	Papua	Papua Barat	Sulawesi Selatan	Total
Memantau proses pemberian bantuan sosial.	100%	97%	98%	100%	83%	91%	100%	96%
Terlibat dalam Musdes Khusus.	100%	97%	100%	100%	75%	89%	100%	94%
Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa.	100%	91%	99%	100%	68%	80%	100%	91%
Mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat.	74%	64%	76%	37%	48%	9%	94%	57%

Apakah masyarakat terlibat dalam salah satu kegiatan berikut yang terkait dengan COVID-19 di desa?

(% desa yang menyatakan 'ya')	Aceh	Jawa Tengah	Jawa Timur	NTB	Papua	Papua Barat	Sulawesi Selatan	Total
Terlibat dalam Musdes Khusus.	100%	94%	99%	100%	73%	72%	100%	91%
Memulai proses pelaksanaan penyaluran bansos.	91%	55%	95%	97%	80%	89%	88%	85%
Memberikan masukan perubahan APB Desa kepada Kepala Desa atau BPD.	78%	36%	81%	62%	65%	65%	88%	68%

Musyawarah Desa Khusus: Memperkuat pelibatan masyarakat dalam seleksi dan verifikasi penerima bantuan sosial

KOMPAK berhasil mengadvokasi pemerintah desa untuk mengadakan forum Musyawarah Desa Khusus (Musdes Khusus) untuk melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin, ketika mereka merevisi APB Desa untuk COVID-19. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai penanganan COVID-19 dan mengidentifikasi penerima BLT-Dana Desa.

Survei Desa oleh KOMPAK menemukan bahwa hampir semua pemerintah desa menyelenggarakan setidaknya satu kali Musdes Khusus (95%). Di wilayah Papua dan Papua Barat, lebih dari tiga perempat desa melaporkan telah melaksanakan Musdes Khusus untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial.

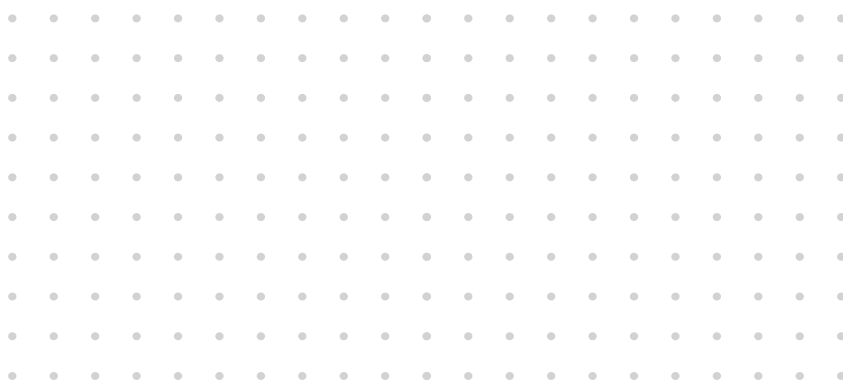
Desa menjadi lebih transparan dalam memublikasikan data penerima BLT-Dana Desa setidaknya karena dua alasan: 1) untuk memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkannya terdaftar—menggunakan bantuan masyarakat untuk memverifikasi dan memvalidasi data); dan 2) untuk mengurangi konflik antarwarga karena semua orang dapat melihat dan memberikan masukan pada daftar penerima. Sebanyak 85% pemerintah desa di lima provinsi dampingan KOMPAK di luar wilayah Papua melaporkan bahwa mereka membuat daftar penerima BLT-Dana Desa, yang dipublikasikan untuk umum menggunakan papan reklame, situs web, atau sejenisnya. Di Papua dan Papua Barat, lebih dari 50 persen desa melaporkan telah membuat daftar penerima yang bisa dilihat semua warga.

Apakah warga mendapatkan informasi terkait COVID-19 dan tanggapan pemerintah desa?

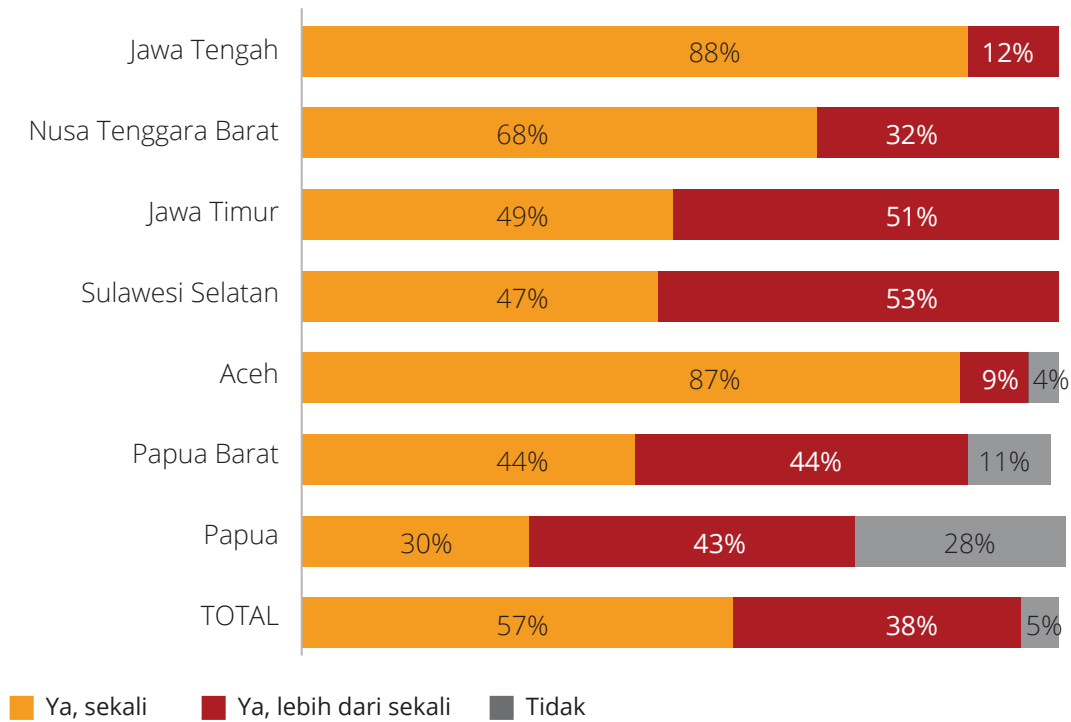
(% desa yang menyatakan 'ya')	Aceh	Jawa Tengah	Jawa Timur	NTB	Papua	Papua Barat	Sulawesi Selatan	Total
Secara lisan oleh petugas desa.	100%	94%	100%	99%	60%	61%	100%	88%
Media komunikasi cetak (brosur, baliho, poster, dll.)	91%	88%	100%	95%	60%	41%	100%	82%
Media komunikasi lainnya (website, radio, televisi, dll.)	22%	88%	58%	33%	38%	19%	0%	37%
Tidak ada-tidak menerima pesan COVID-19 khusus untuk desa.	0%	0%	0%	0%	23%	6%	0%	4%

Meskipun demikian, upaya untuk memastikan partisipasi yang inklusif dalam Musdes Khusus menjadi sedikit terkendala akibat adanya pandemi. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak Musdes Khusus tidak seinklusif forum seperti Musrenbang atau Musywarah Khusus (juga dikenal sebagai Musrenbang Inklusif, Musdes Khusus, atau Musrena). Karena pemberlakuan protokol kesehatan dan praktik menjaga jarak, banyak desa hanya mengundang tokoh desa sehingga perwakilan perempuan dan kelompok rentan menjadi lebih rendah.

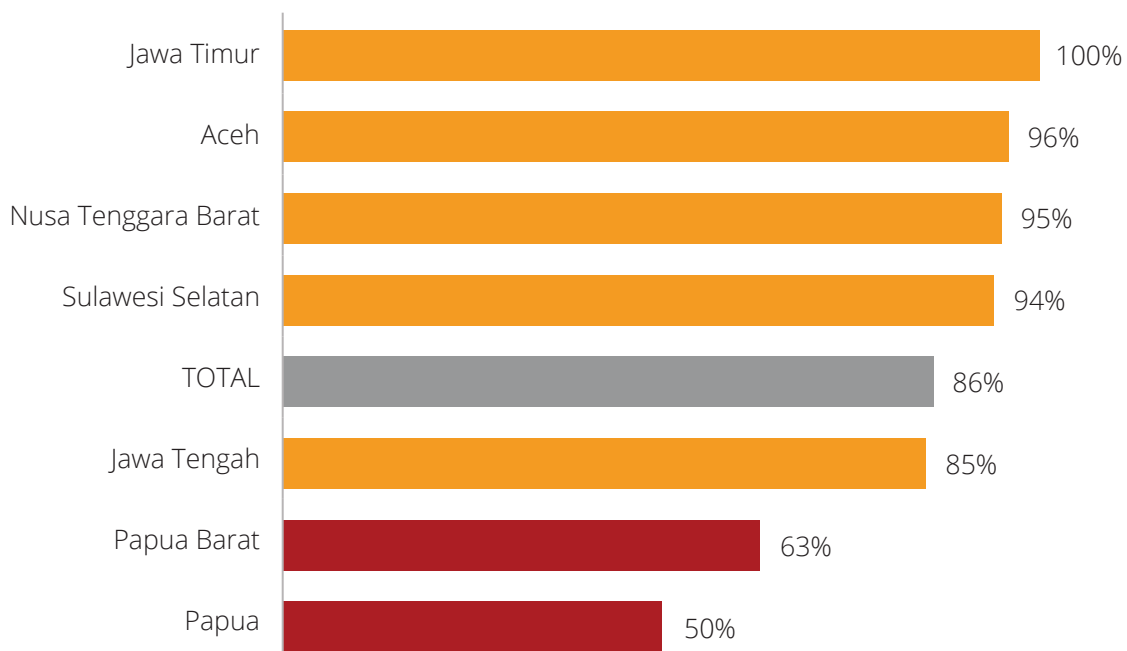
Meskipun KOMPAK dan mitra menjajaki opsi Musdes daring dalam upaya untuk memastikan partisipasi yang lebih inklusif dalam forum desa, secara keseluruhan opsi ini tidak layak karena kapasitas teknologi yang minim (seperti akses internet dan ketersediaan komputer) serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi pertemuan daring.



Apakah desa melakukan Musdes Khusus untuk menentukan daftar penerima bantuan sosial?



Apakah desa menerbitkan daftar penerima bantuan sosial yang tersedia untuk umum? (misalnya, situs web, papan iklan, pesan WhatsApp, atau media lainnya)



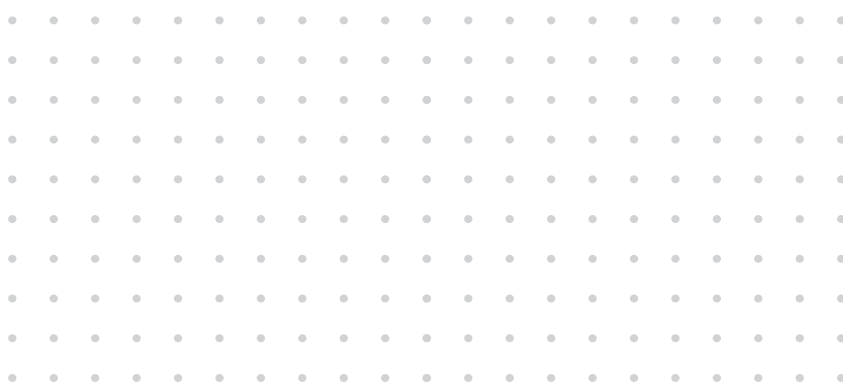
Musrenbang Inklusif/Musyawarah Khusus: Memperkuat inklusivitas forum perencanaan desa

KOMPAK dan Kemendesa PDTT sedang menguji coba model yang mengidentifikasi dan mendukung kelompok rentan untuk bisa mendiskusikan dan menyepakati prioritas mereka sebelum proses Musrenbang Reguler. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas dalam perencanaan dan penganggaran desa di Musyawarah Khusus. Model tersebut sedang diujicobakan di delapan kabupaten di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi tersebut untuk menyusun pedoman model Musyawarah Khusus sehingga dapat diadopsi oleh kabupaten lain.

Penilaian model Musyawarah Khusus

Kajian model di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur mengidentifikasi area yang bisa KOMPAK gunakan untuk memperkuat model sebelum direplikasi. Rekomendasi utama mencakup:

- Harus ada perangkat desa atau orang-orang dari instansi setempat yang membantu proses pengategorian proposal dari Musyawarah Khusus, apakah harus dianggarkan atau dilaksanakan oleh desa/kabupaten. Untuk meningkatkan kualitas pelibatan kelompok rentan (termasuk anak-anak), panduan Musyawarah Khusus dan modul pelatihan fasilitasi bagi fasilitator harus mencakup beberapa cara/metode tentang cara melibatkan kelompok rentan dalam diskusi serta mendokumentasikan masukan dari semua kelompok secara setara. Terkadang, forum musyawarah di kabupaten terlalu formal dan seremonial sehingga membatasi diskusi dan masukan dari kelompok rentan.
- Bila memungkinkan, organisasi masyarakat sipil (OMS) harus dilibatkan dalam musyawarah khusus. Keterlibatan OMS terbukti meningkatkan keterwakilan berbagai jenis kelompok rentan dan memperkaya diskusi karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkait dengan kerentanan.



Menyesuaikan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan mekanisme umpan balik masyarakat (Posko Aspirasi) untuk penanganan COVID-19

Sebagai respons COVID-19, KOMPAK dan mitranya Seknas FITRA mendukung BPD, masyarakat, dan pemerintah desa di 33 desa pada 11 kabupaten untuk memanfaatkan dan mengadaptasi Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan model mekanisme aspirasi masyarakat (Posko Aspirasi) untuk:

- Merevisi APB Desa.
- Mengumpulkan data penerima BLT-Dana Desa.
- Melakukan Musdes Khusus untuk verifikasi penerima BLT-Dana Desa.
- Mendukung BPD dan masyarakat untuk memantau distribusi BLT-Dana Desa.
- Mendukung BPD untuk mengadaptasi dan mengawasi model mekanisme umpan balik masyarakat, terutama untuk isu-isu yang terkait dengan BLT-Dana Desa.

Pelajaran yang dipetik dari model-model ini telah direplikasi di lokasi lain, meskipun hanya diterapkan dalam skala kecil. KOMPAK dan Seknas FITRA, misalnya, telah berhasil mengadvokasi Kemendesa PDTT untuk mengintegrasikan komponen model Sekar Desa dan Posko Aspirasi ke dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sehingga diadopsi lebih luas—setidaknya ke 100 kabupaten dan untuk keberlanjutan model lebih panjang.

Contoh lain, KOMPAK merintis pelembagaan model Sekar Desa dengan menggunakan fasilitator pembina teknis pemerintahan desa (PTPD). Percontohan terdiri atas sesi peningkatan kapasitas para pelatih dimana staf Seknas FITRA melatih fasilitator PTPD, pejabat kabupaten, dan anggota BPD. Di Kabupaten Aceh Barat, Brebes, dan Bima, upaya dilakukan untuk melembagakan model Sekar Desa dan Posko Aspirasi melalui peraturan daerah dan anggaran peningkatan kapasitas BPD.

Mekanisme umpan balik masyarakat di desa-desa dampingan KOMPAK

Dari hasil survei, mekanisme aspirasi masyarakat terbukti sering digunakan di desa-desa dampingan KOMPAK. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan uji coba yang dilakukan oleh Seknas FITRA, KOMPAK telah mengadvokasi mekanisme aspirasi masyarakat di desa, terutama melalui fasilitator PTPD. Survei KOMPAK menunjukkan bahwa hampir semua desa menggunakan Musyawarah Desa (81%) atau melalui kelompok perempuan (52%) sehingga anggota masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait penanganan COVID-19 atau hal-hal lain.

Apakah ada mekanisme penanganan keluhan berikut ini?

% desa yang menjawab 'Ya' (n=484)	Sulawesi Selatan	Jawa Timur	NTB	Jawa Tengah	Aceh	Papua	Papua Barat	Total
Pertemuan Desa (Musdus/ Musdes)	100%	96%	79%	94%	99%	31%	71%	81%
Kelompok perempuan	76%	64%	60%	58%	68%	9%	32%	52%
Nomor <i>Whatsapp</i> untuk mengirim rekomendasi/ umpan balik	59%	54%	55%	45%	16%	66%	1%	34%
Kotak saran di tempat umum	41%	40%	22%	52%	13%	2%		24%
Posko Aspirasi BPD	71%	25%	25%	58%	17%		1%	28%
Klik PEKKA		9%	10%	24%	11%			8%

Memberdayakan kelompok perempuan untuk mendukung distribusi informasi dan persediaan perlengkapan kesehatan

Bekerja sama dengan PEKKA, KOMPAK telah mendukung kelompok perempuan (KLIK-PEKKA) di desa-desa di 15 kabupaten di 6 provinsi untuk menyosialisasikan informasi kesehatan terkait COVID-19 dan membantu Gugus Tugas COVID-19.

Serikat PEKKA, yang dibentuk di wilayah kerja KOMPAK pada April 2019, kini memiliki sekitar 4.000 anggota, termasuk 1.244 perempuan yang bergabung pada paruh pertama tahun 2020. KOMPAK dan PEKKA telah mampu memberdayakan kelompok-kelompok ini untuk menunjang Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Desa. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain: menyebarkan informasi dan materi tentang pencegahan COVID-19 kepada anggota masyarakat, memberikan bantuan langsung tunai, dan meningkatkan akurasi data bantuan sosial sebagai bagian dari penanganan COVID-19, terutama mengidentifikasi individu yang rentan.

Pada 2020, PEKKA menyelenggarakan 48 pertemuan sehari-hari di 46 desa (KLIK-PEKKA) untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Acara yang diselenggarakan oleh anggota kelompok perempuan PEKKA ini dihadiri oleh lebih dari 11.000 orang. Hingga Juni 2020, KLIK-PEKKA mencatatkan sekitar 3.000 pengaduan dan rekomendasi (65% berasal dari perempuan) yang disampaikan kepada pemerintah desa. Kelompok perempuan memberikan dukungan kepada BPD untuk menganalisis pengaduan ini dan untuk mengadvokasi perubahan yang diusulkan. Rekomendasi yang disoroti antara lain adalah perlunya bantuan kepengurusan dokumen kependudukan agar memenuhi syarat untuk membuat BPJS Kesehatan.

Jumlah dan lokasi desa dampingan KOMPAK dan mitra

	Lokasi KOMPAK	Non-lokasi KOMPAK	Total
Seknas FITRA	27	6	33
PEKKA	51	3	54
KOMPAK	418	0	418
Total	496	9	505

Akademi Paradigta: Pelembagan dan penghentian program secara bertahap

Dukungan KOMPAK kepada Akademi Paradigta berakhir pada bulan Juli 2020. Meskipun demikian, program ini akan terus dilaksanakan oleh PEKKA dengan dana dari pemerintah daerah.

Akademi ini terbukti berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan. Menurut PEKKA, alumni Akademi Paradigta makin terlibat dalam mendukung pemerintah desa dan masyarakat setempat. Saat ini terdapat 3.467 alumni di 25 kabupaten (termasuk sembilan kabupaten di luar wilayah kerja KOMPAK). Pada pertengahan 2020, 79 alumni menjadi anggota BPD, 60 bekerja untuk pemerintah desa, dan 985 lainnya adalah sukarelawan aktif yang mendukung kelompok perempuan dan kegiatan pembangunan desa lainnya.

Untuk keberlanjutan program dalam jangka panjang, PEKKA mengajukan proposal kepada Kemendagri yang mengusulkan agar Akademi Paradigta dilembagakan di bawah Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasilnya masih menunggu. Bank Dunia telah setuju untuk melanjutkan pendanaan inisiatif ini, sementara KOMPAK memberikan masukan desain.

KOMPAK akan menerbitkan evaluasi model Akademi Paradigta pada 2021, menguraikan pembelajaran program dan rekomendasi untuk pemerintah pusat. Model Akademi Paradigta dalam memobilisasi kelompok perempuan telah diadopsi dalam pedoman pemberdayaan perempuan yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sepeda Keren: Mendukung model yang beradaptasi untuk COVID-19

Program Sepeda Keren merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dan didukung oleh KOMPAK, PEDULI, dan MAMPU serta dilaksanakan oleh Akademi Paradigta. Program ini memberikan pelatihan tata kelola desa bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi dan mengakses proses perencanaan dan penganggaran desa dengan lebih baik.

Pemkab Trenggalek awalnya mengalokasikan dana sekitar Rp500 juta untuk melaksanakan program Sepeda Keren. Pemkab Trenggalek berkomitmen untuk melanjutkan Sepeda Keren setelah dukungan KOMPAK berakhir. Saat ini, program sepenuhnya didanai oleh Pemkab dan dikelola bersama mitra OMS setempat. Namun, karena COVID-19, anggaran untuk program tersebut telah dikurangi dan modelnya sedang dirancang ulang. Hal ini melibatkan fokus yang lebih besar pada kapasitas dan kolaborasi antara OMS setempat dan Pemkab. Mereka memberdayakan relawan setempat untuk mendata kelompok miskin dan rentan, terutama warga yang terkena dampak COVID-19 paling parah.





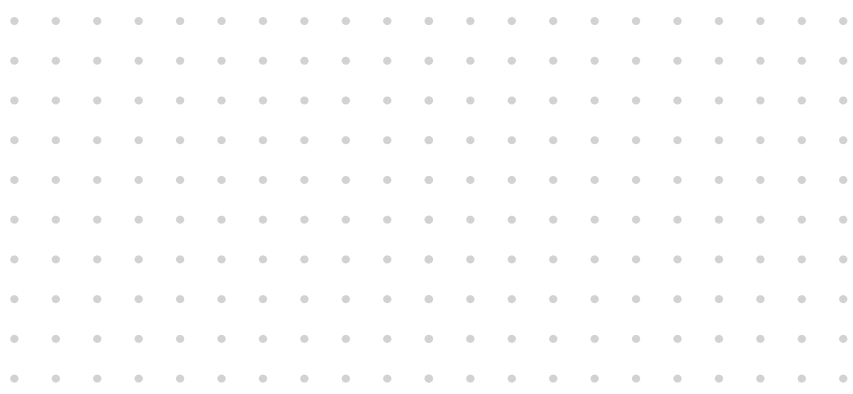


Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal

RINGKASAN PENCAPAIAN

KOMPAK menjalankan program percobaan berupa model Keperantaraan Pasar untuk 11 kelompok bisnis di tujuh kabupaten. Program percobaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), koperasi, dan kelompok perempuan dalam meningkatkan produktivitas dan keuntungan, dengan menghubungkan mereka ke pasar. Sepanjang 2020, KOMPAK fokus memperkuat fungsi BUMDES sebagai fasilitator ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, melalui perannya dalam menyalurkan bantuan pangan selama pandemi COVID-19. Walau efektivitas langkah ini masih dikaji, semua usaha yang didukung oleh KOMPAK masih tetap bertahan sepanjang tahun 2020 yang penuh dinamika.



ANALISIS SITUASI

Meningkatkan mata pencaharian rumah tangga miskin dan hampir miskin sangat penting sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di daerah perdesaan, sebagian besar masyarakat miskin dan hampir miskin adalah pekerja lepas yang bekerja sebagai petani/buruh tani atau mengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau keduanya. Meningkatkan produktivitas UMKM sangat penting untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat miskin—yang merupakan fokus kerja KOMPAK untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.

UMKM sangat terpuakul dengan adanya pandemi COVID-19, padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang lebih dari 90% lapangan pekerjaan di Indonesia dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan rumah tangga.

Kemerosotan ekonomi akibat pandemi yang dialami Indonesia pada tahun 2020 telah mendorong jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan. Perempuan dan kelompok rentan terkena dampak paling parah. Sejak pandemi dimulai pada Maret 2020, diperkirakan sekitar 50% UMKM mengalami kesulitan dalam bisnis dan harus menutup usahanya. Di sisi lain, pandemi juga telah menciptakan sekitar 2,6–3,7 juta pengangguran baru; sebagian di antaranya diperkirakan beralih mencoba memulai usaha baru. Sebagian besar usaha baru tersebut belum terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah, perbankan, atau komunitas pelaku dan pegiat UMKM.¹⁹

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pemulihan ekonomi sebagai salah satu program utama dan mengalokasikan Rp123,46 triliun dalam APBN 2020 untuk usaha kecil sebagai bagian dari paket bantuan respons COVID-19.

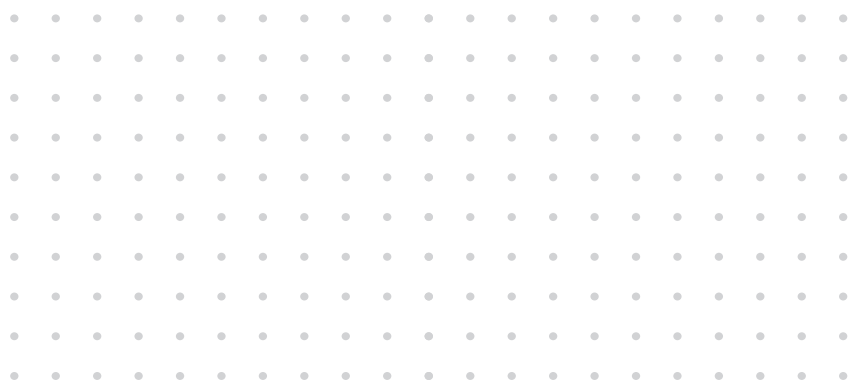
Beberapa kebijakan yang baru diterbitkan mencakup topik insentif pajak, restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga pinjaman dan program penjaminan, serta bantuan pemulihan untuk

¹⁹ Bappenas, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID19- Bagi UMKM*, Desember 2020.

usaha mikro. Hal ini memberikan peluang bagi KOMPAK—yang bermitra dengan Bappenas—untuk mengoptimalkan model keberantaraan pasar dan mengkaji pendekatan yang paling efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan keuntungan bagi UMKM di tingkat desa.

Model keberantaraan pasar, yang dikembangkan oleh Bappenas dan diujicobakan oleh KOMPAK, mendukung UMKM lokal—seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES/BUMDESMA) dan kelompok usaha perempuan—untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan perempuan dan kelompok miskin. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan *value chain* (seperti melakukan pemrosesan dan pengemasan bahan baku), mengumpulkan lebih banyak sumber daya, dan menjual dalam jumlah yang lebih besar kepada pasar yang potensial di daerah dan nasional.

Pada tahun 2020, uji coba model keberantaraan pasar KOMPAK berlanjut sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Dengan berlanjutnya upaya pemulihan, fokus akan lebih diarahkan kepada BUMDES sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat desa, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat. KOMPAK terus mendukung Bappenas untuk mempromosikan model keberantaraan pasar yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.



KEMAJUAN DAN TANTANGAN



0,25 juta dolar Australia

Total pengeluaran program sepanjang Januari–Juni 2020
(dari anggaran tahunan \$0,47 juta).



86%

Tingkat pengeluaran (pengeluaran/anggaran)
untuk Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020.



79%

Kegiatan dalam Revisi Rencana Kerja
Tahunan 2020 telah selesai.



93%

Kegiatan yang diselesaikan telah
memenuhi atau melebihi ekspektasi.

FOKUS	AKTIVITAS	STATUS	RISIKO/ TANTANGAN
Nasional	Sosialisasi praktik baik BUMDES sebagai solusi ketahanan ekonomi di masa pandemi COVID-19.	Ditunda	●
	Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas untuk melakukan studi tentang dampak kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penanganan COVID-19 terhadap UMKM.	Selesai	●
	Kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam mendukung UMKM selama pandemi.	Selesai	●
Daerah	Memberikan pelatihan daring tentang <i>e-commerce</i> kepada pemilik UMKM dan pejabat pemerintah kabupaten (Lombok Utara, Pematang, Bantaeng, Pekalongan, dan Aceh Barat).	Selesai	●
	Memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pemerintah kabupaten untuk mempromosikan BUMDES sebagai alternatif ketahanan ekonomi selama pandemi COVID-19 (Tenggalek, Sumbawa, dan Pematang).	Selesai	●

Uji Coba Model Keperantaraan Pasar dan Evaluasi Kinerja

Kinerja Keuangan Kelompok Usaha

Model Keperantaraan Pasar telah diujicobakan sejak awal tahun 2019 dengan hasil yang beragam. Dari 11 kelompok usaha yang didukung, dua di antaranya tidak melaporkan catatan keuangan tahun 2020 karena tidak ada kegiatan. Sementara dari sembilan kelompok yang menyerahkan catatan keuangan periode Januari–Desember 2020, tujuh kelompok melaporkan mengalami keuntungan dan dua lainnya melaporkan bahwa mereka merugi. Kelompok berpenghasilan tertinggi melaporkan keuntungan sebesar Rp445 juta sedangkan yang lainnya rata-rata kurang dari Rp60 juta. Dengan memperhitungkan pendapatan dan biaya produksi bagi petani dan penerima manfaat lainnya, pendapatan rata-rata per kelompok usaha adalah

Rp144,6 juta. Meskipun laba ini tetap rendah, ada peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 420% (dari rata-rata Rp14.507.528 di empat kelompok usaha menjadi rata-rata Rp60.988.331 di sembilan kelompok usaha).

Pendapatan dan keuntungan yang rendah sebagian disebabkan oleh tahap awal uji coba yang melibatkan investasi peralatan, pelatihan, survei permintaan dan kebutuhan pasar, serta pembangunan jejaring bisnis. Namun, sepanjang tahun, KOMPAK mengamati bahwa penurunan ekonomi akibat COVID-19 berdampak pada uji coba keperantaraan pasar dengan kendala sebagai berikut:

- Berkurangnya permintaan dan peluang penjualan terutama di sektor kopi, sabut kelapa, dan pariwisata.
- Dukungan keuangan untuk UMKM berbasis BUMDES berkurang karena perubahan anggaran untuk mendukung bantuan sosial.
- Pembatasan perjalanan membatasi pemberian bantuan teknis yang efektif kepada UMKM.

Faktor-faktor ini dapat menghambat kelompok usaha yang didampingi dalam meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa meskipun terjadi penurunan ekonomi, semua kelompok usaha dampingan KOMPAK tetap buka dan melanjutkan usaha.

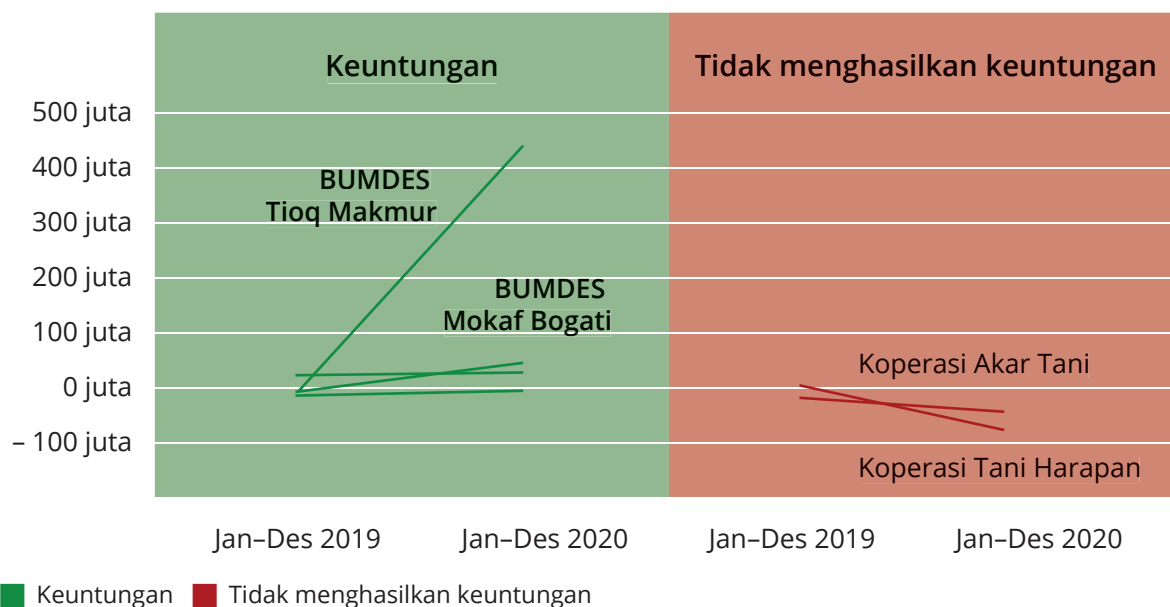
Untuk membantu kelompok usaha dalam melanjutkan operasinya sepanjang tahun 2020, KOMPAK telah:

- Membantu kelompok usaha untuk mengakses pembiayaan dari berbagai sumber baik dari sumber pendanaan sektor swasta maupun pemerintah, bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Memberikan masukan teknis untuk mempertahankan dan meningkatkan bisnis, termasuk produksi teh premium dan uji coba tur virtual untuk desa wisata.
- Mempermudah penjualan melalui daring di *marketplace*—bekerja sama dengan Shopee.

Uji coba model keperantaraan pasar ini didukung oleh Bappenas, serta pemerintah desa dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat potensi yang signifikan dari model tersebut. Selama 12 bulan terakhir, 10 dari 11 kelompok usaha telah menerima investasi bersama dari pemerintah desa atau pihak ketiga—seperti mitra swasta. Total investasi yang telah didapatkan mencapai Rp8,078 miliar.

KOMPAK belum mengukur dampak keuangan uji coba model ini terhadap anggota kelompok usaha atau penerima manfaat tidak langsung lainnya, seperti petani. KOMPAK mengembangkan sistem untuk mengukur hal tersebut dan dampak lainnya pada kelompok-kelompok ini, tetapi pengumpulan data ditunda karena pandemi COVID-19.

Sebagian besar kelompok usaha mengalami peningkatan laba selama setahun terakhir; dan keuntungan satu kelompok bisa melebihi Rp60 juta.



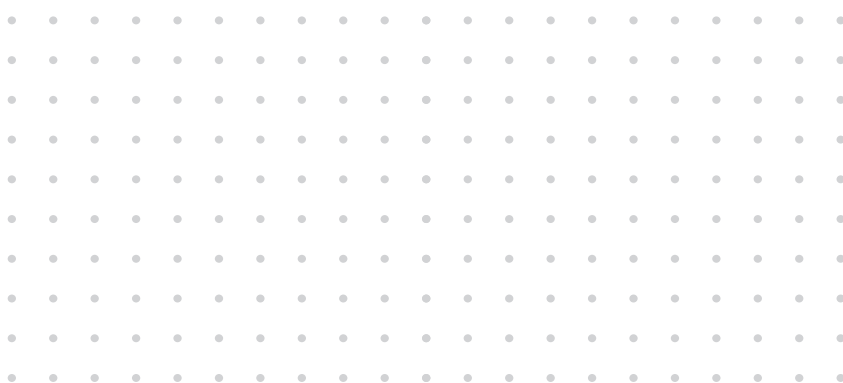
Ringkasan dan Kinerja Keuangan Kelompok Usaha

Efektivitas Kelompok Usaha pada Sektor Usaha

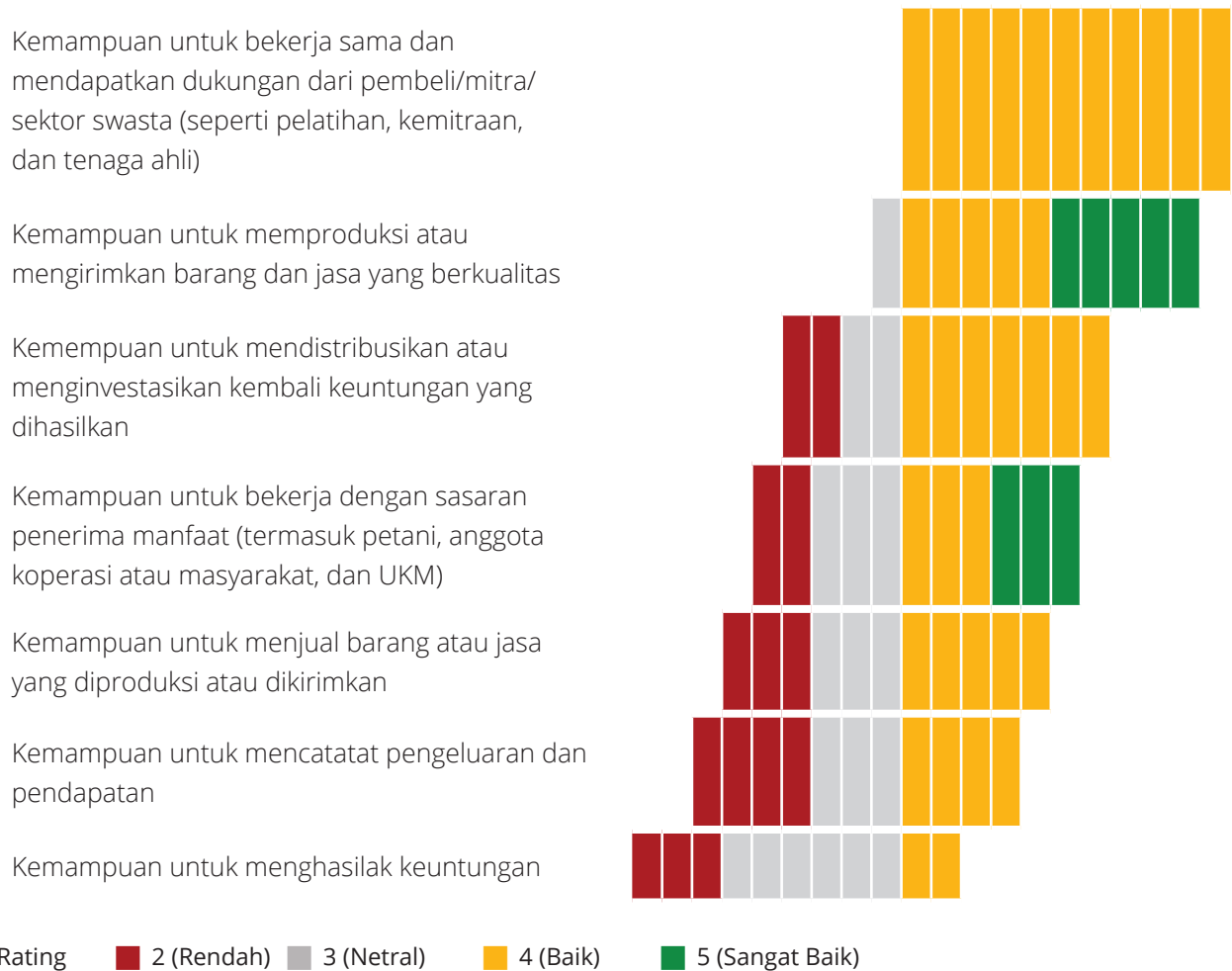
Wilayah	Nama UKM	Komoditas	Pendapatan	Pengeluaran	Untung/Rugi
Aceh Barat	UKM Arlamba	Kerajinan eceng gondok	143.125.000	103.706.522	39.418.478
Bantaeng	Koperasi Akar Tani	Kopi	90.000.000	116.850.000	-26.850.000
	BUMDES Layar Terkembang	Pengolahan rumput laut			

Wilayah	Nama UKM	Komoditas	Pendapatan	Pengeluaran	Untung/Rugi
Lombok Utara	Pokdarwis Bayan	Pariwisata desa	43.285.000	36.850.000	6.435.000
	Pokdarwis Ganggalang	Pariwisata desa	695.000.000	250.000.000	445.000.000
Pacitan	BUMDES Mocaf Bogati	Modifikasi tepung mokaf	210.000.000	156.000.000	54.000.000
Pekalongan	Koperasi Berdikari Makmur	Teh hijau	25.437.000	16.570.500	8.866.500
Pemalang	BUMDESMA Belik	Agrowisata	65.000.000	46.250.000	18.750.000
	Koperasi Tani Harapan	Kopi	24.475.000	81.200.000	-56.725.000
Trenggalek	BUMDESMA Sari Bumi	Keripik rimpang	136.000.000	76.000.000	60.000.000
	BUMDES Banjar	Pengolahan sabut kelapa			
Total			1.432.322.000	883.427.022	548.894.978

Selain kinerja keuangan, KOMPAK melakukan survei kepada 11 kelompok usaha pada bulan Juni 2020 untuk menilai seberapa efektif kinerja mereka dalam aspek tertentu yang mendapatkan dampingan. Hasilnya beragam. Kelompok usaha melaporkan bahwa mereka bisa mendapat dukungan dari pembeli dan sektor swasta lainnya. Hal ini juga tercermin dalam kondisi di lapangan, melalui pelatihan dan kemitraan yang mulai dibangun. Namun, dua sektor yang dinilai kelompok usaha memiliki kinerja terendah juga merupakan dua kategori terpenting: pembukuan dan kemampuan menghasilkan keuntungan. Lebih dari dua pertiga kelompok usaha menyatakan penilaian netral atau rendah untuk sektor ini.



Seberapa efektif fungsi kelompok usaha untuk kategori berikut?



Jenis Pekerjaan yang Mendapat Manfaat dari Uji Coba Model Keperantaraan Pasar

Berikut ini disajikan daftar contoh jenis pekerjaan beserta data pendekatan pembayaran, perkiraan jumlah pekerja, dan gaji bulannya. Mengingat jenis pekerjaan dan penerima manfaat beragam, diperlukan standar yang akurat untuk mendapatkan data jumlah penerima manfaat dan manfaat aktual dari model keperantaraan pasar, misalnya peningkatan pendapatan.

Dalam seleksi awal komoditas unggulan, KOMPAK berupaya memprioritaskan sektor yang paling banyak melibatkan masyarakat miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, uji coba keperantaraan pasar telah melibatkan masyarakat miskin dan perempuan baik sebagai penerima

manfaat langsung maupun tidak langsung. Untuk memaksimalkan manfaat bagi kelompok-kelompok ini, KOMPAK secara teratur menyesuaikan tiap-tiap rencana untuk menghasilkan peluang yang lebih besar bagi masyarakat miskin dan perempuan. Contoh terakhir, salah satu kelompok usaha yang memperdagangkan jahe dan produk jahe mengalami peningkatan permintaan sehingga membutuhkan tambahan lahan perkebunan seluas 20 hektar. Melalui negosiasi dengan kelompok usaha, KOMPAK memastikan 30% areal tanam baru dikelola oleh petani miskin di masyarakat setempat.

KOMPAK merencanakan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap pendapatan dan produktivitas anggota kelompok usaha pada tahun 2020, tetapi harus tertunda hingga tahun 2021 karena pandemi COVID-19.

Contoh pekerjaan yang mendapat manfaat dari uji coba model keberantaraan pasar

Kabupaten	Jenis dan deskripsi pekerjaan	Jenis pengaturan kerja dan pembayaran	# pekerja	Estimasi penghasilan bulanan per orang (IDR)
Aceh	Pembuat kerajinan yang mengumpulkan eceng gonndok mentah, mengolahnya dan menganyam keranjang dan barang lainnya	Pembayaran untuk barang yang telah dibuat/dikirim (seperti per kg/barang)	67	1.200.000
Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat	Pemilik penginapan menyediakan akomodasi untuk pengunjung	Dibayar per malam per pengunjung	25	400.000
	Penampil menyajikan pertunjukan	Dibayar per pertunjukan untuk pengunjung	80	1.000.000
	Pemandu wisata menemani pengunjung ke desa	Dibayar per tur yang mereka pimpin	12	3.600.000
Jawa Timur	Pengolahan singkong menjadi tepung mocaf bogati	Dibayar berdasarkan waktu kerja (misalnya per hari atau per jam)	5	1.200.000

Kabupaten	Jenis dan deskripsi pekerjaan	Jenis pengaturan kerja dan pembayaran	# pekerja	Estimasi penghasilan bulanan per orang (IDR)
Jawa Timur	Pengolahan kelapa menjadi produk turunan seperti sabut kelapa	Dibayar berdasarkan waktu kerja (misalnya per hari atau per jam)	5	900.000
Sulawesi Selatan	Petani menanam dan mengeringkan biji kopi	Pembayaran untuk barang yang telah diolah/dijual	10	312.500

Memperluas Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Pemerintah

Model keberantaraan pasar telah berhasil memberikan pelatihan dan kesempatan berjejaring antara usaha yang lebih besar, pelaku UMKM di desa, dan pejabat pemerintah. KOMPAK membantu memfasilitasi 22 acara dengan melibatkan peserta sebanyak 1.875 orang (49% perempuan).

Acara ini termasuk pelatihan pemasaran daring untuk sekitar 30 UMKM dari Aceh Barat dan Lombok Utara pada bulan Juni 2020. Pelatihan ini difasilitasi oleh platform *e-commerce* Shopee dan Kemendesa PDTT. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali UMKM agar dapat mengakses pasar di luar pembeli lokal. KOMPAK juga memfasilitasi lokakarya untuk mendukung UMKM (termasuk BUMDES) agar bisa mengakses pendanaan alternatif melalui *crowdfunding*. Lokakarya ini merupakan kerja sama antara KOMPAK, Kemendesa PDTT, dan perusahaan *crowdfunding*, antara lain IGrow, Tani Fund, dan Santara.

Pada awal pandemi, KOMPAK mendukung BUMDES dari Trenggalek, Pemalang, dan Sumbawa untuk menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) non-tunai dalam program pemerintah daerah sekaligus mitra pengadaan barang dari UMKM setempat. KOMPAK juga mendukung Kemendesa PDTT menyusun pedoman guna membantu BUMDES menjadi penyalur bansos non-tunai untuk program dari Kemensos. Inisiatif ini ditunda karena pengalihan anggaran untuk menghentikan bansos non-tunai.

Mendukung Pelembagaan Model Keperantaraan Pasar

Saat ini, KOMPAK fokus untuk lebih memperkuat model keperantaraan pasar dan mendukung pelembagaannya baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, Bappenas telah memasukkan model ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2020–2024) dan memperkenalkan model ini kepada Kemenkop UKM, Kemensos, dan Kemendesa PDTT. Kemenkop UKM telah memasukkan elemen kunci dari model keperantaraan pasar ke dalam Strategi Nasional Pengembangan UMKM yang akan digulirkan pada 2021. Elemen-elemen yang diadopsi dari model uji coba KOMPAK meliputi mekanisme koordinasi, insentif untuk pengembangan sektor swasta, dan penggunaan hibah pemerintah dalam mendukung inovasi bisnis.

Upaya lain untuk menyebarkan dan melembagakan model keperantaraan pasar meliputi:

- Penyusunan pedoman keperantaraan pasar dan uji coba oleh pelaku usaha yang dituju. Meskipun pandemi COVID-19 membuat pelatihan untuk pedoman ini ditunda, KOMPAK menggunakannya sebagai referensi untuk membantu beberapa kabupaten dalam mereplikasi model keperantaraan pasar.
- KOMPAK melakukan penilaian cepat atas kesenjangan utama pada Pembiayaan UMKM dan menyelenggarakan webinar tentang pinjaman pendanaan melalui *P2P Lending* dan *crowdfunding*. Pemahaman menyeluruh tentang berbagai opsi pembiayaan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan UMKM pada hibah.
- Pada tahun 2020, dalam upaya menilai seberapa efektif model ini dapat direplikasi, KOMPAK mendukung Bappenas dalam penyelenggaraan survei kepada lebih dari 2.500 UMKM. Survei difokuskan untuk menilai bagaimana pemerintah dapat memperbaiki kebijakan guna mempercepat pengembangan UMKM selama dan setelah pandemi COVID-19. KOMPAK menggunakan rekomendasi hasil survei untuk meningkatkan model keperantaraan pasar.

KOMPAK berupaya agar model ini lebih berhasil dengan cara:

- Meningkatkan profitabilitas: Landasan bagi kegiatan pengembangan ekonomi lokal adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. KOMPAK perlu memeriksa model dan nilai atas investasi yang diberikan (*value for money*). Diperlukan

analisis untuk mengetahui cara meningkatkan pendapatan dan keuntungan, serta mengetahui apakah beberapa pendekatan berfungsi lebih baik daripada pendekatan lainnya.

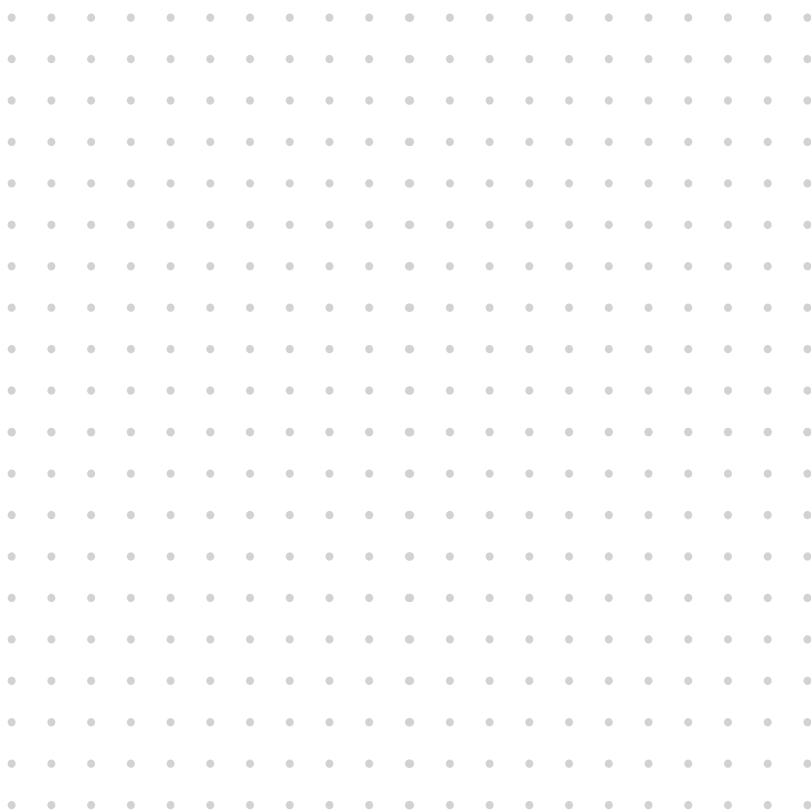
- Fokus yang lebih besar pada kelompok rentan dan perempuan: Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa model keperantaran pasar memberikan peluang menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok rentan. Dalam survei yang KOMPAK lakukan, mayoritas pelaku usaha dan penerima manfaat adalah laki-laki (pekerja perempuan 43%, penerima manfaat perempuan 45%). Survei yang dilakukan KOMPAK mungkin kurang memperhitungkan sejumlah bentuk partisipasi perempuan (misalnya perempuan melakukan pengolahan di rumah, sementara laki-laki menjual produk ke BUMDES), tetapi uji coba ini perlu menunjukkan manfaat yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok rentan agar dapat diadopsi secara lebih luas oleh pemerintah daerah.
- Standarisasi dan replikasi model yang lebih baik: Model ini terbukti berhasil di beberapa lokasi, seperti desa wisata di Lombok Utara. Meskipun begitu, mereplikasi keberhasilan ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk mereplikasi model, KOMPAK perlu menguraikan pembelajaran dan kunci keberhasilan yang dapat diterapkan di desa lain dengan peluang bisnis serupa, seperti pariwisata atau pertanian.
- Memperkuat bukti tentang efektivitas model keperantaran pasar: Evaluasi yang menyeluruh dan sistem pemantauan yang kuat diperlukan agar para pengambil keputusan memahami dengan lebih baik seberapa efektif model ini dan dalam keadaan seperti apa hasilnya dapat maksimal. KOMPAK telah mengembangkan pendekatan baru untuk pemantauan—beberapa telah diperinci sebelumnya—tetapi masih ada kesenjangan untuk dapat menangkap dan menilai manfaat lanjutan bagi penerima manfaat sekunder, seperti petani.

Contoh Awal Replikasi

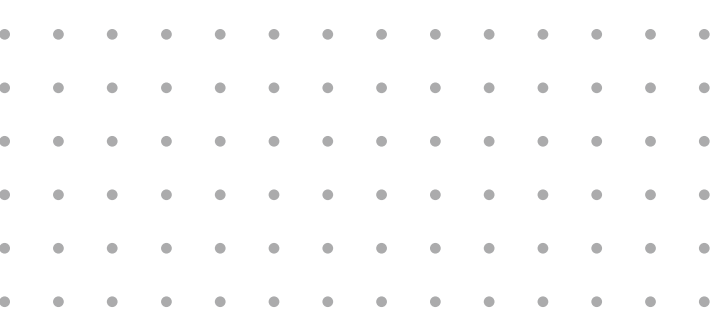
Beberapa kemajuan yang menggembirakan ditunjukkan ketika pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Trenggalek, dan Pacitan mulai mereplikasi model keperantaraan pasar di luar komoditas yang sebelumnya telah didukung.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadopsi model keperantaraan pasar sebagai bagian dari *Anti Poverty Program/APP* (Program Pemberantasan Kemiskinan) yang telah dijalankan selama 15 tahun. KOMPAK mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan pedoman dan manual yang diperlukan. APP yang didesain ulang akan diujicobakan di lima kabupaten pada tahun 2022.

Kemenkop UKM juga berminat untuk mereplikasi model keperantaraan pasar sebagai bagian dari Strategi Nasional pengembangan UMKM. KOMPAK telah membantu kementerian tersebut dalam memilih lokasi dan komoditas serta menyusun pedoman dan manual untuk diujicobakan pada tahun 2022.







Lintas Sektor dan Penghentian Bertahap

— Lintas Sektor dan Penghentian Bertahap

Prioritas COVID-19: Memanfaatkan teknologi digital untuk mengetahui dan mengurangi dampak pandemi COVID-19.

KEMAJUAN DAN TANTANGAN



95%

Kegiatan Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020 telah selesai



94%

Kegiatan yang terselesaikan telah memenuhi atau melebihi ekspektasi

Catatan: Persentase penyelesaian mengacu pada rencana kerja tahunan periode 2020 awal, di mana KOMPAK mengidentifikasi kegiatan yang bertujuan untuk melembagakan model dampingan KOMPAK yang paling efektif dan memengaruhi perubahan kebijakan.

INOVASI LINTAS SEKTOR

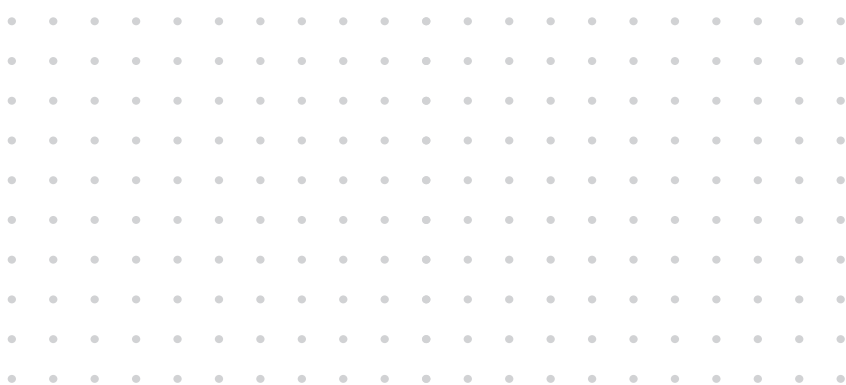
Pemerintah Kabupaten Trenggalek: Memperkuat Integrasi dan Analisis Data Perlindungan Sosial (Bansos 360)

Sejak akhir 2019, KOMPAK mulai bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital yang dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Saat pandemi melanda, KOMPAK dan Pemkab Trenggalek mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk melakukan *cross check* data penerima bantuan sosial.

KOMPAK mulai mengembangkan sistem yang dapat membantu pemerintah kabupaten untuk menjawab apakah:

- Bantuan sosial ditargetkan untuk rumah tangga dan individu yang tepat;
- Pendekatan perencanaan dan sumber daya saat ini untuk kebutuhan bantuan sosial sudah tepat; dan
- Data kependudukan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah akurat.

Untuk mencapai hal ini, KOMPAK mengembangkan tahapan pemrosesan data yang menggabungkan delapan jenis data dari pemerintah pusat dan daerah. Pemrosesan data ini menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengenal unik. Hal ini memungkinkan analisis data individu dan mencegah duplikasi. Meskipun demikian, pencocokan data terkendala karena data NIK yang tidak lengkap dalam jenis data dan standar data yang disepakati. Akibatnya, sulit untuk menyelaraskan antara jenis data yang ada.

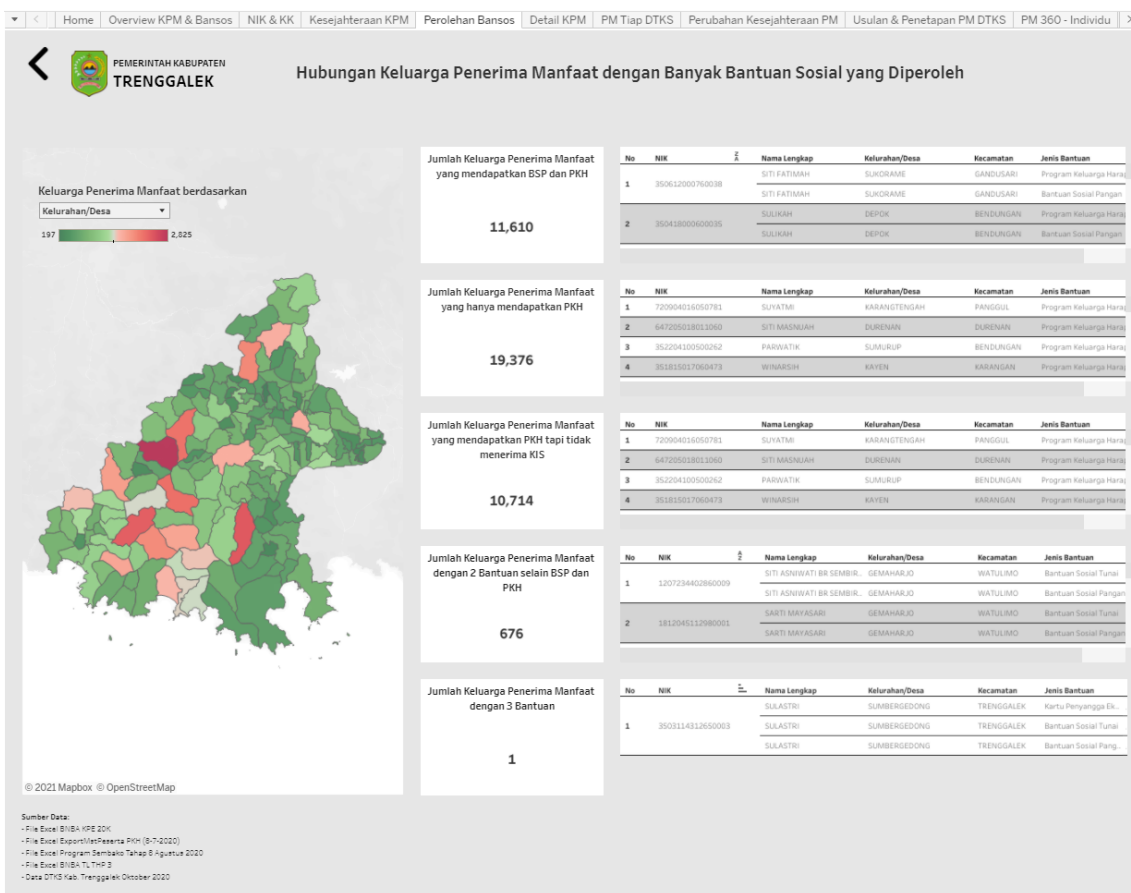
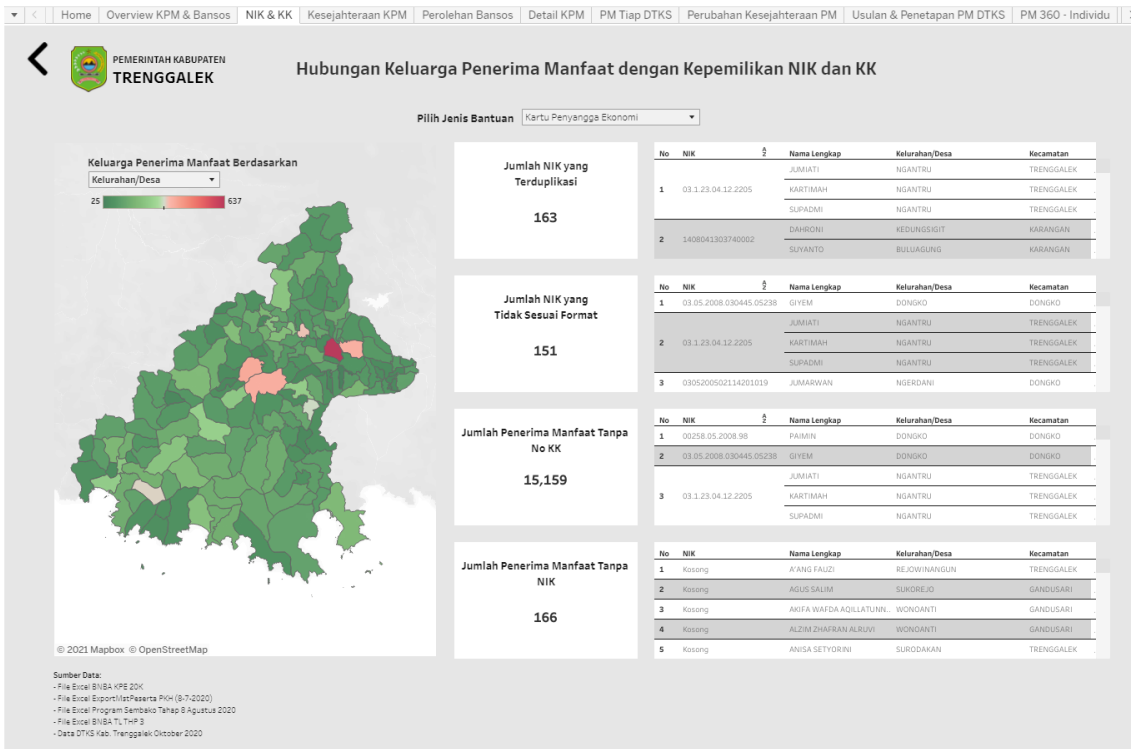


Berdasarkan gabungan data ini, KOMPAK dan Pemkab Trenggalek merancang dasbor dan sistem pendukung, yaitu Bansos 360, untuk menghasilkan analisis yang menjawab pertanyaan di atas.

	Perolehan Data	Analisis Data	Tindak Lanjut atas Data
Tujuan	Mendapatkan data yang lengkap dan terbaru dari setiap dinas/pemangku kepentingan untuk bansos	Memperoleh informasi dan memproses semua data yang dimiliki	Membuat keputusan, merumuskan kebijakan, dan mengimplementasikan program berbasis data
Tahap 1	Memulai Ekosistem		
Tahap 2	Membangun Ekosistem		
Tahap 3	Membuka Ekosistem		

Bansos 360 menyediakan visualisasi data dalam bentuk dasbor untuk pengambil keputusan di Pemkab Trenggalek. Hal ini terbukti bermanfaat dalam membantu Pemkab Trenggalek mendistribusikan bantuan sosial secara efektif. Sistem ini telah beroperasi, tetapi perlu dimigrasikan ke ekosistem Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemkab Trenggalek. Selama tahun 2020, KOMPAK telah menyampaikan *output* Bansos 360 antara lain sebagai berikut:

- Lima dasbor visualisasi data Bansos 360 dikembangkan untuk membantu tim Dinas Sosial Trenggalek dalam mengidentifikasi data bansos yang tidak lengkap dan tidak akurat, serta merencanakan program bantuan sosial dan target penerima manfaat di masa mendatang.
- Pelatihan visualisasi data dan rekayasa data diberikan kepada Dinas Kominfo Trenggalek untuk mengakses platform Bansos 360.
- Data dikumpulkan dari berbagai sumber di Kabupaten Trenggalek untuk menjadi dasar dalam pengembangan Bansos 360 tahap selanjutnya pada 2021.
- *Roadmap* dan *blueprint* telah dikembangkan untuk semua tahapan Bansos 360 guna mengembangkan platform lebih lanjut.



Tangkapan layar dari dua dasbor Bansos 360

Aplikasi dan Dasbor Seluler: Mendukung Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil

Sejak bulan Maret 2019, KOMPAK telah menguji coba dua aplikasi seluler di tiga kabupaten untuk memantau ibu hamil, ibu baru, dan bayi mereka. Aplikasi Bidan untuk Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) dikembangkan oleh SEHATI, sebuah perusahaan teknologi kesehatan swasta. Aplikasi ini sedang diujicobakan di 13 klinik lokal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dan 10 klinik lokal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Aplikasi lain, yaitu Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA) yang dikembangkan oleh Pemkab Bondowoso, Jawa Timur juga sedang diujicobakan.

Aplikasi PWS-KIA berbasis seluler/tablet, memungkinkan entri data elektronik, analisis otomatis melalui dasbor dan perintah tertentu, serta salinan digital buku pegangan kesehatan ibu dan anak dengan fitur pencarian. Aplikasi ini memungkinkan identifikasi kehamilan berisiko tinggi, menyediakan petunjuk untuk tindak lanjut dan rujukan, serta mampu menghasilkan laporan yang lebih akurat dan otomatis bagi fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten guna mendukung inisiatif perencanaan dan penjangkauan.

Hingga bulan Juni 2020, ada sekitar 375 bidan yang menggunakan aplikasi ini dan 483 ibu hamil yang terdaftar. Pada akhir tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 419 bidan dan 697 ibu hamil. Di Aceh dan Sulawesi Selatan, KOMPAK dan SEHATI memberikan pelatihan bagi pelatih (ToT) kepada pemerintah kabupaten dan dinas kesehatan agar mereka dapat mengelola aplikasi dan jenis data secara mandiri. Ada juga rangkaian ToT mengenai penggunaan aplikasi untuk penyampaian pedoman pencegahan COVID-19 dan pemantauan penularan pada ibu hamil.

KOMPAK merencanakan untuk menyelesaikan evaluasi mandiri dari uji coba pada awal tahun 2021. Evaluasi ini akan menilai seberapa efektif penerapan aplikasi ini dalam meningkatkan layanan kesehatan untuk ibu hamil serta keberlanjutan modelnya. Pemkab Pangkep, per Maret 2021, mengalokasikan dana sebesar Rp350 juta untuk melanjutkan program ini dan menjadwalkan pelatihan untuk 26 bidan lainnya dari 13 Puskesmas.

Sebagai bagian dari uji coba, KOMPAK melakukan survei untuk menilai kegunaan dan kepuasan menggunakan Aplikasi Bidan dan dasbor PWS-KIA. Responden yang meliputi 77 bidan dan 26 petugas ini ditunjuk untuk mengoperasikan dasbor. Di kedua kabupaten untuk seluruh kategori responden, lebih dari 70% responden menganggap aplikasi dan dasbor ini penting atau sangat penting. Demikian pula, lebih dari 75% responden merasa puas atau sangat puas dengan aplikasi dan dasbor tersebut.

PENGHENTIAN BERTAHAP

Sebagai bagian dari transisi ke pendekatan kegiatan unggulan, KOMPAK telah mengakhiri kegiatan di luar kegiatan unggulan secara bertahap. Hal ini termasuk intervensi khusus kesehatan dan pendidikan, program UMD, dan dukungan yang diberikan melalui PEKKA untuk intervensi khusus GESI, seperti Akademi Paradigta.

Mendukung Inovasi Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Daerah Terpencil (Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan)

KOMPAK secara bertahap mengakhiri dukungan langsung untuk layanan kesehatan dan pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selama dua tahun terakhir, KOMPAK telah membantu pemerintah kabupaten untuk merintis sekolah jarak jauh untuk anak-anak yang melaut untuk bekerja (dikenal sebagai Kelas Perahu). Model ini terbukti bermanfaat selama pandemi sehingga pemerintah kabupaten memperluas pendekatan tersebut ke empat kecamatan berbasis pulau, dari 42 menjadi 123 sekolah. KOMPAK dan INOVASI memberikan bantuan untuk pengembangan pedoman dan materi pembelajaran jarak jauh, serta menyiapkan insentif gaji tambahan bagi guru yang membantu siswa Kelas Perahu.

Sebagai hasil dari advokasi KOMPAK, pemerintah daerah mengalokasikan insentif kepada guru untuk membantu siswa yang melaut tetap bersekolah. Alokasi ini menjamin keberlanjutan program, setelah dukungan KOMPAK berakhir. Pada tahun 2020, dana sebesar Rp250 juta dari APBD berhasil dialokasikan untuk mendanai 60 guru Kelas Perahu, di mana pada tahun sebelumnya pos anggaran belum secara spesifik dialokasikan untuk Kelas Perahu. Pemerintah daerah melanjutkan pendanaan ini untuk guru Kelas Perahu dalam anggaran 2021 mereka.

Sementara untuk kesehatan, di Kabupaten Pangkep, KOMPAK juga telah mendukung model Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat kepulauan. Berdasarkan hasil penilaian cepat pada bulan Desember 2019, KOMPAK mendukung pengembangan pedoman baru untuk layanan kesehatan berbasis perahu dan membantu mendapatkan dana tambahan dari pemerintah kabupaten. Pada tahun 2020, KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah daerah memperbarui pedoman ini dengan langkah-langkah untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 antarpulau. Selain itu, KOMPAK terus mengadvokasi keberlanjutan model tersebut. KOMPAK memfasilitasi Nota Kesepahaman antara

puskesmas dan enam desa untuk meningkatkan frekuensi pelayanan penyuluhan dari setahun sekali menjadi empat kali dalam setahun untuk masing-masing dari 16 pulau yang dilayani puskesmas. Selain itu, desa-desa juga berkomitmen menganggarkan pendanaan dari APB Desa untuk mendukung layanan ini. Model PSPB juga memasukkan pendekatan inklusi, di mana dengan bantuan teknis KOMPAK, puskesmas setempat mengumpulkan data terpilah terkait gender dan disabilitas. Langkah ini berhasil peningkatan cakupan pelayanan untuk kelompok rentan.

Untuk keberlanjutan jangka panjang, Pemkab Pangkep memperluas model PSPB di tingkat kabupaten. Mereka juga telah memasukkan program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemkab merencanakan kerja sama yang lebih luas antara puskesmas dan desa. Layanan PSPB akan diperluas supaya mencakup layanan klinis.

Universitas Membangun Desa (UMD): Mendorong Kolaborasi antara Universitas dan Pemerintah Daerah

Mahasiswa yang terdaftar di lebih dari 3.000 universitas di Indonesia biasanya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari mata kuliah dalam bentuk program yang dikenal dengan nama Kuliah Kerja Nyata (KKN). Universitas Membangun Desa (UMD) yang diprakarsai oleh KOMPAK bermitra dengan Kemendesa PDTT, bertujuan untuk memberdayakan program KKN yang sudah ada dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan amanat perguruan tinggi tentang pembangunan masyarakat melalui KKN dan UU Desa.²⁰ KOMPAK telah merintis model UMD sejak tahun 2016, yang biasa dikenal dengan program UMD-KKN Tematik (dengan fokus pada sektor tertentu).

Evaluasi UMD selesai dilakukan oleh KOMPAK pada tahun 2019. Evaluasi ini mengidentifikasi tiga hasil utama dari program percobaannya: pertama, sebagai mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa; kedua, lebih relevannya program KKN dengan kebutuhan desa; dan ketiga, modelnya diadopsi dan direplikasi ke lokasi di luar wilayah uji coba. Hingga Juni 2020, peserta program UMD-KKN Tematik mencapai lebih dari 300 desa.

Evaluasi tersebut juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, yaitu koordinasi, dukungan, dan model keberlanjutannya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk dapat mengidentifikasi dan

20 Salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan UU No. 2003/12 dan UU No. 2012/12.

memberdayakan universitas serta mahasiswa dengan lebih baik dalam membantu pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya ini secara strategis. Untuk mengatasi kesenjangan informasi dan membangun kolaborasi antara desa dan universitas, dikembangkanlah Inspirasi UMD+ (<https://inspirasi-umd.id>). Inspirasi UMD+ merupakan platform daring yang dikelola oleh Kemendesa PDTT yang memudahkan pemerintah desa untuk memublikasikan program pembangunan desa. Dengan demikian, universitas dan mahasiswa dapat mengetahui informasi tersebut dan dapat mencocokkan program pembangunan desa yang sesuai dengan keterampilan dan ketersediaan mereka. Platform ini telah terbukti berguna selama pandemi, dengan beberapa layanan di dalamnya, seperti pengembangan perangkat lunak, yang sekarang bisa dilakukan secara daring.

Sebagai bagian dari kegiatan penghentian bertahap pada tahun 2020, berikut adalah beberapa keluaran yang dapat dilaporkan:

- Sebagai pengelola Platform Digital, KOMPAK memprakarsai forum belajar: Webinar Untuk Desa (WUD) dan telah menyelesaikan 12 sesi pada tahun 2020 sejak forum ini pertama kali dilaksanakan di bulan Juni. Sepanjang tahun, webinar ini telah diikuti oleh 1.121 peserta dan berkontribusi pada sejumlah perguruan tinggi di bawah bimbingan Kementerian Agama (Kemenag) yang mengadopsi model UMD-KKN daring. Selain itu, sebanyak 224 pengguna telah mengakses platform, termasuk delapan perusahaan dan *start-up* sebagai mitra platform. KOMPAK akan melanjutkan rangkaian Webinar Untuk Desa pada 2021.
- Pada akhir tahun 2020, 24 universitas telah mengadopsi model tersebut dengan melibatkan lebih dari 13.000 mahasiswa di lebih dari 500 desa.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendukung pelaksanaan model UMD-KKN dalam kerja sama dengan Disdukcapil dan melibatkan sembilan perguruan tinggi di empat kabupaten dampingan KOMPAK. Buku Panduan KKN Tematik Adminduk tersedia secara gratis bagi perguruan tinggi mana pun yang ingin mengadopsi model tersebut.
- Didukung oleh SK Bupati pada tahun 2019, Kabupaten Pangkep melanjutkan penerapan model UMD yang melibatkan 14 universitas. Pemkab juga telah membentuk satu unit baru dalam struktur pemerintahan untuk memastikan model tersebut berjalan.
- Aceh juga mengadopsi model kolaborasi dengan membentuk konsorsium perguruan tinggi, untuk mengoptimalkan SEPAKAT dalam merancang program pengembangan masyarakat.





Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

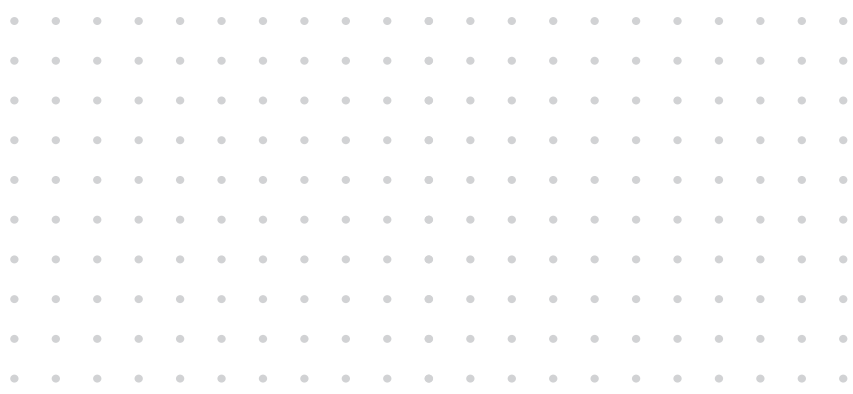
Pandemi COVID-19 telah memengaruhi pencapaian kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) di sepanjang tahun 2020. Studi oleh KOMPAK dan mitra mendapati bahwa pandemi memperdalam ketimpangan yang sudah ada sebelumnya, serta berdampak lebih besar pada perempuan, lansia, anak-anak, orang yang hidup dalam kemiskinan, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.²¹

Studi menunjukkan bahwa kesulitan hidup kelompok miskin dan rentan meningkat. Akses ke layanan sosial dan mata pencaharian terganggu karena penurunan pendapat yang besar. Pembatasan sosial dan perjalanan menghambat partisipasi kelompok rentan dan miskin dalam Musrenbang dan Musyawarah Khusus.

Sebagai respons, KOMPAK memperkuat studi dan kajian kebijakan tentang kerentanan serta dinamika kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI). Selain itu, KOMPAK mendukung pemerintah untuk mengadopsi kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan inklusi dan peluang partisipasi dalam penanganan COVID-19.

KOMPAK mengakhiri kegiatan khusus GESI pada tahun 2020, sebagai bagian dari transisi ke pendekatan kegiatan unggulan. Setelah itu, KOMPAK membuat keputusan strategis untuk

21 Bappenas, PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAK (2020), *Berkejaran dengan Waktu: Kajian Kebijakan untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak COVID-19 pada Anak dan Individu Rentan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia; DPO Network for Inclusive COVID-19 Response (2020), *Yang Bergerak dan yang Terdampak di Masa Pandemi: Suara Disabilitas dari Indonesia. Laporan Asesmen Cepat Dampak COVID19- bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta; PEKKA (2020) *Laporan Pemantauan Program Bantuan Sosial COVID-19*.



mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua tingkat dan tahapan kebijakan, program, dan proyek. Melalui pendekatan pengarusutamaan, KOMPAK dapat mengadvokasi isu-isu GESI dengan lebih baik sebagai bagian integral dari kegiatan unggulan di tingkat nasional dan daerah. Utamanya dengan secara langsung melibatkan mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Disabled People's Organization/DPO (organisasi penyandang disabilitas), dan masyarakat. Bagi KOMPAK, hal pentingnya adalah semua kegiatan khusus GESI yang diakhiri secara bertahap telah diadopsi oleh pemerintah daerah atau dilanjutkan oleh OMS.

Pada tahun 2020, sebagai langkah penting dalam kegiatan pengarusutamaan, KOMPAK memperkenalkan GESI tagging dalam sistem informasi manajemen (SIM) internal. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih sistematis untuk memberikan masukan teknis terkait GESI di semua kegiatan unggulan. KOMPAK melakukan 923 kegiatan di tahun 2020, dengan 196 di antaranya melaporkan langkah-langkah pengarusutamaan GESI. Pada tahun 2021, KOMPAK akan fokus pada pengambilan data terpilah untuk aspek disabilitas dalam semua kegiatan unggulan.

Memperkuat Sumber Daya Bukti dan Kebijakan tentang Gender, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2020, KOMPAK dan mitra melakukan empat penelitian utama yang secara langsung menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada kelompok rentan.²² Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendukung pemerintah merespons COVID-19 dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat menghasilkan kebijakan dan prioritas skala nasional dan daerah.

22 Ibid.

Survei tentang Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas

KOMPAK mendukung kajian cepat atas dampak pandemi COVID-19 terhadap penyandang disabilitas. Survei daring ini dilakukan bekerja sama dengan Jaringan DPO Respon COVID-19 Inklusif—jaringan dari 34 Organisasi Penyandang Disabilitas—MAHKOTA, PEDULI, AIPJ2, dan lembaga pembangunan internasional lainnya. Survei ini mengumpulkan informasi yang berasal dari ± 1.500 responden di 32 provinsi.

Survei ini menemukan bahwa COVID-19 secara signifikan memengaruhi pendapatan penyandang disabilitas. Enam dari tujuh penyandang disabilitas (86%) yang disurvei mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi terjadi. Mereka yang bekerja di sektor informal sangat terdampak dengan penurunan pendapatan sebesar 50% sampai 80%. Di sektor formal, pendapatan turun sebesar 20%. Penyandang disabilitas dengan pekerjaan yang bergantung pada interaksi langsung dengan pelanggan (misalnya tukang pijat, penata rambut, dll.) mengalami penurunan pendapatan terbesar, sementara sebagian kecil (<2%)—kebanyakan penjahit—mendapatkan peningkatan pendapatan karena meningkatnya pesanan alat pelindung diri, seperti masker kain dan baju medis. Survei tersebut juga menemukan bahwa kelompok tertentu mengalami penurunan pendapatan terbesar. Ini termasuk penyandang disabilitas lansia (di atas 60 tahun), tidak atau berpendidikan formal rendah, dan memiliki disabilitas ganda.

KOMPAK dan MAHKOTA telah menindaklanjuti survei ini dengan studi kualitatif yang lebih terperinci di tujuh provinsi untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih lengkap. Temuan awal mengonfirmasi bahwa penyandang disabilitas telah mengalami kerugian besar terkait ekonomi akibat COVID-19 dan menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses obat-obatan serta perawatan medis. Perempuan dalam rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas juga terkena dampak langsung karena peran ganda mereka sebagai pengasuh yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya pendapatan.

Studi ini juga menemukan bahwa cakupan bantuan telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa awal pandemi, termasuk BLT-Dana Desa yang ditujukan kepada keluarga miskin namun tidak terdaftar dalam sistem perlindungan sosial nasional. Program bantuan sosial ini sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Studi ini juga menyoroti perlunya langkah-langkah untuk memastikan kualitas data sesuai standar dalam pendataan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil survei dan studi tersebut, KOMPAK bekerja sama dengan MAHKOTA menyusun catatan kebijakan. Dalam catatan kebijakan ini, KOMPAK menaruh fokus pada dampak kesehatan, pendidikan, dinamika gender, dan respons pemerintah desa dalam membantu penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial (khususnya BLT-Dana Desa). Laporan tersebut akan diterbitkan pada 2021.

Survei untuk Memahami Dampak COVID-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan

Pada bulan Juni 2020, PEKKA dengan dukungan KOMPAK, MAMPU, dan Women's Voice and Leadership (WVL-GAC) melakukan survei terhadap lebih dari 6.000 rumah tangga di 17 provinsi. Survei tersebut memberikan wawasan tentang dampak pandemi pada perempuan dan kelompok rentan, akurasi dari data perlindungan sosial yang ada, dan tantangan dalam proses konsultasi desa inklusif dengan adanya pembatasan sosial.

Karakteristik peserta survei menggambarkan beberapa kerentanan bertumpuk yang sering dihadapi masyarakat.

Kerentanan	Persentase responded
Rumah tangga yang dikepalai perempuan	20,13%
Jenjang pendidikan tertinggi tingkat SD	50,03%
Pekerja sektor informal	87,7%
Anggota keluarga penyandang disabilitas	4,35%
Anggota keluarga lansia tinggal bersama di rumah	18,15%

Kesimpulan survei tersebut adalah bahwa pendekatan berbasis masyarakat untuk pengumpulan data dan pemberian layanan sangat penting untuk efektivitas distribusi bantuan sosial, sehingga harus dimasukkan ke dalam kebijakan nasional. Pendekatan ini termasuk melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pendistribusian BLT-Dana Desa, pelaksanaan program sosialisasi di desa untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan kelompok rentan, penggunaan sistem informasi desa untuk mendokumentasikan kelompok tersebut dan kerentanannya, serta verifikasi dan validasi data DTKS di tingkat masyarakat.

Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi:

- Akurasi data kelompok rentan. Ketidakakuratan status perkawinan dan dokumen kependudukan dapat menyebabkan duplikasi atau pengecualian dari program. Pengumpulan dan pengelolaan data berbasis masyarakat telah terbukti menjadi cara yang paling efektif untuk memverifikasi dan memvalidasi jenis data yang ada, seperti untuk DTKS dan dokumen kependudukan.
- Perempuan dan kelompok marginal masih terpinggirkan dari sebagian besar proses penyampaian aspirasi dan musyawarah desa. Beberapa penyebabnya antara lain pelaksanaan/peraturan yang tidak memadai, waktu penyampaian aspirasi yang tidak cukup, dan perwakilan kelompok elite yang mendominasi aspirasi. Untuk mengatasinya, diperlukan pedoman dan pelatihan yang jelas bagi aparat desa, serta mekanisme untuk memantau dan menegakkan atau mendorong inklusivitas.
- Program afirmatif untuk perempuan dan kelompok terpinggirkan perlu lebih diperkuat untuk merespons kebutuhan spesifik setiap kelompok, misalnya layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan, dukungan kepada pengasuh (terutama ibu) untuk mengawasi sekolah daring anak-anak mereka, dan layanan lainnya, khususnya selama pandemi, untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

Temuan dan rekomendasi tersebut diadvokasikan melalui webinar bertajuk “Feminisasi Kemiskinan dan Efektivitas Bantuan Sosial dalam Merespons Pandemi COVID-19.” Menteri Kemendesa PDPTT menjadi pembicara utama dan dihadiri lebih dari 1.200 perwakilan kementerian, pejabat pemerintah daerah, dan anggota masyarakat.

Catatan Kebijakan tentang Respons dan Pencegahan Dampak COVID-19 pada Anak-Anak dan Individu yang Rentan

Bappenas, dengan dukungan PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAK, menerbitkan catatan kebijakan yang menguraikan kelompok utama paling rentan terhadap dampak COVID-19, sebagai rekomendasi untuk upaya respons di masa depan. Kebijakan ini juga memuat perkiraan jumlah individu yang rentan, dengan menggunakan definisi yang telah dimodifikasi, yang harus ditargetkan untuk mendapatkan bantuan sosial.

Poin utama dari catatan kebijakan tersebut adalah bahwa kerentanan terhadap dampak COVID-19 tidak semata-mata ditentukan oleh kemiskinan. Pandemi dapat memperburuk kerentanan yang sudah ada, sementara kelompok rentan baru muncul. Oleh karena itu, bantuan sosial dan upaya penanganan COVID-19 lainnya, seharusnya tidak hanya menargetkan individu dan rumah tangga miskin. Tetapi juga mempertimbangkan ukuran kerentanan yang lebih luas dan lebih dinamis.²³

Naskah Penelitian tentang Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dari Program BANGGA Papua

KOMPAK bekerja sama dengan MAHKOTA memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam pengembangan dan pelaksanaan BANGGA (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) Papua. BANGGA Papua adalah program hibah untuk anak secara menyeluruh yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Papua dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Hingga bulan Juli 2020, terdapat 23.000 ibu dan wali perempuan yang menerima tunjangan untuk 32.000 anak. Di luar tujuan program untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak asli Papua, menstimulus ekonomi mikro dari tingkat desa hingga kabupaten, dan mengurangi kemiskinan di daerah sasaran, program ini memiliki fokus kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) yang kuat dengan menargetkan perempuan dan anak-anak Orang Asli Papua (OAP) sebagai penerima manfaat utama.

KOMPAK melakukan studi program BANGGA Papua dari perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial yang hasilnya akan diterbitkan pada tahun 2021. Studi ini didasarkan pada kombinasi sumber data primer dan sekunder, termasuk wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan di tiga kabupaten uji coba pada bulan Maret 2020. Laporan dan rekomendasinya melengkapi Evaluasi Proses BANGGA Papua yang diterbitkan pada akhir tahun 2020.

Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa desain awal program BANGGA Papua dan tujuan program sejalan dengan nilai dan prinsip GESI. Bantuan langsung tunai kepada perempuan—berdasarkan aspirasi mereka—memberi mereka keleluasaan dalam menggunakan dana ini dan mengarah pada perbaikan kesehatan dan gizi anak-anak.

23 Silakan merujuk ke bagian PASH dari laporan ini untuk perincian lebih lanjut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa program BANGGA Papua menunjukkan indikasi awal perubahan yang positif, tetapi juga ada beberapa dampak yang tidak diinginkan. Penting bagi pemerintah provinsi dan mitra pembangunan untuk memantau dengan cermat perubahan-perubahan ini, baik positif maupun negatif, dan kemudian menyesuaikan program serta penyampaian pesan dengan sasaran yang dituju. Diperlukan penilaian yang sesuai terhadap risiko program dan pemahaman tentang potensi dampak negatif yang dapat terjadi dari kelanjutan, peningkatan atau penurunan skala, ataupun perubahan desain program. Program ini memiliki potensi yang sangat besar, tetapi untuk mewujudkannya, program harus terus dikaji dan ditingkatkan. Lihat bagian Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) dari laporan ini untuk rincian lebih lanjut tentang dukungan KOMPAK.

Rekomendasi dari berbagai penelitian yang disebutkan di atas telah digunakan untuk mendukung advokasi penanganan COVID-19 yang lebih inklusif oleh pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, sejalan dengan temuan studi PUSKAPA yang didanai KOMPAK tentang definisi kerentanan (Perluasan Makna Kerentanan), KOMPAK mengadvokasi pelibatan kelompok rentan, kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, serta masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai kelompok sasaran utama program perlindungan sosial pemerintah daerah. Usulan kriteria kelompok rentan tersebut diadopsi dalam peraturan daerah-daerah terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah.

Beberapa sorotan utama dari kegiatan advokasi dan penjangkauan KOMPAK meliputi:

- Pada bulan November 2020, KOMPAK mempresentasikan praktik baik dan pembelajaran dari layanan dasar inklusif di Temu Inklusi—forum nasional dua tahunan yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas di Indonesia. Perwakilan dari tiga pemerintah daerah di tiga kabupaten wilayah kerja KOMPAK mempresentasikan inovasi lokal mereka dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip inklusif disabilitas ke dalam layanan PASH

KOMPAS Talks

WEBINAR NASIONAL 3
INOVASI DAERAH DALAM MENDORONG
PELAYANAN DASAR **YANG INKLUSIF**

Pendaftaran
19 NOVEMBER 2020
09.00 - 12.00 WIB

MODERATOR:
Serge Helian Simanungur
Wartawan Kompas

Kintan Blasiga
Minister Counsellor Governance
and Human Development,
The Australian Embassy

Suheras Monorita
Menteri Perencanaan dan
Pembangunan Nasional
PPNV/Bappenas

Harry Hikmat
Direktur Jenderal
Kemertanian

Andi
Direktur PPKM
Bappenas

Rita Widiawati
Direktur PSD
Kementerian RI

Azwa Winda
Team Leader
KOMPAK

Suharto
Direktur SICAB

Rena Pulitjessari
Kadivros Tenggara

Hutiyast
Bappenas Pakelangan

T. Syakir
Kadis Deputi dan
Kepemudaran Aceh

Harri Sodikin
Direktur SAPDA

temuinklusi.sigab.or.id/2020

Tersedia Penerjemah Bahasa Isyarat

Kementerian PPKM Bappenas
Australian Government
KOMPAK
sigab
LIVE ON zoom @harriankompas @bappenas RI

di Aceh, sistem pendidikan di Pekalongan, Jawa Tengah, dan proses pengambilan keputusan pembangunan daerah di Trenggalek, Jawa Timur. Presentasi mereka menyoroti perbaikan signifikan yang dihasilkan dari inovasi ini, misalnya jumlah sekolah inklusi meningkat dari tujuh menjadi 20 untuk jenjang SD dan dari tiga menjadi 20 SMP melalui Program Gerakan Kudu Sekolah di Pekalongan. Sebanyak 323 anak putus sekolah penyandang disabilitas berhasil diidentifikasi dan diberi kesempatan untuk bersekolah.

- KOMPAK bersama DPO—organisasi penyandang disabilitas—dan lembaga pembangunan lainnya peserta Temu Inklusi menyusun catatan kebijakan mengenai perencanaan layanan sekolah bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).

Melaksanakan Program untuk Mempromosikan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Inklusi Sosial

KOMPAK telah memberikan bantuan untuk meningkatkan inklusivitas pemberian layanan dasar dan bantuan sosial. Bantuan diberikan melalui investasi lintas sektor dalam sistem informasi desa dan pencatatan sipil, mekanisme partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial, serta inisiatif pemberdayaan perempuan.

Pengumpulan data

KOMPAK telah bekerja sama dengan pemerintah desa dan kabupaten untuk meningkatkan pengumpulan dan penggunaan data kelompok rentan guna menunjang penanganan COVID-19 yang lebih tepat sasaran. Hal ini dicapai melalui penguatan peran dan kapasitas fasilitator PASH yang secara aktif mengidentifikasi dan membantu perempuan dan individu rentan untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran. Model ini terbukti penting dalam respons COVID-19 guna melengkapi program perlindungan sosial dan meningkatkan jenis data untuk sistem informasi desa. Sistem informasi ini menjadi alat penting dalam mengidentifikasi penerima manfaat program perlindungan sosial serta untuk memverifikasi dan memvalidasi data di DTKS.

Partisipasi Kelompok

Keterwakilan perempuan dan kelompok rentan yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan respons COVID-19 menjadi prioritas utama KOMPAK. Bukti lintas sektor menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak meminta pendapat kelompok perempuan atau tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan menjadi kurang efektif, dan bahkan dapat merugikan.²⁴

KOMPAK telah mengadvokasi pemerintah untuk memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Ini termasuk pengembangan dan percontohan model, seperti forum praperencanaan untuk perempuan dan kelompok rentan (Musyawarah Khusus), mekanisme aspirasi masyarakat (Posko Aspirasi), dan program bantuan sosial (BANGGA Papua). Model-model ini juga terbukti berguna dalam respons COVID-19, menyediakan kerangka kerja untuk melibatkan perempuan dan kelompok rentan.²⁵

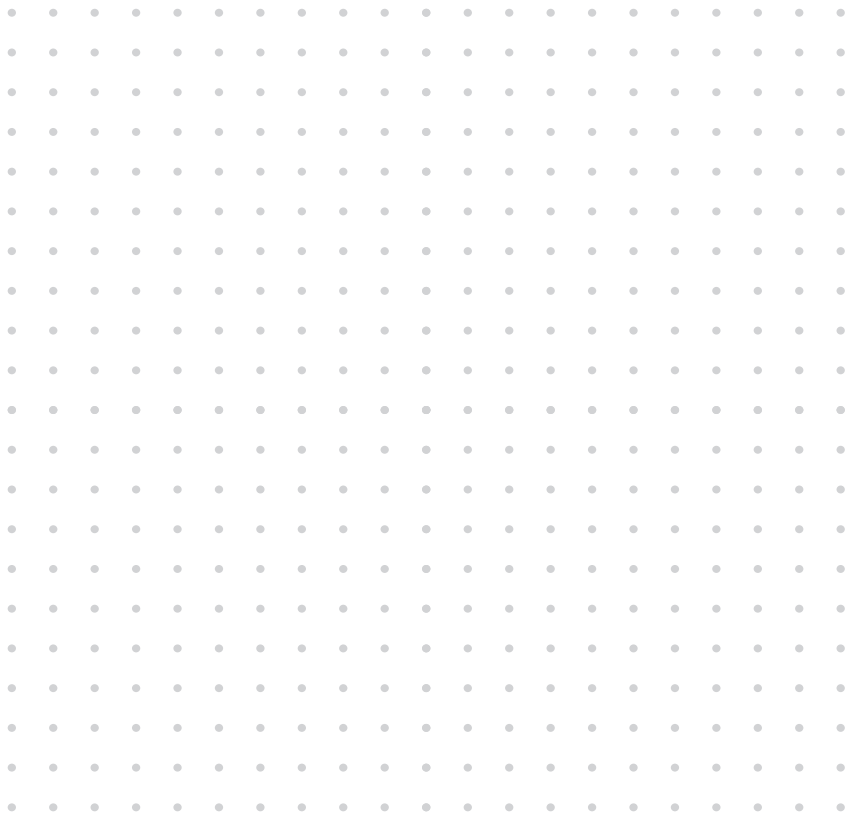
Pada awal tahun 2020, KOMPAK menyelesaikan asesmen GESI pada dua model, yaitu Musrenbang Inklusif dan BANGGA Papua (telah diuraikan sebelumnya).

Musrenbang Inklusif memberikan ruang bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam proses Musrenbang dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai hasil positif bagi kelompoknya, seperti peningkatan alokasi anggaran yang ditujukan bagi perempuan dan kelompok rentan. Hal ini menggembirakan mengingat 75% desa dampingan KOMPAK yang disurvei pada Desember 2020 (di luar Papua) telah mengadopsi model tersebut.

Namun, asesmen tersebut juga menemukan bahwa model tersebut dapat diperkuat dengan perbaikan pada keseluruhan pedoman dan metodologi pelibatan kelompok rentan. Tim GESI mencatat bahwa forum-forum ini biasanya terlalu formal di tingkat desa, terlalu banyak orasi di kecamatan, dan agendanya terlalu padat di tingkat kabupaten. Artinya, tidak ada cukup waktu yang dialokasikan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok rentan. Memperjelas peran selama pertemuan, meningkatkan pelatihan untuk fasilitator, meningkatkan identifikasi melalui sistem informasi desa, dan meningkatkan keterwakilan dari desa dan tingkat pemerintahan lainnya akan membantu dalam peningkatan hasil forum ini.

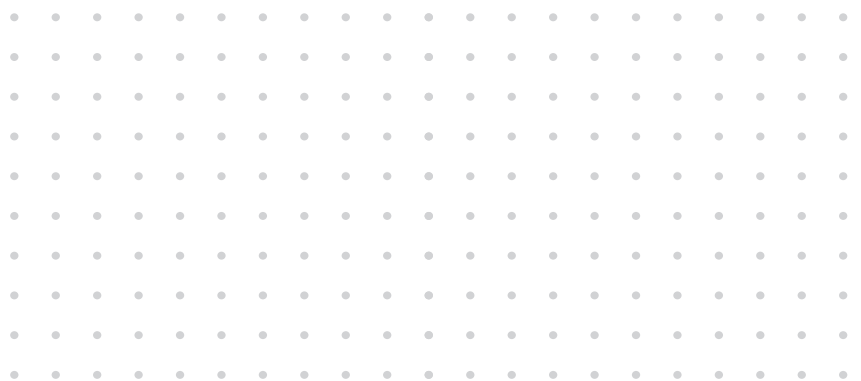
24 <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406>

25 Silakan juga merujuk ke bagian Akuntabilitas Sosial untuk detailnya.



— **Penelitian**

Saat KOMPAK mendekati tahun terakhirnya sebelum berakhir pada bulan Juni 2022, ada peningkatan kebutuhan untuk menunjukkan hasil yang membuktikan efektivitas model yang sudah diujicobakan dan bantuan teknis yang telah diberikan. Berbagai bukti dan hasil ini berguna bagi KOMPAK dan mitra dalam menyusun rencana dan keberlanjutan program, mengadvokasi pengembangan dan replikasi, serta membantu penyusunan dokumentasi untuk serah terima program kepada mitra pemerintah. Berikut ini adalah daftar penelitian dan kajian evaluasi, selain bantuan teknis yang sedang berlangsung dan dukungan analisis yang diberikan oleh tim KOMPAK.



Daftar penelitian dan kajian evaluasi

Diterbitkan tahun 2020²⁶

Respons terhadap COVID-19

Dampak COVID-19 terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia

Tujuan: Memahami bagaimana pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, dan kontribusi potensial penyandang disabilitas.

Metode utama: Kuantitatif.

Ruang Lingkup: 1.683 responden penyandang disabilitas dari 32 provinsi.

Analisis Dampak COVID-19 terhadap PAUD

Tujuan: Menghasilkan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap PAUD dan bagaimana kebijakan pemerintah merespons situasi yang sedang berlangsung.

Metode utama: Kuantitatif dan kualitatif.

Ruang Lingkup: Tiga kabupaten (Brebes, Pemalang, dan Sumbawa).

Analisis Kebijakan Nasional Dampak COVID-19 terhadap UKM

Tujuan: Mengukur dampak pandemi COVID-19 terhadap UKM di Indonesia dan mengidentifikasi respons atas kebijakan tertentu yang diterbitkan pemerintah.

Metode utama: Kuantitatif dan kualitatif.

Ruang Lingkup: Seluruh Indonesia.

26 Mungkin belum dipublikasikan untuk umum, namun analisisnya bersifat final dengan diseminasi terbatas.

Umum

Analisis APB Desa 2019 di Wilayah Kerja KOMPAK

Tujuan: (1) Menganalisis pengeluaran di desa dampingan KOMPAK untuk menilai apakah ada peningkatan alokasi anggaran untuk layanan dasar (pendidikan dan kesehatan); dan (2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dan mendorong perubahan belanja di tingkat desa.

Metode Utama: Analisis kuantitatif anggaran desa dan peraturan daerah terkait.

Ruang Lingkup: Semua desa dampingan KOMPAK.

Evaluasi Inisiatif UMD di Aceh, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan

Tujuan: Membahas persoalan apakah model UMD KOMPAK: (1) Eefektif dalam menghubungkan universitas dan mahasiswa dengan desa dan program pembangunan; dan (2) merupakan pendekatan yang efisien untuk mengatasi masalah pembangunan.

Metode Utama: Kualitatif melalui desk-review dokumen proyek, wawancara mendalam, dan analisis nilai atas investasi yang diberikan (value-for-money).

Ruang Lingkup: Semua universitas uji coba UMD, dengan studi kasus terpilih.

Studi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang Profil Kebutuhan Pembiayaan: Kesenjangan Penawaran dan Permintaan

Tujuan: Mengidentifikasi segmen UMK yang belum terlayani dan merumuskan kemungkinan sumber pembiayaan untuk jenis usaha tersebut.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Tiga kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan satu kabupaten di Yogyakarta.

Umum

Studi Kelayakan Uji Coba Blockchain dan Teknologi Lainnya untuk Mendukung BANGGA Papua

Tujuan: Mengidentifikasi kelayakan penerapan blockchain atau teknologi lain yang dapat mendukung program BANGGA Papua untuk diterapkan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Kabupaten Asmat, Papua.

Studi Midline PASH

Tujuan: (1) Menilai perubahan terkait PASH periode 2015–2019 dan apakah telah selaras dengan capaian yang diharapkan; (2) Meninjau kontribusi, jika ada, intervensi atau kegiatan KOMPAK terhadap perubahan tersebut; (3) Mengkaji tingkat layanan dan keterhubungan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan PASH; dan (4) Mendalami peluang dan tantangan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan serta penguatan desa, transparansi anggaran, dan akuntabilitas sosial untuk mendukung PASH.

Metode Utama: Kuantitatif, dilengkapi kualitatif untuk memahami proses dan peran KOMPAK/mitra.

Ruang Lingkup: Lima provinsi, sepuluh kabupaten.

PASH dalam Situasi Pascabencana

Tujuan: (1) Mengumpulkan informasi terkait proses pemulihan layanan PASH pascabencana; (2) Mengumpulkan informasi tentang penggunaan data kependudukan dalam proses pemulihan pascabencana; (3) Mengembangkan konsep layanan PASH dalam strategi kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko bencana, dan mekanisme tanggap darurat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Lombok Utara (NTB) dan Sigi (Sulawesi Tengah).

Umum

PASH untuk Kelompok Rentan

Tujuan: (1) Mengidentifikasi definisi dan karakteristik kelompok rentan terhadap layanan PASH; (2) Mengkaji kebijakan kementerian terkait yang berpotensi menjangkau kelompok rentan; (3) Mengidentifikasi praktik baik untuk layanan tertentu yang telah diterapkan di beberapa lokasi; (4) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk layanan PASH yang lebih inklusif.

Metode Utama: Kualitatif.

Ruang Lingkup: Seluruh Indonesia.

Analisis Kendala Anggaran

Tujuan: (1) Memberikan analisis kinerja keuangan daerah di beberapa kabupaten wilayah kerja KOMPAK; (2) Memberikan analisis efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan SKPD/OPD di beberapa sektor (pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, dan pengembangan ekonomi lokal); dan (3) Memberikan contoh metodologi sederhana bagi pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan di daerah dalam melakukan analisis serupa.

Metode Utama: Kuantitatif, review pengeluaran untuk mengukur efektivitas dan efisiensi (menggunakan LAKIP dan EKPPD).

Ruang Lingkup: Semua kabupaten di wilayah kerja KOMPAK.

Akademi Paradigta Analisis Pelatihan Kepemimpinan Perempuan (PEKKA)

Tujuan: Mendokumentasikan model Akademi Paradigta sebagai model pemberdayaan perempuan.

Metodologi: Kualitatif melalui desk-review dokumen proyek dan peraturan, diskusi kelompok terarah/terfokus, dan wawancara mendalam

Ruang Lingkup: Brebes (Jawa Tengah) dan Lombok Timur dan Utara (NTB).

Umum

Analisis situasi KOMPAK (untuk internal)

Tujuan: (1) Memberikan latar belakang sosial ekonomi tempat KOMPAK beroperasi dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder termasuk SUSENAS dan PODES; dan (2) Memberikan landasan untuk memperkuat intervensi berdasarkan kondisi wilayah kerja KOMPAK terkini.

Metode Utama: Kuantitatif

Ruang Lingkup: Semua wilayah kerja KOMPAK

Topik yang dibahas pada 2020:

1. Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2021
2. Indonesia Mengalami Lonjakan Kemiskinan di Tengah Pandemi
3. Indonesia Maju sebagai Negara Berpenghasilan Menengah Atas
4. Profil Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Dampingan KOMPAK
5. Daerah Tertinggal 2020–2024
6. Status PASH KOMPAK 2019
7. Disabilitas di Wilayah Kerja KOMPAK 2019
8. Kemiskinan dan Ketimpangan, September 2019
9. Sensus Penduduk Indonesia 2020

Total pengeluaran KOMPAK dari Januari hingga Desember 2020 tercatat sebesar \$15,59 juta²⁷ (tidak termasuk biaya manajemen). Dari pengeluaran tersebut, sebanyak 44% digunakan untuk biaya kegiatan, 49% untuk biaya personel, dan 7% untuk biaya operasional.

Pengeluaran KOMPAK tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 untuk semua kategori pengeluaran—biaya personel (\$7,55 juta pada 2020 dan \$8,1 juta pada 2019), biaya operasional (\$1,12 juta pada 2020 dan \$2,3 juta pada 2019), dan biaya kegiatan (\$6,92 juta pada 2020 dan \$10,1 juta pada 2019). Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembatasan terkait COVID-19 yang berdampak pada kegiatan KOMPAK selama tiga kuartal tahun ini. Sejak bulan Maret 2020, personel KOMPAK beralih ke mode *Work-from-Home/WFH* (bekerja dari rumah) dan sebagian besar kegiatannya dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, biaya kegiatan dan operasional mengalami penurunan yang signifikan dari alokasi anggaran. Namun, biaya personel meningkat (meskipun nilai pengeluarannya masih lebih rendah dari alokasi anggaran).

Pengeluaran tingkat daerah mencapai 41% dari total pengeluaran (tidak termasuk biaya manajemen). Pengeluaran tingkat nasional lebih besar untuk personel karena lintas sektor, penghentian bertahap, dan dukungan lainnya (tim *Executive* dan *Performance*), serta alokasi untuk tenaga ahli dalam tim Implementasi yang memberikan dukungan teknis kepada mitra di tingkat daerah dan pusat (tetapi berkantor di Jakarta).

Investasi daerah terbesar—20% dari total pengeluaran—berada di Papua (\$3,15 juta), sebagian besar melalui Program LANDASAN dan mitra hibah BaKTI. Investasi di provinsi lain berkisar antara \$0,49 hingga \$0,79 juta tahun ini.

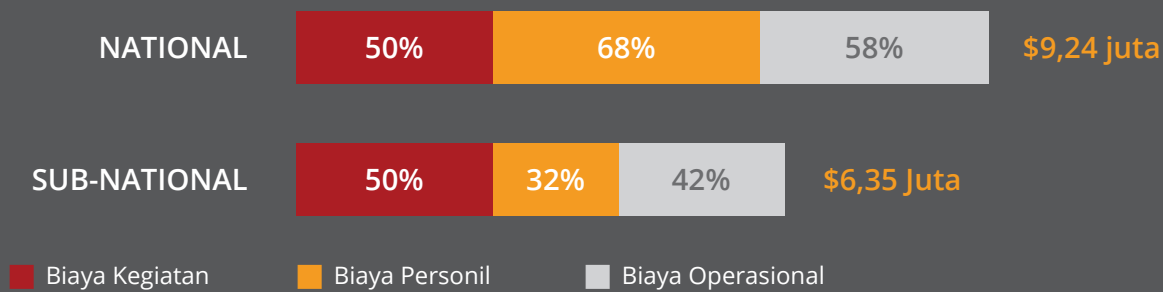
Dari pengeluaran kegiatan (\$6,92 juta), sebagian besar digunakan untuk Kegiatan Unggulan (83%) dan sisanya untuk kegiatan lintas sektor atau kegiatan non-unggulan dan dukungan program.

²⁷ Semua \$ mengacu ke dolar Australia

Total Pengeluaran **\$15.591.428**

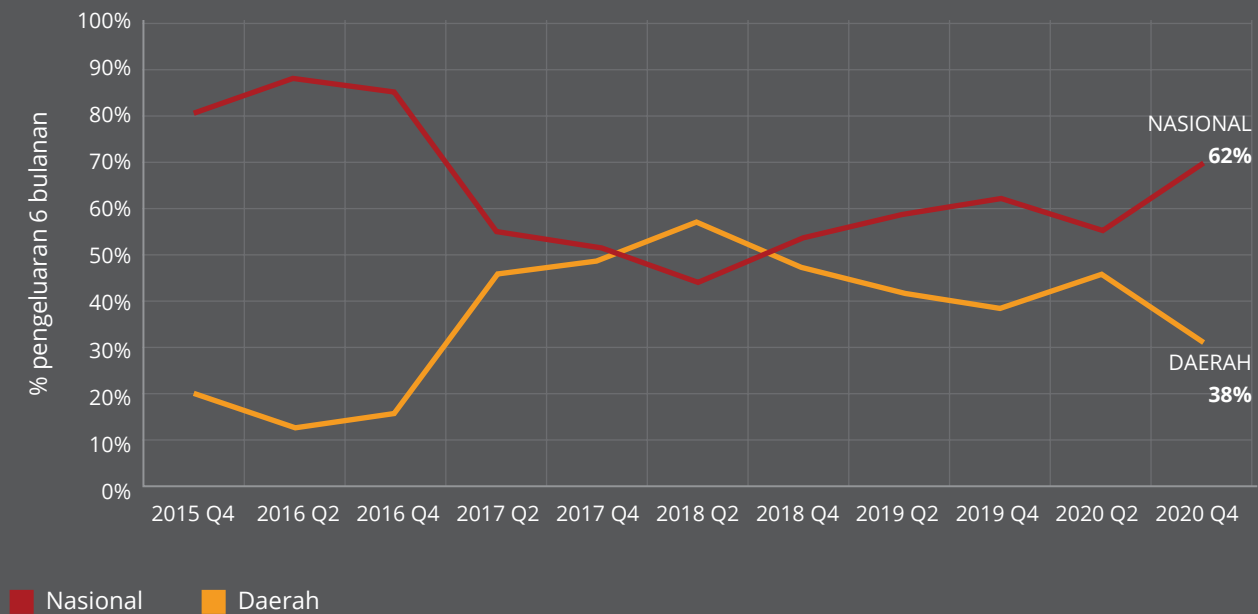
Pengeluaran Nasional dan Daerah

Januari-Desember 2020 Total = \$15,59 juta



Persentase pengeluaran tingkat nasional dan daerah

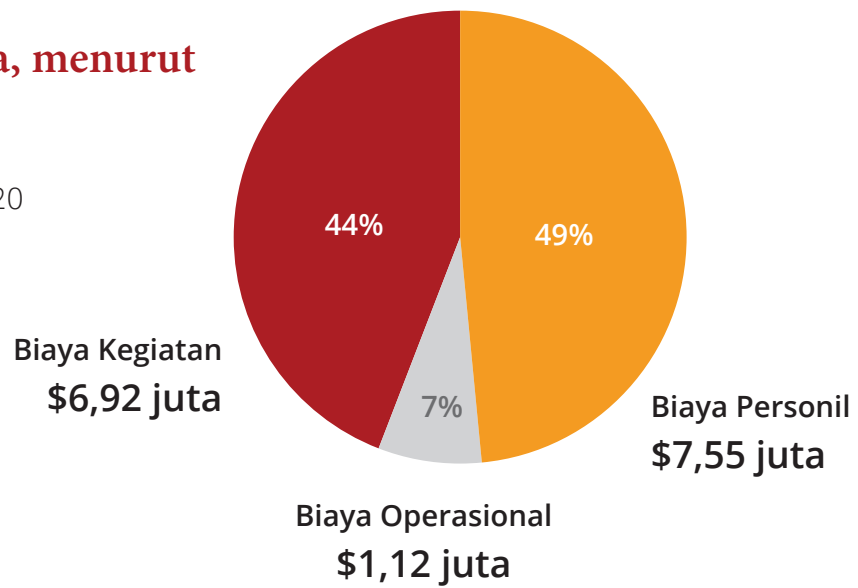
2015–2020



Persentase biaya, menurut jenis kegiatan

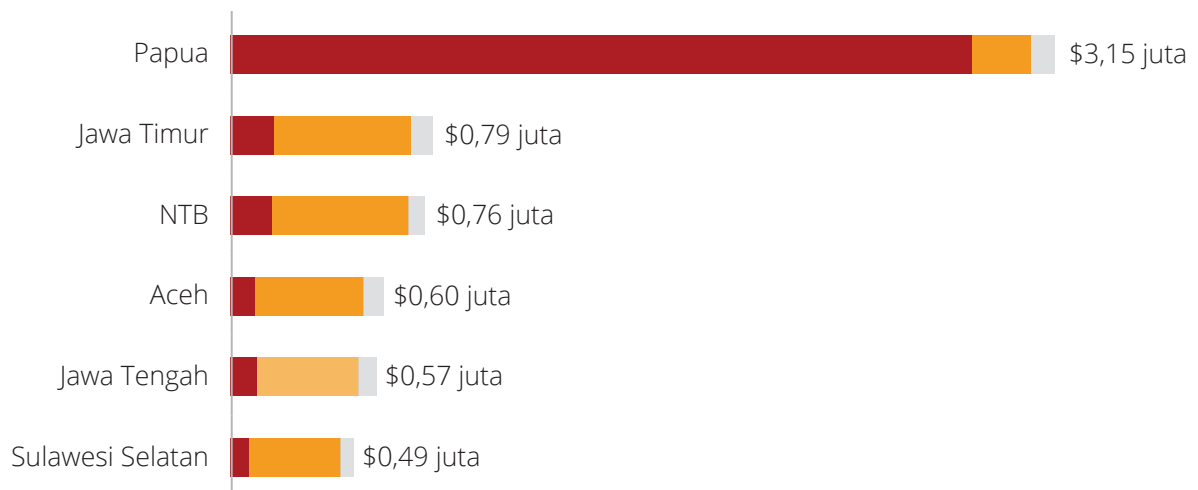
Januari–Desember 2020

Total = \$15,59 juta



Total Pengeluaran Daerah

Januari–Desember 2020 Total = \$6,35 juta



■ Biaya Kegiatan
 ■ Biaya Personil
 ■ Operational Costs

Total biaya kegiatan berdasarkan Kegiatan Unggulan

Januari–Desember 2020 Total = \$6,92 juta

Kegiatan Unggulan	Anggaran	Pengeluaran Aktual	% pengeluaran
Pengelolaan Keuangan Publik (PFM)	1.177.99,91	1.042.657,21	89%
PASH	1.271.634,76	1.034.069,51	81%
Penguatan Kecamatan dan Desa	1.392.759,66	1.706.590,15	123%
Sistem Informasi Desa	935.121,62	965.871,84	103%
Akuntabilitas Sosial	471.431,64	735.780,91	156%
Pengembangan Ekonomi Lokal	298.728,65	256.891,70	86%
Lintas Sektor (GESI dan Inovasi Digital)	243.226,19	193.534,35	80%
Penghentian Bertahap	143.667,27	82.012,38	57%
Lainnya (Pemerintah, Penelitian, P&A, Komunikasi, melanjutkan program 2019)	1.120.267,01	897.533,65	80%
Total	7.054.828,71	6.914.941,70	98%

Total biaya kegiatan – nasional dan daerah

Daerah	Anggaran	Pengeluaran Aktual	% pengeluaran
Nasional	3.279.404,42	3.450.724,05	105%
Aceh	271.112,51	99.543,21	37%
Jawa Tengah	329.737,32	107.762,45	33%
Jawa Timur	414.561,61	182.429,19	44%
Papua and Papua Barat	2.169.044,39	2.828.496,85	130%
Sulawesi Selatan	266.672,89	79.712,55	30%
Nusa Tenggara Barat	324.295,57	166.273,40	51%
Total	7.054.828,71	6.914.941,70	98%

Lampiran 1. Daftar Indikator KOMPAK 2020 (Rencana Kerja Reguler)

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
1. Sistem dan Analisis Pengelolaan Keuangan Publik				
1.1. Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten agar menggunakan sistem dan analisis Pengelolaan Keuangan Publik untuk perencanaan dan penganggaran (SEPAKAT, Analisis Kendala, dan SPM)				
1	% kabupaten dampingan KOMPAK yang mengintegrasikan SPM ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja tahunan, dan mengalokasikan dana untuk pencapaian SPM.	100%	●	87% (20 Kabupaten).
2	% kabupaten di wilayah kerja KOMPAK yang melaporkan pencapaian tahunan kerangka kerja monitoring SPM kesehatan dan pendidikan.	100% (di luar tahun 2020)	●	13% (3 dari 24 kabupaten di wilayah kerja KOMPAK, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Brebes telah melaporkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan dan kerangka pemantauan atau instrumen pemantauan dan evaluasi pendidikan tahun 2019). <ul style="list-style-type: none"> Catatan: Semua kabupaten di wilayah kerja KOMPAK di luar Papua dan Papua Barat (16 kabupaten) telah melaporkan pelaksanaan SPM kesehatan dan pendidikan di tahun 2019. Sementara di wilayah Papua, Kabupaten Jayapura dan Kaimana melaporkan pelaksanaan SPM kesehatan dan pendidikan (2 dari 8 kabupaten).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
3	# kabupaten di wilayah kerja KOMPAK yang menggunakan sistem PFM untuk perencanaan dan penganggaran kabupaten.	Tidak ditarget	●	10 kabupaten
4	Skor rata-rata kabupaten dalam penggunaan sistem PFM untuk mendukung perencanaan dan penganggaran.	>4	●	4.4
5	Contoh bagaimana kabupaten menggunakan sistem PFM untuk perencanaan dan penganggaran.	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RPJMD di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep menggunakan hasil analisis SEPAKAT terutama mengenai gambaran umum kondisi wilayah. Hasil analisis SEPAKAT digunakan untuk perencanaan program pengentasan kemiskinan di Kab. Pacitan, Bondowoso, dan Trenggalek.

1.2. Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengakses dan menggunakan dana pemerintah pusat (DAK fisik dan nonfisik, serta DID) untuk mendukung pemberian layanan dan pelembagaan model KOMPAK.

6	% proposal DAK fisik yang diajukan melalui aplikasi KRISNA telah disetujui.	Tidak ditarget	●	100% provinsi dan kabupaten di wilayah kerja KOMPAK (7 provinsi dan 24 kabupaten telah mengajukan proposal DAK Fisik untuk sektor pendidikan dan kesehatan melalui KRISNA dan sudah mendapatkan alokasi untuk TA 2021).
7	% jumlah DAK fisik yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.	Rata-rata nasional	●	60% cakupan secara nasional di TA 2020. 63% cakupan di wilayah kerja KOMPAK (provinsi dan kabupaten) pada TA 2020.

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
8	% dan nilai di kabupaten wilayah kerja KOMPAK di luar wilayah Papua yang menerima Dana Insentif Daerah (DID).	Peningkatan tahun ke tahun	●	TA 2020: 58% (14 kabupaten). TA 2021: 67% (16 kabupaten, semua kabupaten di wilayah kerja KOMPAK di luar wilayah Papua).
9	% kabupaten wilayah kerja KOMPAK yang menyelesaikan analisis pembiayaan SPM dan hasil yang digunakan untuk mengalokasikan DAK nonfisik.	Tidak ditarget	●	43% (10 kabupaten).
1.3. Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Aceh untuk melaksanakan kebijakan Otsus.				
10	Daftar dukungan kebijakan serta rekomendasi yang diberikan (dan ditindaklanjuti, jika ada) dari evaluasi Otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> Masukan teknis telah digunakan untuk Revisi UU 21/2001 tentang Otsus Papua dan Papua Barat oleh Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas. Masukan teknis pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk rancangan revisi UU Otsus bersama Kemenkeu.
11	Daftar dukungan kebijakan dan rekomendasi yang diberikan (dan ditindaklanjuti, jika ada) pada sistem transfer pada program hibah untuk anak di Papua di bidang-bidang berikut: pembayaran, pendaftaran, komunikasi, dan tata kelola.	Tidak ditarget	●	Pertemuan dilakukan dengan MAHKOTA dan DFAT untuk mengadvokasi pembayaran kepada penerima manfaat pada tahun 2020. Hasil: MAHKOTA pergi ke Papua untuk melobi pemerintah provinsi. Surat dari tiga Bupati di tiga kabupaten yang diuji coba dan surat dari DHOM-DFAT dikirim ke Gubernur Papua. Namun, tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada penerima manfaat karena prioritas penganggaran adalah untuk pembiayaan fasilitas olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
12	% dari semua kabupaten di Aceh yang menyusun Rencana Aksi Dana Otsus dan telah terintegrasi ke dalam e-planning dan penganggaran (SIPD).	100% (13)	●	Kegiatan yang mendukung indikator target ini akan dilakukan pada tahun 2021.

1.4 Mengembangkan dan mendukung pelebagaan model pendanaan insentif berbasis kinerja untuk desa agar memperkuat pemberian layanan (DINDA).

13	Daftar dukungan kebijakan dan rekomendasi yang diberikan (dan ditindaklanjuti, jika ada) pada insentif berbasis kinerja dalam formula Dana Desa.	Tidak ditarget	●	<p>Rekomendasi KOMPAK dari dua Catatan Kebijakan tentang Dampak Dana Desa telah dimasukkan ke dalam revisi rumusan perhitungan DD 2021 yang diatur dalam PMK 222/2020 dan UU APBN No. 9/2020. Revisi untuk meningkatkan rumus dan alokasi kinerja serta menurunkan alokasi dasar dan afirmatif secara bertahap dari alokasi dasar 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar 2020: Alokasi Kinerja: Alokasi Afirmasi: Alokasi Rumus = 69% : 1,5% : 1,5% : 28%. Alokasi Dasar 2021: Alokasi Kinerja: Alokasi Afirmasi: Alokasi Formula = 65% : 3% : 1% : 31%.
14	# kabupaten yang menerapkan model insentif berbasis kinerja (misalnya DINDA) untuk desa.	Tidak ditarget	●	7 kabupaten (Aceh Barat, Trenggalek, Bener Meriah, Lumajang, Sumbawa, Bima, Bantaeng).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
2. PASH yang Inklusif dan Transparan				
2.1. Meningkatkan cakupan, kapasitas, pembiayaan daerah, dan interkoneksi pendekatan PASH berbasis desa dan kecamatan				
15	% cakupan akta kelahiran menurut kelompok umur.	85% per kabupaten (untuk <18 tahun) 77% (untuk <18 tahun di rumah tangga miskin)	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 87% (<18 tahun); 78% (<18 tahun, miskin). Tahun 2020: 90% (<18 tahun); 92% (<18 tahun, miskin).
16	% desa dampingan KOMPAK yang memiliki Fasilitator PASH Desa khusus atau perangkat desa yang menyediakan layanan PASH.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 92% (245 desa di luar Papua dan Papua Barat). Tahun 2020: 100% (267 desa di luar Papua dan Papua Barat).
17	# rata-rata masyarakat di desa dampingan KOMPAK yang dibantu untuk mendapatkan akta kelahiran.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 70 per desa, di luar Papua dan Papua Barat. Tahun 2020: 37 per desa, di luar Papua dan Papua Barat.
2.2. Memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan unit layanan (misalnya klinik, rumah sakit, dan sekolah) untuk mempercepat cakupan PASH				
18	% desa yang memberikan setidaknya satu dokumen kependudukan kepada penyandang disabilitas dalam enam bulan terakhir.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 37% (98 desa di luar Papua dan Papua Barat). Tahun 2020: 45% (119 desa di luar Papua dan Papua Barat).
19	% Kecamatan (dengan dukungan Dukcapil) yang memberikan layanan sosialisasi ke unit layanan (fasilitas kesehatan dan pendidikan) untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran dalam enam bulan terakhir.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 68% (17 kecamatan). Tahun 2020: 76% (19 kecamatan).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
2.3 Mengembangkan dan memasukkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat layanan PASH bagi kelompok rentan				
20	Daftar masukan kebijakan dan rekomendasi yang diberikan pada pedoman nasional untuk meningkatkan layanan PASH desa (dan tindakan pemerintah, jika ada).	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> • Di tingkat nasional, bersama program unggulan SID, KOMPAK memberikan masukan untuk BLT-Dana Desa. • Di tingkat nasional, pedoman nasional dan serangkaian SOP untuk mengimplementasikan layanan PASH berbasis desa telah dikembangkan. Pedoman nasional saat ini sedang ditinjau oleh Bappenas.
21	Pedoman nasional untuk pelayanan pencatatan sipil bagi kelompok rentan yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh Pemerintah Indonesia.	Peraturan diterbitkan dan disebar-luaskan	●	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman nasional dan serangkaian SOP untuk mengimplementasikan layanan PASH berbasis desa telah dikembangkan. Pedoman nasional saat ini sedang ditinjau oleh Bappenas. • Sebagai respons pandemi COVID-19, KOMPAK dan PUSKAPA telah menyusun SOP layanan PASH untuk kelompok miskin dan rentan selama pandemi. SOP ini telah digunakan untuk melatih fasilitator PASH di Aceh, Sulawesi Selatan, NTB, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. • Selama periode pelaporan, rancangan pedoman awal untuk penjangkauan PASH kepada kelompok miskin dan rentan telah dibuat, dan saat ini sedang dikembangkan lebih lanjut secara internal.

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
3. Penguatan Kecamatan dan Desa				
3.1. Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan model pemerintahan kecamatan dan desa (PTPD dan PbMAD)				
22	% dari semua kecamatan di kabupaten wilayah kerja KOMPAK yang menerapkan model PTPD.	100%		47% (177 dari 373 kecamatan di seluruh kabupaten, di luar Papua dan Papua Barat).
23	# kabupaten di luar kabupaten wilayah kerja KOMPAK, yang mereplikasi model PTPD dengan dukungan KOMPAK.	Tidak ditarget		3 kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> • Sumenep (Jawa Timur) • Barru (Sulawesi Selatan) • Gayo Luwes (Aceh)
24	# kabupaten di luar kabupaten wilayah kerja KOMPAK, yang mereplikasi model PTPD dengan dukungan KOMPAK.	> 4.0 dari 5		4,38
25	% desa yang telah menerima atau telah mengakses bantuan teknis dari fasilitator PTPD dalam enam bulan terakhir.	80%		92% (337 desa di luar Papua dan Papua Barat).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
26	Daftar kebijakan yang didukung dan rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat kelembagaan model PTPD (dan tindakan pemerintah terkait hal ini, jika ada).	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Tengah: (1) SK Bupati Pemalang Nomor 140/532 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Pembina Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang dan (2) SK Bupati Brebes Nomor 700/594 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Supervisi dan Pendampingan Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes. • Aceh: (1) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemerintahan Gampong di Kabupaten Bireuen; (2) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Barat. • Jawa Timur: (1) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Bondowoso; (2) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pacitan.

3.2. Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan kecamatan dalam mendukung pemberian layanan ke desa

27	% kabupaten dengan peraturan tentang pendelegasian wewenang kepada camat dan anggaran yang dialokasikan ke kecamatan.	100%	●	74% (17 kabupaten).
----	---	------	---	---------------------

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
28	% Kecamatan yang memfasilitasi setidaknya satu kali rapat koordinasi dengan pemerintah desa dan unit layanan dalam enam bulan terakhir.	100%	●	83% (34 kecamatan).
3.2. Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan kecamatan dalam mendukung pemberian layanan ke desa				
29	% anggaran desa yang dialokasikan untuk layanan dasar.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> • 2017: Pendidikan (1,5%), Kesehatan (3,1%). • 2019: Pendidikan (3,6%), Kesehatan (5,5%).
30	% pemerintah desa yang menyerahkan APB Desa tepat waktu.	100%	●	14% (66 desa).
31	% desa yang menerapkan model Musdes/ Musrenbangdes Inklusif (forum perencanaan pembangunan desa khusus untuk perempuan dan/atau kelompok rentan) pada siklus perencanaan terakhir.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2019: 55% (148 desa di luar Papua dan Papua Barat). • Tahun 2020: 75% (258 desa di luar Papua dan Papua Barat).
32	Contoh kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbangdes untuk menangani kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pemberian layanan dasar yang dimasukkan ke dalam rencana akhir dan/atau dilaksanakan.	Tidak ditarget	●	Usulan kegiatan penyandang disabilitas saat Musyawarah Khusus Kelompok Rentan di Desa Jetak Pacitan tahun 2019 untuk penyediaan alat bantu visual, kursi roda, kruk, alat bantu dengar, dan guru khusus anak berkebutuhan khusus masuk dalam Rencana Kerja Desa (RKP Desa) 2020.

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
3.4. Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antara kabupaten, kecamatan, desa, dan unit layanan (mis. klinik, sekolah) dalam memberikan layanan				
33	% desa di Papua/Papua Barat yang menerapkan mekanisme perencanaan bersama dan kerja sama antara desa dan unit layanan.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 0%. Tahun 2020: 9% (12 dari 139 desa di luar Papua dan Papua Barat).
4. Sistem Informasi Desa				
4.1. Meningkatkan cakupan dan mendukung pelembagaan sistem informasi desa				
34	% Desa yang memiliki Sistem Informasi Desa (SID atau model lainnya).	60%	●	90% (435 desa).
35	# kabupaten yang memiliki regulasi dan alokasi anggaran untuk sistem informasi desa menggunakan model KOMPAK.	20	●	12 kabupaten.
36	% dari semua kecamatan di kabupaten wilayah kerja KOMPAK yang menerapkan SID.	Tidak ditarget	●	52% (194 kecamatan).
37	% desa yang dananya dialokasikan untuk SID dan/ atau Operator SID.	Tidak ditarget	●	74% (356 desa).
4.2. Meningkatkan penggunaan SID/SAIK oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan kegiatan lainnya				
38	% pemerintah desa menggunakan data dari SID selama siklus perencanaan terakhir.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 52% (216 desa). Tahun 2020: 80% (325 desa).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
39	% pemerintah desa menggunakan data dari SID untuk mengidentifikasi dan memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 65% (271 desa). Tahun 2020: 76% (311 desa).
40	% desa dengan SID yang memiliki data penyandang disabilitas, anak putus sekolah, anak yang terdaftar di PAUD, dokumen kependudukan, masyarakat miskin.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019: 20% (82 desa). Tahun 2020: 36% (146 desa).
41	Contoh pemerintah desa menggunakan SID.	Tidak ditarget	●	<p>Pemanfaatan SID di ± 435 desa (90% dari total yang disurvei) yang menggunakan SID daring dan luring:</p> <ul style="list-style-type: none"> 83% desa menggunakan SID untuk mengembangkan profil desa (Podes). 81% desa menggunakan SID untuk mendukung layanan dasar seperti pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bantuan pendidikan (Kartu Indonesia Pintar). 80% desa menggunakan SID untuk mendukung layanan cakupan administrasi kependudukan. 79% desa menggunakan SID untuk perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat COVID-19. 82% desa menggunakan SID untuk penetapan target BLT-Dana Desa. 87% desa menggunakan SID untuk perencanaan dan penganggaran desa.

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
4.3 Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya (termasuk SIAK)				
42	% kecamatan melaporkan bahwa desa memiliki akses ke setidaknya dua sistem daerah lainnya.	Tidak ditarget	●	88% (36 kecamatan).
43	% kecamatan dengan hanya satu model SID yang digunakan oleh desa.	Tidak ditarget	●	83% (34 kecamatan).
4.4. Membangun dan mengujicobakan sistem dasbor kecamatan dan kabupaten				
44	% kabupaten yang menggunakan jenis data SID untuk memvalidasi dan memverifikasi data kependudukan.	No target	●	35% (8 kabupaten).
45	Contoh penggunaan dasbor dan jenis data di pemerintah kabupaten.	No target	●	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Lombok Timur menggunakan SID untuk memvalidasi bantuan sosial (Bansos), khususnya pada masa pandemi COVID-19. Data SID mengontrol keakuratan penerima bansos dan menghindari pemberian bantuan ganda—kepada lebih dari satu orang per rumah tangga. • Pemkab Trenggalek menggunakan SID untuk mendukung layanan pencatatan sipil serta memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan.
5. Akuntabilitas Sosial				
5.1 Memperkuat BPD dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme aspirasi, literasi anggaran, dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya				
46	% Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan setidaknya satu orang berpengalaman tentang literasi anggaran (Sekar Desa)	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> • 61% (210 desa dampingan KOMPAK, di luar Papua dan Papua Barat). • 92% (49 desa dampingan Seknas FITRA di kecamatan wilayah kerja KOMPAK).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
47	Contoh bagaimana pelatihan literasi anggaran telah berkontribusi pada hasil perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.	Tidak ditarget	●	Di Desa Nipa Nipa, Kecamatan Bantaeng, setelah BPD melakukan pelatihan Sekar Desa, mereka membentuk Posko Aspirasi di mana masyarakat desa dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait pelayanan pemerintahan desa. Hasil dari Posko Aspirasi tersebut disusun dan dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi dengan 80% hasil aspirasi masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Prioritas tahun 2020.
48	% desa menerapkan mekanisme aspirasi masyarakat.	Tidak ditarget	●	345 desa (100%) di luar Papua dan Papua Barat.
49	Contoh mekanisme aspirasi masyarakat yang dimasukkan ke dalam rencana dan anggaran desa.	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa Bonto Jai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran Rp 5.000.000 dalam APBD Desa 2020 untuk penyandang disabilitas, termasuk kursi roda, setelah BPD menerima saran dari penyandang disabilitas selama Pekan Aspirasi. Pemerintah Desa Wanatirta di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp15.000.000 dalam APB Desa untuk membantu siswa yang rentan dan miskin agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah. Usulan bantuan siswa tersebut berawal dari pengaduan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melalui Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM).

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
50	% desa yang menerbitkan anggaran desa untuk diakses publik.	Tidak ditarget	●	99,9% (344 desa di luar Papua dan Papua Barat).
51	% desa yang menyelenggarakan musyawarah desa tentang pelaporan atau pertanggungjawaban (Musdes Pertanggungjawaban).	Tidak ditarget	●	97% (335 desa di luar Papua dan Papua Barat).
52	Daftar kebijakan dan program yang dipelopori atau diadvokasi oleh perempuan atau kelompok rentan.	Tidak ditarget	●	Upaya advokasi anggota PEKKA telah membuat pemerintah desa di 13 desa, 4 kabupaten, dan 3 provinsi (Jawa Timur, Aceh, dan NTB) menerbitkan SK terkait pelibatan kelompok perempuan dalam Musrenbangdes.

5.2 Memperkuat kebijakan dan pedoman nasional untuk akuntabilitas dan inklusi sosial sebagai implementasi UU Desa

53	Daftar kebijakan yang didukung serta rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat akuntabilitas sosial (dan kebijakan pemerintah, jika ada).	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> • Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya Pasal 84 yang mengatur tentang Akuntabilitas Sosial dan bentuk pelaksanaannya yang memuat pasal tentang Pos Pengaduan dan Jurnalisme Warga. • Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pasal 20–25 yang mengatur tentang pengawasan oleh BPD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial.
----	---	----------------	---	--

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
6. Keperantaraan Pasar				
6.1. Menyelesaikan implementasi dan dokumentasi uji coba keperantaraan pasar				
54	# UMK yang menggunakan pendekatan keperantaraan pasar.	12	●	11
55	Keuntungan rata-rata per UMK.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019 (4 UMK): Rp 14.507.528. Tahun 2020 (9 UMK): Rp 60.988.331. Catatan: 2 UMK tidak memproduksi barang atau menawarkan jasa pada 2020 karena pandemi COVID-19.
56	Pendapatan rata-rata per UMK.	Peningkatan tahun ke tahun	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019 (4 UMK): Rp 123.370.750 Tahun 2020 (9 UMK): Rp 159.146.889 Catatan: 2 UMK tidak memproduksi barang atau menawarkan jasa pada 2020 karena pandemi COVID-19.
57	% UMK dampingan yang mendapatkan keuntungan.	80%	●	Keuntungan di tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> UKM Arlamba di Kabupaten Aceh Barat Koperasi Berdikari Makmur di Kabupaten Pematang Pokdarwis Mahardika Sikasur di Kabupaten Pematang BUMDES Mokaf Bogati di Kabupaten Pacitan BUMDESMA Sari Bumi di Kabupaten Trenggalek Pokdarwis Bayan di Kabupaten Lombok Utara Pokdarwis Gelang-Gelang di Kabupaten Lombok Utara % keuntungan: 7/9 = 78%.

# Ref KPI	Indikator	Target	Hasil	Capaian
58	% perubahan laba dari tahun sebelumnya.	>5%	●	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2019 (4 UMK): Rp 14.507.528. Tahun 2020 (9 UMK): Rp 60.988.331. Perubahan laba: 420%

6.2. Mengembangkan pedoman nasional dan mendukung model pelebagaan/pendekatan keberantaraan pasar (termasuk pembiayaan alternatif melalui investasi dampak sosial)

59	Daftar perbaikan pedoman, pelatihan, dan platform konektivitas yang disediakan untuk memperkuat keberantaraan pasar bagi usaha mikro dan kecil (dan kebijakan pemerintah, jika ada).	Tidak ditarget	●	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Keberantaraan Pasar yang dikembangkan oleh Bappenas dan KOMPAK telah diterbitkan dan disebarluaskan. Pelatihan <i>e-commerce</i> untuk pemilik UMK dan pejabat pemerintah kabupaten untuk 1.875 peserta (49% peserta adalah perempuan).
----	--	----------------	---	--

Catatan: Perhitungan persentase pencapaian indikator (rencana kerja reguler) didasarkan pada Survei KOMPAK terbaru pada bulan Desember 2020 di wilayah kerja KOMPAK. Tanggapan diterima dari 484 desa, 41 kecamatan, dan 23 kabupaten.

Lampiran 2. Daftar Indikator KOMPAK 2020 (Rencana Kerja COVID-19)

No	Indikator	Kegiatan Unggulan Terkait	Target	Hasil	Capaian
1	Jumlah pedoman yang ditinjau dan diperbarui dengan dampingan KOMPAK sebagai respons COVID-19.	Semua kegiatan unggulan	6 pedoman	●	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Teknis PTPD/ Kecamatan untuk memfasilitasi revisi anggaran desa. Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa. Buku Pedoman Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi Anggaran Desa. Pedoman Pemantauan Penanganan COVID-19 oleh BPD dan Masyarakat. Pedoman Peran BUMDES sebagai lembaga yang ikut menyalurkan Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) di Kabupaten Trenggalek.
2	Jumlah masukan kebijakan sebagai respons COVID-19.	PFM, KVS	4 policies	●	<p>6 kebijakan telah selesai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang RKPD. APBN Tahun Anggaran 2021. Rencana Aksi Provinsi Papua. Imendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Desa. Rekomendasi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 untuk UMKM

No	Indikator	Kegiatan Unggulan Terkait	Target	Hasil	Capaian
3	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan yang difasilitasi KOMPAK sebagai respons COVID-19.	Semua kegiatan unggulan	1.800 peserta	●	Total 5.951 peserta pelatihan. <ul style="list-style-type: none"> • Januari–Juni 2020: 5.493 peserta pelatihan. • Juli–Desember 2020: 458 peserta pelatihan.
4	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami perubahan anggaran daerah (APBD) dalam penanganan COVID-19.	PFM	24 kabupaten	●	24 kabupaten.
5	Jumlah kabupaten dengan RKPD yang disesuaikan untuk merespons COVID-19.	PFM	24 kabupaten	●	16 kabupaten (semua kabupaten di luar Papua dan Papua Barat).
6	Persentase desa dengan anggaran desa yang direvisi dalam penanganan COVID-19.	KVS	80%	●	96% (346 desa).
7	Contoh pemanfaatan anggaran di tingkat desa dalam penanganan COVID-19.	KVS	Naratif	●	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan langsung Tunai (100% desa). • Penanganan dan pencegahan COVID-19 (95% desa). • Sosialisasi COVID-19 (88% desa). • Pendataan warga (79% desa). • Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (45%). • Bantuan langsung nontunai, bantuan makanan (30%).
8	Persentase desa dengan pembaruan data kelompok rentan (termasuk data OAP) terdampak COVID-19.	SID	80%	●	99% (360 desa).

No	Indikator	Kegiatan Unggulan Terkait	Target	Hasil	Capaian
9	Jumlah kecamatan yang menggunakan DTKS sebagai dasar pendistribusian program jaringan pengaman sosial di tingkat desa.	SID	75 kabupaten	●	100% (24 kabupaten).
10	Jumlah masyarakat di desa yang difasilitasi untuk memperoleh Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dalam enam bulan terakhir melalui pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan terdampak COVID-19.	PASH	23 orang	●	<ul style="list-style-type: none"> • 24 orang (akta kelahiran). • 39 orang (kartu keluarga).
11	Jumlah desa dampingan yang menggunakan APB Desa untuk respons COVID-19 dan diawasi penggunaannya oleh BPD dan masyarakat.	SA	20 desa	●	<ul style="list-style-type: none"> • 319 desa dampingan KOMPAK. • 19 desa dampingan Seknas FITRA di kecamatan wilayah kerja KOMPAK.
12	Jumlah desa yang memublikasikan data penerima manfaat jaring pengaman sosial di ruang publik.	SA	20 desa	●	<ul style="list-style-type: none"> • 313 desa dampingan KOMPAK. • 23 desa dampingan Seknas FITRA di kecamatan wilayah kerja KOMPAK.
13	Jumlah desa yang mengadakan Musdes Khusus untuk mengonsolidasikan data penerima manfaat jaring pengaman sosial.		20 desa	●	<ul style="list-style-type: none"> • 345 desa dampingan KOMPAK. • 25 desa dampingan Seknas FITRA di kecamatan wilayah kerja KOMPAK.

No	Indikator	Kegiatan Unggulan Terkait	Target	Hasil	Capaian
14	Jumlah desa yang menerima informasi dan materi pencegahan COVID-19 melalui jejaring PEKKA.		200 desa	●	352 desa dampingan KOMPAK.
15	Jumlah kajian yang dilakukan mengenai dampak COVID-19 dengan dampingan KOMPAK.		6 kajian	●	<p>Selesai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis APBD untuk mendukung Kemendagri dan Kemenkeu. • Dampak COVID-19 Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. • Analisis kebijakan Nasional Dampak COVID-19 Terhadap UKM. • Analisis layanan PASH pada Anak-Anak dan Populasi Rentan. Selama Pandemi COVID-19. • Analisis Dampak COVID-19 Terhadap PAUD. • Catatan Kebijakan UMD. <p>Belum selesai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis APB Desa untuk mendukung Kemendagri (Bina Pemdes) dan Kemendesa PDTT. <p>Dibatalkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Data Mobilitas Digital sebagai Dampak COVID-19.

Catatan: Perhitungan persentase pencapaian indikator (rencana kerja COVID-19) berdasarkan Survei KOMPAK tentang COVID-19 pada bulan Juni 2020 di wilayah kerja KOMPAK. Tanggapan diterima dari 364 desa.



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia